



BUKU AJAR

PENDAHULUAN

Tim Penulis :

DR. Iriyanto Widisuseno, M.Hum
Dra. Ana Irhandayaningsih, M.Si
Dra. Sri Rahayu Wilujeng, M.Hum
Ellen Ch. Nugroho, SH, M.Hum

**UPT MATA KULIAH UMUM (UPT MKU)
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**



**BP UNDIP
2007**

ISBN : 978-979-704-519-7

Sejalan dengan perkembangan zaman di era Reformasi, Pendidikan Pancasila secara terus-menerus juga mengalami pembenahan atau penyempurnaan materi perkuliahan. Penulisan buku ajar ini dilakukan dalam rangka upaya memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan zaman tersebut. Untuk itu, tim penulis buku ini berusaha untuk membuat telaah yang objektif, bahkan kritis, terhadap berbagai fakta dan peristiwa dalam sejarah bangsa Indonesia yang belum tercakup dalam materi perkuliahan Pendidikan Pancasila terdahulu.

Tren globalisasi tak luput diamati. proses menghilangnya batas-batas absolut teritorial antar negara ini menampilkan tantangan dan peluang yang tak bisa dihindari bangsa Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam beberapa bagian (bab) ditampilkan isu-isu mutakhir tentang globalisasi sebagai gambaran permasalahan terkini yang harus dipahami oleh para mahasiswa, tanpa bermaksud mengurangi nilai uraian perkara-perkara lainnya.

Secara keseluruhan buku ini sedapat mungkin disusun ke dalam perbincangan yang komprehensif, sehingga nampak sebagai sebuah pemikiran yang utuh dan fokus. Sasarannya bukan hanya menggugah ranah kognitif para mahasiswa, tetapi juga dan terutama membangunkan rasa afektif dan kepedulian terhadap keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara mereka sendiri, Indonesia.

Sudah barang tentu buku ajar ini masih ada kekurangannya. Kritik dan saran dari para pembaca selalu diharapkan untuk penyempurnaan.

Semarang, Desember 2005

Tim Penulis



| | |
|--|--|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Tinjauan Umum | 4 |
| | |
| Bab I | Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila |
| A. Pendahuluan | 5 |
| B. Landasan Pendidikan Pancasila | 6 |
| C. Tujuan Pendidikan Pancasila | 9 |
| | |
| Bab II | Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia |
| A. Pendahuluan | 12 |
| B. Profil Khas Masyarakat Indonesia | 13 |
| C. Terbentuknya Bangsa Indonesia | 15 |
| D. Situasi Historis Politik Menjelang Lahirnya Pancasila | 17 |
| E. Dimensi Imperatif Pancasila | 19 |
| F. Formulasi Final Pancasila | 21 |
| | |
| Bab III | Pancasila sebagai Sistem Filsafat |
| A. Pengertian Filsafat | 26 |
| B. Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat | 28 |
| C. Sistem Filsafat Pancasila | 29 |
| D. Konsep Dasar Filsafat Pancasila | 30 |
| E. Landasan Filsafat Pancasila | 31 |
| | |
| Bab IV | Pancasila sebagai Sistem Etika |
| A. Pengertian Etika | 36 |
| B. Ruang Lingkup Etika | 37 |
| C. Etika sebagai Cabang Filsafat Praktis | 37 |
| D. Kedudukan Pancasila sebagai Sistem Etika | 38 |
| E. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik | 39 |
| F. Penutup | 42 |

| | | |
|----------------|--|----|
| Bab V | Pancasila sebagai Ideologi Nasional | |
| A. | Pengertian Umum | 44 |
| B. | Sejarah dan Pengertian Ideologi | 46 |
| C. | Pancasila sebagai Ideologi Terbuka | 50 |
| Bab VI | Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | |
| A. | Pendahuluan | 54 |
| B. | Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | 55 |
| C. | Perwujudan Nilai-Nilai Dasar Pancasila dalam UUD 1945 | 56 |
| D. | Dinamika Implementasi UUD 1945 | 60 |
| E. | Gerakan Reformasi 1998 dan Amandemen UUD 1945 | 63 |
| F. | Perubahan-Perubahan UUD 1945 Hasil Amandemen | 66 |
| G. | Penutup | 71 |
| Bab VII | Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Era Globalisasi | |
| A. | Pendahuluan | 73 |
| B. | Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Negara-Bangsa | 74 |
| C. | Meneropong Fenomena Globalisasi | 76 |
| D. | Tantangan Globalisasi bagi Indonesia | 79 |
| E. | Paradigma Pembangunan Indonesia di Era Globalisasi | 80 |
| F. | Pendidikan Kebangsaan sebagai Antisipasi Globalisasi Kultural | 86 |



A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah umum yang membahas tentang masalah internalisasi nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dimensi Imperatif Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dari aspek historis, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila sebagai suatu sistem etika, fungsi Pancasila sebagai Ideologi nasional yang bersifat terbuka, kedudukan dan peran Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya di era globalisasi.

B. Manfaat / Relevansi

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa menganalisa tentang nilai, fungsi, dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mahasiswa dapat menganalisa praktek penyelenggaraan negara secara ilmiah. Manfaat lebih jauh adalah meningkatkan pengetahuan, kepekaan dan daya kritis mahasiswa tentang aktualisasi dan implementasi Pancasila secara nyata dalam kehidupan praksis.

C. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menerangkan tentang alasan diberikannya mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, nilai imperatif Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta peranan pokok Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa sistem pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Susunan Bab

Buku Ajar ini tersusun dari tujuh bab. Bab I membahas landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila. Bab II menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bab III menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab IV menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Bab V menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional. Bab VI menjelaskan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bab VII menguraikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.

Masing-masing bab ditulis secara komprehensif, mulai dari deskripsi singkat pokok bahasan, manfaat dan relevansi bahasan, tujuan instruksional umum dan khusus, uraian dan contoh, latihan, kunci jawaban, tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut, rangkuman, daftar pustaka, serta senarai.

LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis Pendidikan Pancasila, serta kaitan antara tujuan Pendidikan Pancasila dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menguraikan landasan dan tujuan diberikannya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerangkan landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- a. menjelaskan landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis Pendidikan Pancasila;
- b. menjelaskan kaitan antara tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan Pendidikan Pancasila.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.

A. Pendahuluan

Perjalanan bangsa Indonesia di tengah komunitas bangsa-bangsa di dunia sekarang ini menghadapi ujian yang cukup berat. Upaya mempertahankan kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa menghadapi tantangan besar. Indonesia dalam posisi sulit, dan dalam situasi paradoks. Kehidupan bangsa-bangsa di dunia cenderung bergerak mengglobal, menyatu. Pengaruh dari luar sangat kuat karena kemajuan teknologi komunikasi membentuk suatu wilayah yang tanpa batas. Batas-batas wilayah negara menjadi maya (*borderless*). Globalisasi yang

menerapkan liberalisasi ekonomi bukan lagi isu, karena Indonesia sudah ikut secara aktif dalam percaturan global. Hal ini juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan-kesepakatan ekonomi Internasional, dan kesepakatan untuk aktif dalam kancah pasar bebas. Semua dituntut bersaing bebas, tidak ada proteksi dan subsidi, baik kepada pengusaha kecil, petani, maupun koperasi. Apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan persaingan bebas ini? Jika masyarakat belum siap, maka liberalisasi ekonomi akan melahirkan masalah besar, yang dapat mengguncangkan perekonomian nasional. Guncangnya ekonomi juga akan berimbas pada kekacauan politik, dan sosial, serta kesejahteraan nasional.

Ketika dalam masyarakat kedaerahan masih ditemui jiwa dan semangat primordial, globalisasi menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Masyarakat bangsa yang heterogen baik dari sisi ekonomi, budaya, dan agama ini tentu membawa tingkat kesulitan tersendiri dalam menghadapi globalisasi. Masyarakat baik pada level *grassroot*, maupun pada level atas masih terkotak-kotak dalam label kelompoknya. Isyu-isyu dan konflik-konflik yang bernuansa suku, ras, golongan sosial-politik, dan agama menunjukkan mudahnya masyarakat yang heterogen ini tersulut. Fanatisme beragama pada sebagian masyarakat sangat tinggi, yang menjadikan embrio bagi radikalisme dan kekerasan (teror) semakin tumbuh subur di Indonesia.

Perubahan baik karena reformasi dan globalisasi ini merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Sebaiknya prioritas, dan solusi yang paling penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana perubahan dan pengaruh itu dikelola sehingga berdampak positif. Jati diri bangsa dan kepercayaan diri harus ditanamkan kuat sejak dini, sehingga bangsa Indonesia dan segenap generasinya tidak kehilangan arah. Semangat Pancasila harus ditanamkan secara terus-menerus dalam hati rakyat Indonesia. Perubahan boleh terjadi, pemerintahan boleh berganti, namun Pancasila sebagai jati diri, kepribadian, ideologi dan dasar negara harus tetap dipegang teguh oleh rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Pananaman jati diri dan kepribadian Pancasila tersebut dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendidikan.

B. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan historis

Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah perjuangan kebangsaan yang panjang. Ketika bangsa Indonesia ingin mendirikan negara, tata-nilai kebudayaan yang tumbuh subur diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar filsafat negara. Oleh Ir. Soekarno rumusan Dasar Negara ini diberi nama Pancasila, dan diterima dalam sidang BPUPKI, yang secara resmi ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara sudah semestinya harus diwujudkan secara nyata.

Zaman setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 1965 (Orde lama) adalah masa sulit. Pada zaman ini pemerintahan belum berjalan stabil, terus

bergerak berubah untuk menemukan formatnya yang pas. Hal yang menjadi tekanan saat itu adalah membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam kondisi sulit ini usaha untuk mengkaji Pancasila tetap dilakukan. Dalam bidang pendidikan, Pancasila mulai gencar digali. Ir Soekarno sebagai presiden waktu itu terus mendorong pengkajian Pancasila secara ilmiah. Tercatat nama-nama besar seperti Roeslan Abdulgani, Drijarkara, Soediman Kartohadiprojo, Soeryanto Poespowardojo, dan Notonagoro yang secara intens mengkaji Pancasila dan menyebarkannya lewat pendidikan.

Perjalanan Pendidikan Pancasila sering terkait dengan konstelasi politik yang berkembang. Pada zaman Orde Baru upaya penanaman semangat Pancasila yang sebenarnya adalah upaya sosialisasi program-program pemerintah sangat intensif dilakukan. Pemerintah menjadi penafsir tunggal Pancasila. Pancasila dijadikan label untuk menunjuk beberapa kebijakan seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Pendidikan Pancasila sering hanya sebagai alat legitimasi penguasa. Pendidikan lebih berorientasi kepada penguasa, tidak berorientasi kepada keilmuan. Kolusi, korupsi dan nepotisme yang kronis pada zaman Orde Baru telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kepercayaan rakyat hilang, Orde Baru tumbang. Seiring tumbanganya Orde Baru, Pancasila menghadapi serangan gencar dari berbagai pihak, yang menganggap Orde Baru identik dengan Pancasila. Upaya untuk membahas atau mengkaji Pancasila sering dicurigai sebagai upaya mengembalikan kekuatan Orde Baru. Pancasila bukan Orde Baru dan Orde Baru bukan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, sedangkan Orde Baru adalah suatu pemerintahan atau rezim yang juga ingin melaksanakan Pancasila. Pemikiran stereotip ini sampai sekarang ada kemungkinan masih hidup. Orde Baru sering terjebak dalam formalisasi Pancasila, namun dalam praktek sering terjadi penyimpangan.

Memasuki era reformasi pendidikan Pancasila mempunyai orientasi baru. Dengan berorientasi pada kepentingan keilmuan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisa Pancasila dan pelaksanaan/penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara secara kritis dan objektif.

Pendidikan Pancasila memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 11 Juni 2003 sebagai pengganti Undang-Undang 2/1989. Dalam Undang-Undang yang baru ini Pancasila tidak dimasukkan sebagai mata kuliah yang wajib diberikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Padahal, jika kita menengok sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama para pendiri negara yang merumuskan dasar negara, sudah selayaknya Pancasila diajarkan sebagai materi wajib dalam pendidikan. Pancasila adalah Dasar dan Ideologi negara. Bagaimanapun keputusan sudah diambil dan harus dihormati. Keputusan politik ini merupakan keputusan rakyat yang sah dan sudah berlaku. Keputusan ini harus diterima secara positif untuk menghindari kemungkinan adanya kejenuhan terhadap materi Pancasila yang diajarkan sejak sekolah dasar.

Melihat pengalaman ini dari satu sisi, dapat dipandang sebagai kemunduran, namun di sisi lain dapat pula menjadi pendorong/motivator untuk terus mengkaji Pancasila secara objektif, kritis dan ilmiah. Secara kuantitatif mahasiswa yang

mengambil mata kuliah Pancasila berkurang, namun secara kualitatif justru diharapkan pemahaman mahasiswa lebih meningkat, demikian juga dengan dosen pengajarnya.

2. Landasan Kultural

Secara historis benih-benih tumbuhnya nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia hidup di Nusantara ini. Istilah Pancasila dikenal sejak datangnya kebudayaan India yang merupakan ajaran moral. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta *Panca* artinya lima, dan *syila* berarti batu, sendi, alas, dasar, *syila* berarti tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Pancasila pada mulanya diajarkan agama Budha yang berarti lima aturan atau lima pantangan. Istilah Pancasila masuk dalam khasanah kesusasteraan Jawa Kuno dengan munculnya kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365, dan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berarti lima pantangan atau lima larangan. Larangan itu ialah: larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berjudi dan minumari keras, larangan berdusta, dan larangan berzina. Ajaran ini kemudian berkembang dengan di masyarakat dengan istilah Ma Lima.

Pancasila sebagai dasar negara baru ada setelah negara Indonesia berdiri, namun unsur-unsur ajaran Pancasila sudah tumbuh berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Kepercayaan adanya Zat Yang Maha Kuasa yang berada di luar kekuatan manusia sudah tumbuh dalam kebudayaan Indonesia Kuno, demikian juga dengan ajaran tentang kemanusiaan. Benih rasa persatuan juga sudah muncul dengan dijadikannya bahasa Melayu sebagai pengantar dalam perdagangan antar pulau. Rasa persatuan ini diperkuat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Nasional. Semangat musyawarah pun sudah tumbuh lama dalam budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat paguyuban mempunyai semangat untuk hidup dalam kebersamaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Pancasila bukanlah suatu sistem nilai yang bersifat teoritis. Pancasila dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia, Pancasila berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia. Pancasila sudah tumbuh subur dalam adat-istiadat, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia. Dengan mengajarkan, menyebarkan, dan mengembangkan Pancasila berarti juga mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Landasan Yuridis

Yuridis berasal dari kata *yuris*, yakni hukum. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi Pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis sebagai berikut:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV tentang tujuan nasional, di antaranya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 mengatur lebih lanjut tentang hak tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam ayat 1 diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Dalam ayat 2 diatur

bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran Nasional yang diatur dalam Undang-Undang.

c. Undang-Undang No. 20. Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat 2: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional bangsa Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- BAB II (Dasar, Fungsi dan Tujuan) pasal 2: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Landasan Filosofis

Nilai-nilai Pancasila secara intrinsik berwujud dan bersifat filosofis, sedang secara ekstrinsik (praktis) berupa pandangan hidup. Nilai-nilai tersebut merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia, berupa cara pandangnya mengenal arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai dasar, dan puncak budaya bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasar nilai-nilai tersebut dalam menjiwai dan memberi watak bangsa Indonesia, maka sangat beralasan untuk memberikan pengakuan terhadap kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia.

Fersoalannya sekarang, agar nilai-nilai dasar dan puncak budaya tersebut tetap lestari, pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia itu perlu senantiasa ditumbuhkembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Penyebarluasan dan pengkajian ilmiah secara terus-menerus melalui Pendidikan Pancasila yang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

C. Tujuan Pendidikan Pancasila

Setiap penyelenggaraan suatu perkuliahan didasari pada suatu tujuan. Tujuan Pendidikan Pancasila pada dasarnya secara tidak langsung juga merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen Mata Kuliah Umum dalam kurikulum di pendidikan tinggi. Kurikulum merupakan operasionalisasi Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional itu sendiri merupakan usaha mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Tujuan Nasional

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dalam kalimat:

... untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

2. Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan menurut Undang-Undang 20/2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UU 20/2003 Pasal 3 : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi adalah agar mahasiswa :

- a. Dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia.
- b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEK dan Pembangunan.
- d. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila.

II. CONTOH-CONTOH

1. Situasi/tekanan dari luar yang menyulitkan bangsa Indonesia: globalisasi secara paksa, perdagangan dan persaingan bebas yang tidak seimbang, antara negara maju dan berkembang.
2. Praktek penyelenggaraan negara yang menyimpang: kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli, mafia peradilan, penegakan hukum lemah, pemerintahan militer, lemahnya posisi lembaga legislatif dan yudikatif di depan eksekutif.
3. Suasana dalam negeri yang belum kondusif: pertikaian antar etnis, pertikaian antar agama, fanatisme/radikalisme dalam agama, kekerasan, main hakim sendiri, isu putra daerah.

III. LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan berbagai permasalahan yang membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia!
2. Terangkan urgensi Pendidikan Pancasila diberikan di lingkungan pendidikan tinggi!
3. Terangkan Landasan Pendidikan Pancasila!
4. Terangkan hubungan antara tujuan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Nasional, dan Tujuan Nasional!

IV. KUNCI JAWABAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan beberapa istilah dibawah ini:
 - Korupsi, kolusi, nepotisme
 - Globalisasi, liberalisasi ekonomi
 - Primordialisme, radikalisme, fanatisme
2. Jelaskan landasan Pendidikan Pancasila dan apa manfaat diberikannya pendidikan Pancasila bagi anak didik pada khususnya dan bagi pembangunan pada umumnya.

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Pendidikan Pancasila sangat urgen untuk diajarkan kepada anak didik, terutama kalangan mahasiswa. Pelaksanaan Pendidikan Pancasila mempunyai landasan yang jelas, yaitu landasan yang berkaitan dengan aspek kesejarahan, landasan kultural (budaya), landasan filosofis dan landasan yuridis. Diberikannya Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk memenuhi tujuan Pendidikan Nasional yang sekaligus upaya mewujudkan pembangunan nasional.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2005).
- Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen ke empat, Jakarta: Sinar Grafika (2004).
- Notonagoro, 1983, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, tanpa tahun, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

IX. SENARAI

- Landasan historis:** landasan yang berkaitan dengan aspek sejarah.
- Landasan kultural :** landasan yang menerangkan tentang aspek budaya.
- Landasan filosofis :** landasan yang pokok utama yang mendasari sesuatu.
- Landasan Yuridis :** landasan hukum bagi operasionalisasi sesuatu.

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: profil khas rakyat Indonesia, terbentuknya bangsa Indonesia, situasi historis-politik lahirnya Pancasila, dimensi imperatif Pancasila, dan formulasi final Pancasila.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menguraikan korelasi esensial antara Pancasila dengan karakter kepribadian bangsa Indonesia dan eksistensi Pancasila sebagai jawaban Imperatif terhadap kebutuhan historis-politik Indonesia.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerangkan latar belakang historis, sosial, dan politik mengapa Pancasila sangat tepat dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia kuno;
- menjelaskan proses terbentuknya identitas bangsa Indonesia;
- menjelaskan latar belakang historis politik diterimanya Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945;
- menyimpulkan dimensi imperatif Pancasila dari tinjauan historis.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah istilah politik, Pancasila baru dicetuskan di hadapan publik pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno di hadapan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mulanya, Ia menimbang-nimbang untuk memakai istilah Panca Dharma,

tetapi terasa kurang cocok karena *dharma* berarti "kewajiban", padahal yang dikehendaki adalah "dasar". Kemudian atas saran seorang teman yang ahli bahasa, Soekarno memilih istilah Panca Sila. "Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi!" serunya, disambut tepuk tangan riuh hadirin sidang. Selama pidato Lahirnya Pancasila ini total ada dua belas kali tepuk tangan, suatu pertanda diterimanya secara aklamasi kelima prinsip tersebut sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Demikianlah Pancasila lahir sebagai salah satu produk historis yang paling penting bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara secara formal disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, saat UUD 1945 secara resmi menjadi konstitusi NKRI dengan Pancasila tercantum dalam alinea IV Pembukaannya. Sebagai dasar negara, Pancasila akan menjadi landasan dari segala kebijakan pemerintahan dan pengelolaan negara, sekaligus sebagai sumber segala sumber hukum (sumber hukum tertinggi).

Hal yang perlu diingat adalah bahwa kedudukan formal yuridis Pancasila sebagai dasar negara tersebut tidak terjadi begitu saja. Diterimanya Pancasila secara aklamasi oleh tokoh-tokoh BPUPKI hanyalah pengakuan bahwa kelima prinsip Pancasila secara substansial menjadi prinsip-prinsip hidup seluruh bangsa Indonesia. Di sini, Pancasila didefinisikan sebagai pandangan hidup bangsa. Keberadaannya dapat dilacak sampai jauh ke masa lampau, sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Itu sebabnya Pancasila bisa berfungsi sebagai cita-cita dan arahan hidup warga bangsa sehari-hari dalam wujud nilai-nilai dan kepribadian luhur bangsa.

Dengan mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, kita akan melihat bahwa Pancasila bersifat imperatif bagi keberadaan bangsa Indonesia. "Imperatif" artinya sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada dan diterima, tidak bisa ditawar, tidak ada alternatif lain, jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan keberadaan dan identitasnya. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara berjalan secara alamiah, berdasar kesadaran sukarela para pendiri negara, bukan paksaan dari pihak asing mana pun. Kajian ilmiah sangat bermanfaat untuk menyadari aspek imperatif Pancasila dari tinjauan historis ini.

B. Profil Khas Masyarakat Indonesia

Untuk mengetahui, mengapa Pancasila sangat cocok menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, kita pertama-tama perlu menelaah profil khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana kita ketahui, wilayah yang sekarang menjadi teritori NKRI berbentuk kepulauan dan terbentang luas dari barat ke timur, utara ke selatan. Terletak di Asia Tenggara di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kepulauan kita meliputi 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 54.716 km dan luas total wilayah hampir dua juta kilometer persegi. Fakta-fakta ini menobatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Penduduk kepulauan Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Cina Selatan (sekarang Propinsi Yunan). Mereka datang bergelombang, antara lain gelombang Proto Melayu sekitar 3000 tahun lampau dan Deutero Melayu sekitar 2000 tahun lampau. Penelitian mutakhir memunculkan dugaan bahwa pada

awalnya persebaran penduduk Indonesia sebenarnya berpusat di Filipina Selatan dan Indonesia Timur. Setelah mengembara ke berbagai tempat – termasuk Cina Selatan, Siam, Benggala, dan India – penduduk kedua daerah tersebut pulang kembali ke kampung halaman. Mereka semua berbaur lalu membentuk ras yang kini kita sebut "Melayu". Semua riwayat yang rumit ini menghasilkan suatu sikap hidup yang menjadi ciri pokok masyarakat Nusantara. Ciri pokok itu adalah perbauran manusia dari berbagai ras dan daerah asal, ciri *bhinneka tunggal ika* (Simbolon, 1995:7-8).

Kebhinekaan itu muncul juga dalam hal kehidupan beragama. Seperti masyarakat lain di seluruh dunia, beragama merupakan sesuatu yang sangat kodrati bagi penduduk Nusantara. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berkodrat religius atau *Homo religius*. Apalagi pada kelompok manusia yang hidupnya sangat dekat dengan alam. Mereka sangat menyadari adanya kekuatan adikodrati yang lebih besar dari manusia (*supranatural*). Sebelum masuknya agama-agama besar, telah muncul animisme dan dinamisme dalam wujud berbagai aliran kepercayaan lokal.

Pada abad pertama Masehi, terjalin hubungan yang erat antara Indonesia dengan India. Orang-orang Indonesia mengunjungi India dan pulang kembali membawa gagasan-gagasan budaya dan agama dari sana, sehingga tersebarlah agama Hindu di Indonesia. Utusan-utusan dari kasta Brahmana India menjadi penasihat para raja di Indonesia yang telah memeluk agama Hindu. Selanjutnya pada abad ke-4, pengaruh agama Buddha mulai masuk pula ke negeri kita. Para rahib berkeliling negeri, menyebarkan Buddhisme dan mendirikan biara-biara. Secara umum agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Menyusul kemudian masuk ke Indonesia adalah agama Islam dan Kristen. Agama Islam disebarkan pada abad oleh para pedagang dari Gujarat dan kemudian dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Beberapa abad sejak masuknya Islam, giliran agama Kristen yang tersebar di Indonesia. Masuknya agama Kristen disebabkan oleh kedatangan para pedagang Eropa, yang biasanya disertai kaum misionaris – agama Katolik dari Portugis dan agama Protestan dari Belanda dan Inggris – yang merasa mengemban suatu *mission sacrée*. Selain kelima agama tersebut, di kalangan para imigran Cina berkembang ajaran Konfusianisme (Konghucu) dan Taoisme yang mereka warisi dari negeri leluhur. Dengan demikian di berbagai wilayah Indonesia terbentuk kantong-kantong umat agama yang berbeda-beda, namun secara umum masyarakat Nusantara bersifat religius.

Karena dilewati oleh garis khatulistiwa, wilayah Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan tinggi. Iklim tropis ini ditunjang oleh tanah yang subur di sebagian besar wilayah akibat banyaknya gunung berapi dari dua jalur pegunungan vulkanik, mengkondisikan Indonesia menjadi wilayah yang berlimpah kekayaan alam hayati. Saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga negara paling kaya dalam hal kekayaan alam hayati setelah Brasil dan Zaire. Beberapa nama kuno untuk menyebut pulau-pulau di Indonesia, seperti Jawa Dwipa (pulau beras) dan Suwarnadwipa (Pulau Emas), menunjukkan betapa para pengunjung sangat terkesan melihat kekayaan alam negeri ini.

Tanah yang subur dan laut yang luas sebagai negara kepulauan membentuk rakyat Indonesia berpola hidup agraris dan maritim. Secara alamiah, rakyat menjalankan sistem masyarakat yang bersifat komunal. Mereka mengorganisasi diri dalam kampung-kampung. Nilai kebersamaan dan gotong royong dengan sendirinya menjadi sangat penting untuk melestarikan kelompok-kelompok sosial mereka.

Sekalipun banyak keuntungannya, situasi geografis Indonesia juga membawa ancaman dan tantangan. Sebagai sebuah negara kepulauan, rakyat di berbagai pulau di Indonesia terbatas akses pergaulannya satu dengan yang lain. Suatu suku cenderung terisolasi di wilayah asli mereka sendiri. Wilayah yang berbentuk kepulauan secara alamiah menciptakan kesenjangan antara penduduk di satu pulau dengan pulau yang lain. Suku-suku mengembangkan tradisi mereka masing-masing, bahkan pada satu pulau yang sama bisa jadi antar suku tidak saling memahami bahasanya, sebab ada ratusan bahasa tradisional di Nusantara. Dampak negatif dari kondisi ini akan dapat kita lihat dalam gagalnya berbagai perlawanan terhadap pendudukan dan penjajahan bangsa asing, sebab perlawanan-perlawanan itu berlangsung sendiri-sendiri, bersifat kedaerahan atau kesukuan, sehingga menjadi tidak efektif.

Sementara itu, letak yang strategis di antara dua benua dan dua samudera serta kesuburan wilayahnya, menyebabkan banyak pihak berebut untuk menguasainya. Di dalam negeri sendiri, berbagai kerajaan timbul silih berganti dalam upaya meraih dominasi seluas-luasnya. Kerajaan Sriwijaya berjaya selama 600 tahun (abad ke-7 sampai abad ke-13), digantikan oleh Kerajaan Majapahit di Jawa (berdiri tahun 1292), sedangkan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil banyak jumlahnya. Dari luar negeri, sejak kunjungan Marco Polo dari Venesia tahun 1292, bangsa Spanyol dan Portugis berdatangan ke Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka, membangun benteng di sana, dan mengatur sebagian besar perdagangan di wilayah ini. Inggris dan Belanda menyusul dengan perusahaan perdagangan masing-masing, EIC dan VOC. Dan sejak Belanda merebut Malaka dari Portugis tahun 1641, pengaruh Belanda semakin lama semakin besar.

C. Terbentuknya Bangsa Indonesia

Proses menyatukan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang beragam ras, budaya, dan agama ke dalam satu entitas bernama bangsa Indonesia tidaklah mudah dan butuh waktu lama. Parakitri Simbolon (1995) membagi sejarah Indonesia ke dalam dua tahap. *Pertama*, tahap rakyat menjadi bangsa. Dalam tahap ini kumpulan-kumpulan manusia yang hidup di wilayah Nusantara yang tadinya terpisah-pisah secara geografis maupun kultural, lambat laun menyatu dalam satu identitas politis bersama bernama "Indonesia". *Kedua*, tahap bangsa menjadi negara. Dalam tahap ini, kumpulan manusia yang telah memiliki satu identitas politis menyusun organisasi kekuasaan untuk mengelola kehidupan mereka bersama secara efektif.

Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa seperti Cina, Jepang, India, atau Slavik, ada sesuatu yang sangat khas dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak dipersatukan oleh sesuatu yang bersifat fisik, seperti ras, kesatuan wilayah

geografis, budaya atau bahasa, atau agama. Dari segi ras, rakyat Indonesia adalah keturunan dari berbagai ras yang berbeda. Dari segi kesatuan wilayah geografis, wilayah yang didiami bangsa Indonesia jelas berbentuk kepulauan. Dari aspek budaya atau bahasa, ada ratusan bahasa tradisional yang dipakai di seluruh Indonesia. Sedangkan, dari aspek agama, jelas sekali rakyat Indonesia memeluk banyak ragam agama.

Lalu apa yang mempersatukan rakyat Indonesia menjadi sebuah bangsa? Di sini, para pemikir bangsa kita memperoleh sumbangan pemikiran yang bermanfaat dari filsuf dan ilmuwan Perancis yang hidup abad ke-19, Ernest Renan. Beberapa butir penting teorinya yang sangat relevan dengan pengalaman historis bangsa Indonesia adalah:

1. Bangsa adalah sebuah jiwa

Persoalan pertama yang dibidik oleh Renan dalam kuliah Sorbonne adalah faktor penentu eksistensi bangsa. Ia menginventaris beberapa teori yang umum tentang unsur eksistensial bangsa, meneliti teori-teori itu, dan kemudian menolaknya. *Pertama*, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh ras. Renan mengakui kenyataan ada banyak bangsa yang terbentuk karena kesamaan ras, tetapi banyak pula bangsa yang terdiri dari berbagai ras. Tiga bangsa yang paling menonjol di Eropa Barat – Inggris, Perancis, dan Italia – sangat majemuk dengan banyak kasus percampuran darah. Meskipun istilah "keturunan murni" warga pribumi semakin kabur, eksistensi ketiga bangsa itu tetap kokoh. Jadi, sebuah bangsa tidak bisa didefinisikan berdasarkan rasnya.

Kedua, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh bahasa. Renan setuju bahwa bahasa dapat mempersatukan, tetapi tidak selalu membentuk identitas sebuah bangsa. Bahasa adalah bentukan sejarah yang tidak bisa menjadi dasar keputusan sekelompok orang harus bersama-sama menentukan hidup atau mati mereka. Ada kasus-kasus di mana bahasa yang berlainan tidak menghalangi sekelompok orang yang memiliki kesamaan prinsip dan minat untuk bersatu sangat erat. Jadi, sebuah bangsa tidak bisa didefinisikan berdasarkan bahasanya.

Ketiga, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh agama. Agama adalah urusan pribadi, pilihan menurut hati nurani masing-masing. Bangsa-bangsa yang besar membiarkan warganya memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.

Keempat, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh kesamaan tradisi dan budaya. Sekalipun kesamaan tradisi dan budaya bisa menjadi ikatan kuat dalam masyarakat, namun Renan tidak percaya tradisi yang sama akan *selalu* membentuk bangsa. Sentimen nasionalisme bisa lebih mempersatukan daripada kesamaan tradisi.

Kelima, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh batas-batas geografis. Menurut Renan, batas-batas geografis ditetapkan setelah identitas bangsa terbentuk, bukan sebaliknya. Jika wilayah geografis telah ditetapkan lebih dahulu baru ada bangsa, akan terjadi bencana kekerasan.

Persoalannya, apakah hakikat bangsa itu menurut Renan?

Salah satu kutipan yang terkenal dari kuliah Ernest Renan di Universitas Sorbonne menyebutkan: *Une nation est une âme, un principe spirituel*. Sebuah bangsa adalah sebuah jiwa, sebuah prinsip rohani, "sebuah solidaritas berskala

ratusan tradisi daerah dengan bahasa yang berlainan. Dalam hal agama, ada enam agama besar dan berbagai aliran religi lokal yang hidup di antara rakyat. Situasi geografis kepulauan juga cenderung melahirkan sikap primordial, kedaerahan, atau kesukuan, terbukti dari perlawanan kepada Belanda juga bersifat lokal.

Identitas baru yang menyatu mulai terbentuk dengan penjajahan Belanda yang menyatukan sistem ekonomi, administrasi politik (pemerintahan), dan budaya (pendidikan). Pengaruh nasionalisme modern semakin kuat di kalangan rakyat terjajah setelah pemerintah kolonial menjalankan Politik Etis sejak 1870, terutama karena program edukasi. Akibat didirikannya sekolah-sekolah di Nusantara, muncul golongan cendikia. Golongan ini memiliki kapasitas berpikir rasional yang sama dengan yang dimiliki bangsa Barat. Mereka menyerap modernitas Eropa yang dikenal mengunggulkan cara berpikir yang sistematis dan rasional serta sistem demokrasi.

Bersamaan dengan Politik Etis, pergerakan nasionalisme modern di Asia juga sedang menguat. Di Turki muncul gerakan Turki Muda (1880-1913). Goyahnya kejayaan Turki dan bangkitnya generasi muda Turki telah merangsang pembaruan dalam pemikiran Islam, termasuk di Hindia Belanda. Sementara itu, di Cina, muncul perlawanan rakyat yang disebut pemberontakan Boxer pada tahun 1900. Hal ini menimbulkan pula semangat anti penjajahan dalam masyarakat Cina di Hindia Belanda. Akhirnya, kemenangan Jepang atas Rusia menghancurkan anggapan tentang Eropa yang tak terkalahkan (Simbolon, 1995:230).

Di dalam negeri, kemiskinan sangat menyolok. Karena imperialisme Belanda adalah imperialisme penanaman modal, bukan seperti imperialisme Inggris yang mencari pasar perdagangan, maka Belanda tidak punya kepentingan untuk meningkatkan daya beli rakyat. Hal yang penting bagi Belanda adalah menjadikan Indonesia tempat pengambilan sumber bahan baku untuk kapitalisme di negeri Belanda, terutama sebagai tempat penanaman modal. Agar rakyat tidak memberontak dengan upah yang minimum, maka kebutuhan-kebutuhan rakyat pun dikondisikan untuk minimum. Rakyat Indonesia dikondisikan menjadi "bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa" (*een volk van koelies en een koelie onder de naties*). Selain itu, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kaum ningrat feodal dan golongan Cina untuk menjadi sarana penghisap rakyat. Akibatnya, rakyat betul-betul dimelaratkan dan menjadi lemah secara ekonomi dan politik (Christiani, 2002:20).

Terggerak oleh berbagai faktor dalam negeri dan luar negeri, golongan cendikia mulai mengorganisir diri dan masyarakatnya secara modern. Lahirlah organisasi modern yang pertama, Boedi Oetomo, pada tanggal 20 Mei 1908, didirikan oleh para mahasiswa fakultas kedokteran STOVIA. Dari aspek wilayah pergerakan dan orientasi program, Boedi Oetomo boleh dibilang masih bersifat kedaerahan, hanya memusatkan perhatian pada bidang kebudayaan dan bagi suku Jawa. Sekalipun demikian, lahirnya BO merupakan titik tolak Kebangkitan Nasional.

Menyusul BO, berdirilah Sarikat Dagang Islam (1911) hasil prakarsa H. Samanhudi, sebagai organisasi para pedagang "pribumi" melawan para pedagang Tionghoa. Karena haluannya yang lebih luas cakupan, SDI dengan cepat berkembang. Satu tahun kemudian, SDI berubah rama menjadi Sarekat Islam,

sehingga wilayah gerakannya menjadi semakin luas, bukan hanya di bidang perdagangan. Pengaruh dan popularitas SI jauh melampaui Boedi Oetomo, dan organisasi ini berkembang sampai ke luar Pulau Jawa dengan anggota lebih dari setengah juta orang.

Jejak Sarekat Islam segera diikuti oleh organisasi-organisasi kebangsaan lainnya. Tanggal 6 September 1912 di Bandung lahirlah Partai Hindia atau *Indische Partij*, partai politik pertama di Hindia-Belanda. Pendirinya adalah E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat. Dengan jelas IP menyatakan bahwa cita-citanya ialah menyatukan seluruh penduduk yang mengakui Hindia sebagai tanah air mereka untuk mencapai "Hindia yang bebas dari Nederland" (Simbolon, 1995:247).

Tak lama setelah pendirian IP, pada tanggal 18 November 1912, K.H. Achmad Dahlan mendirikan *Muhammadiyah*, suatu organisasi pembaruan dalam Islam dengan mengacu pada pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida. Tujuannya yang pokok adalah menyebarkan ajaran Islam kepada Bumiputra di seluruh Jawa-Madura (Simbolon, 1995:253). Kemudian bermunculan pula organisasi pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Islamieten Bond*, *Hatopan Christen Batak*, dan sebagainya.

Tahun 1914, muncul faktor baru dalam perpolitikan di Indonesia, yakni elemen sosialisme dan komunisme. Pemimpin buruh Nederland, Hendricus Sneevliet memprakarsai berdirinya *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV). Tokoh-tokoh ISDV berupaya mempengaruhi SI untuk menjadi sosialis, sehingga akhirnya SI pecah menjadi dua, SI Merah yang berubah haluan menjadi sosialis dan SI Putih yang tetap pada jalur semula.

Dari sini kita melihat, ternyata sekalipun memiliki cita-cita yang sama (kemerdekaan) dan musuh yang sama (anti-kolonialisme), tetapi terjadi pengelompokan di kalangan organisasi modern. Perpecahan di kalangan organisasi modern ini terus bertahan sampai akhirnya terkristal ke dalam tiga kelompok ideologis besar. Hal ini yang diamati oleh Soekarno melalui artikelnya, *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* yang terbit di majalah *Suluh Indonesia Muda* tahun 1926. Ada tiga golongan yang dominan di kalangan pergerakan, dengan tujuan masing-masing berbeda. Golongan kedaerahan, yang kemudian menjadi golongan nasionalis mencita-citakan negara yang demokratis dan cenderung bersifat sekuler, yakni memisahkan agama dari politik. Golongan Islam menginginkan Nusantara kelak menjadi negara agama, berdasarkan diri pada syariat Islam. Golongan Marxis berkehendak agar negara Indonesia yang berdiri kelak tumbuh dengan prinsip-prinsip Marxisme, bahkan Leninisme: satu partai sentral, kekuasaan di tangan kaum buruh dan tani.

Perbedaan ini terus tampak dalam pergerakan Indonesia. Partai-partai yang berdiri selalu cenderung kepada salah satu dari tiga gerakan itu. Di pihak nasionalis ada PNI, Partindo, Parindra, dan sebagainya. Di pihak agama ada Masjumi. Di pihak sosialis/ komunis ada PKI, Murba, dan PSI. Ketiga pihak cenderung saling memandang rendah, bersaing memperebutkan pengaruh, dan menaruh kecurigaan pada pihak yang lain. Namun, lepas dari perbedaannya, sebenarnya di antara ketiga pihak tersebut juga terdapat kesamaan-kesamaan. Mereka semua sama-sama anti penjajahan dan sama-sama ingin mewujudkan Indonesia Merdeka.

E. Dimensi Imperatif Pancasila

Jika dibiarkan tanpa penengah, maka ketiga golongan politik di Indonesia akan terus saling berselisih paham. Potensi konflik inilah yang dengan sengaja dimanfaatkan oleh pihak Jepang untuk mengulur-ulur waktu pemberian kemerdekaan terhadap Indonesia. Setelah terdesak dalam Perang Pasifik, sedangkan di dalam negeri tuntutan untuk merdeka semakin kuat, Jepang berusaha akal-akalan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kepada lembaga yang terdiri dari golongan nasionalis, Islam, priyayi, serta berbagai etnis itu diberi tugas yang berat untuk membahas secara rinci soal: (a). bentuk pemerintah negara yang didirikan; (b). wilayah; (c). masalah kebangsaan; (d). kebijaksanaan ekonomi dan keuangan; (e). pertahanan; (f). pendidikan; (g). rancangan UUD; (h). posisi agama dalam negara. Pernyataan Ichibangase, orang Jepang yang menjabat wakil ketua BPUPKI, menunjukkan bahwa pihak Jepang percaya tema-tema itu akan menimbulkan cukup banyak bahan perdebatan antara golongan-golongan yang ada (Dahm, 1987:361).

Jepang sangat menanti-nantikan pertentangan sengit antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan agama, khususnya dalam tema posisi agama dalam negara. Akan tetapi, wakil-wakil dari kedua golongan itu sama-sama sadar akan politik *divide et impera* yang sedang dimainkan Jepang, sehingga sama-sama memprioritaskan Indonesia Merdeka di atas kepentingan kelompok. Di sinilah ada peran penting dari Soekarno dengan gagasan-gagasannya tentang persatuan.

Pada tanggal 1 Juni 1945, hari terakhir sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengajukan usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Sebelum menaparkan asas-asas tersebut, ia menekankan pentingnya mengutamakan kemerdekaan Indonesia ketimbang hal-hal detail yang membawa perselisihan. Untuk itu, ia melihat perlunya menemukan suatu dasar negara yang bisa disetujui oleh semua pihak.

... kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *Weltanschauung* yang kita semua setuju: Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju (Deppen, 2003:13)

Setelah itu, ia mengajukan lima asas yang ia sebut Pancasila, yakni:

1. Nasionalisme atau Peri Kebangsaan

Soekarno sengaja memilih asas kebangsaan sebagai asas yang pertama, bukan asas Ketuhanan. Dengan mengutamakan asas ini, maka semua golongan yang berselisih akan dipersatukan dalam perjuangan mewujudkan suatu negara kebangsaan (*nation-state*) Indonesia yang merdeka. Negara kebangsaan ini akan ditempatkan lebih tinggi dari kepentingan golongan-golongan, sebab negara kebangsaan ini bukan milik satu golongan saja, melainkan semuanya. Tidak ada golongan politik atau status ekonomi tertentu yang diistimewakan lebih dari yang lain. Nasionalisme di sini tidak dimaksudkan sebagai nasionalisme yang sempit.

Semua kelompok dan setiap wilayah di Nusantara adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan besar bernama Indonesia.

2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

Sejarah menunjukkan bahwa nasionalisme yang sempit sangat berbahaya. Karena nasionalisme yang ekstrim, terlalu bangga terhadap identitasnya sebagai ras Arya, fasisme Nazi Hitler di Jerman membantai jutaan orang Yahudi. Oleh karena itu, kebangsaan harus diimbangi dengan peri kemanusiaan, penghargaan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, nasionalisme tidak akan berkembang menjadi chauvinisme atau jingoisme yang mengunggulkan bangsa sendiri dengan merendahkan bahkan menindas bangsa-bangsa lain. Negara Indonesia diarahkan untuk menjadi pendukung terciptanya "kekeluargaan bangsa-bangsa" (Deppen, 2003:19). Ditambahkannya internasionalisme (kemanusiaan) kepada nasionalisme (kebangsaan) menciptakan prinsip yang dinamai Soekarno *sosio-nasionalisme*.

3. Mufakat atau Demokrasi

Oleh karena negara Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, atau satu ideologi tertentu, maka perlu ada sistem permusyawaratan atau perwakilan untuk mewakili kepentingan semua pihak. Aspirasi tiap-tiap kelompok perlu diperjuangkan secara demokratis dari kepentingan rakyat diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Misi dari lembaga ini adalah sekaligus sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat karena hanya dengan memenangkan amanat rakyatlah wakil suatu kelompok dapat mewujudkan gagasan-gagasan politiknya.

4. Kesejahteraan sosial

Secara alamiah, para tokoh wilayah bekas jajahan merasa curiga dan tidak suka terhadap kapitalisme. Antisipasi terhadap eksese kapitalisme inilah yang menjadi roh dari prinsip kesejahteraan sosial. Oleh karena kapitalisme dapat menyebabkan timbulnya eksploitasi terhadap kaum miskin dan lemah, maka sistem ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga kekayaan Indonesia nantinya bisa dibagi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi politik lewat lembaga perwakilan rakyat harus ditambah dengan demokrasi ekonomi, yaitu keadilan sosial dalam wujud sistem ekonomi pro rakyat. Perpaduan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini disebut Soekarno sebagai prinsip *sosio-demokrasi*.

5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Bangsa Indonesia sejak awalnya adalah bangsa yang religius. Oleh karena itu, negara perlu dibangun atas dasar ketakwaannya terhadap Tuhan YME, dirancang untuk menjadi negara yang ber-Tuhan. Namun, perlu disadari bahwa agama yang dipeluk bangsa Indonesia tidak hanya satu. Untuk itu, negara Indonesia harus menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, "menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa"

(Deppen, 2003:24). Prinsip ketuhanan yang berkeadaban mensyaratkan adanya saling menghormati antar umat beragama satu dengan umat beragama lain.

Dengan mengamati kelima asas dalam Pancasila, kita melihat bahwa Pancasila secara efektif merangkul nilai-nilai terpenting dari ketiga golongan yang berselisih. Nasionalisme dari golongan nasionalis, Ketuhanan dari golongan agama, dan keadilan sosial dari golongan sosialis/komunis. Sekaligus, Pancasila membuatantisipasi dari eksekse dari setiap golongan. Untuk mengobati "penyakit" nasionalisme, Pancasila memuat pula prinsip internasionalisme. Untuk mengobati "penyakit" demokrasi liberal Barat, Pancasila memuat pula keadilan sosial. Untuk mengobati "penyakit" sosialisme/komunisme, yakni ateisme, Pancasila memuat pula prinsip Ketuhanan. Dari tinjauan historis ini, kita bisa melihat dimensi imperatif Pancasila, mengapa Pancasila sangat tepat untuk menjadi dasar negara. Dengan efektif Pancasila mempersatukan berbagai golongan yang ada dengan mengambil nilai-nilai terbaik dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan mereka.

F. Formulasi Final Pancasila

Demikianlah upaya Jepang untuk memecah belah berbagai golongan politik di Indonesia gagal akibat adanya hasrat yang kuat untuk merdeka dan bersatu. Perselisihan pendapat yang cukup sengit dalam sidang BPUPKI, khususnya antara golongan nasionalis sekuler dan golongan agama, diredam oleh masing-masing pihak.

Di kalangan berbagai aliran, keinginan untuk bersatu selalu diutamakan. Karena itu pernyataan pemimpin Masjumi, Wachid Hasjim, bahwa "yang terutama kita perlukan pada waktu ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan", dalam hal ini tidak memerlukan komentar lebih lanjut. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa golongan Islam, bahkan pada saat nasib negara Islam – yang sejak berpuluh-puluh tahun merupakan cita-cita mereka – menjadi taruhan, mereka pada prinsipnya bersedia untuk berkompromi. Dan golongan nasionalis tidak membiarkan persoalan itu diputuskan melalui pemungutan suara, yang sebetulnya dapat mereka menangkan dengan mudah mengingat mereka jelas-jelas merupakan mayoritas dalam BPUPKI. Mereka pun mencari kompromi untuk menemukan suatu penyelesaian bersama dengan pergerakan Islam, yang akan memungkinkan setiap orang menyetujui negara Indonesia yang akan dibentuk itu (Dahm, 1987:363).

Untuk menindaklanjuti kesepakatan kedua golongan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dengan jumlah anggota yang sama besar dari golongan nasionalis dan golongan agama. Tanggal 22 Juni 1945, hasil kesepakatan mereka dituangkan dalam rumusan Piagam Jakarta yang dirancang untuk menjadi Pembukaan UUD Indonesia. Di dalam Piagam itu, Pancasila disusun dalam rumusan berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rupanya, rumusan Pancasila di atas menimbulkan gejolak lagi dalam sidang kedua BPUPKI di kalangan nasionalis dan perwakilan dari daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Mereka menuntut dihapuskannya tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Perdebatan berlangsung panas dan golongan nasionalis nyaris menderita kekalahan. Pada tanggal 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI mengesahkan sebuah Mukadimah yang memuat Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Selain itu, batang tubuh UUD 1945 memuat dua butir yang diharapkan golongan Islam, yakni kalimat "Negara berdasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam".

Sesudah mengesahkan mukadimah dan UUD itu, BPUPKI tidak pernah bersidang lagi karena tugasnya memang sudah selesai. Tindak lanjut dari segala hasil sidang BPUPKI dialihkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, perubahan politik di Perang Asia Raya terjadi begitu cepat, Jepang telah menyerah kalah kepada Sekutu. Oleh desakan para pemuda dan karena situasi telah matang, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk membicarakan UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Rapat terlambat dua jam dari jadwal semula karena Hatta sedang melakukan pendekatan kepada beberapa wakil Islam untuk mengubah beberapa butir rancangan Mukaddimah dan UUD hasil kerja BPUPKI. Begitu rapat dibuka dan Soekarno selesai memberikan pendahuluan, Hatta langsung menyodorkan usul empat perubahan terhadap naskah-naskah tersebut. Empat perubahan itu adalah:

1. Kata *Mukaddimah* diganti dengan kata *Pembukaan*
2. Sila pertama yang dalam Piagam Jakarta semula mencantumkan frase "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diperpendek menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menghilangkan ketujuh kata tersebut.
3. Pasal 6 yang semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diganti dengan "Presiden ialah orang Indonesia asli".
4. Pasal 28 yang semula berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (yang kemudian menjadi pasal 29).

Keempat perubahan yang menurut Hatta sudah disepakati dengan wakil-wakil Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan, disetujui oleh PPKI. Bagi Hatta sendiri, usul-usul itu dilakukan karena untuk menjaga agar Indonesia tidak terpecah belah karena adanya golongan-golongan kecil atau daerah-daerah tertentu yang menolak dasar negara dan UUD yang disusun BPUPKI. Menurut Hatta, gagasan untuk melakukan usul perubahan itu muncul setelah dia menerima tamu pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut Jepang yang diantar dan dijurubahasai oleh Nishijima, pembantu Admiral Maeda. Opsir itu mewakili angkatan laut (Kaigun)

memberitahu Hatta bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh Kaigun menyatakan sangat keberatan dengan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Mereka merasa rumusan itu bersifat diskriminatif bagi golongan agama minoritas, dan jika Piagam Jakarta tetap seperti itu mereka akan memilih berdiri di luar Republik. Pesan dari opsir itu sangat mempengaruhi sikap Hatta. Terbayang di benaknya, betapa sia-sia perjuangannya selama 25 tahun melalui penjara dan pengasingan untuk mencapai Indonesia Merdeka yang bersatu, jika akhirnya bangsa ini terpecah belah lagi. Tak dapat ia membayangkan apa jadinya jika daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera akan jatuh kembali ke tangan penjajah Belanda. Hatta bertekad untuk berupaya agar perpecahan itu tidak terjadi dan perbedaan-perbedaan pendapat harus diselesaikan. Motivasi itu yang mendorongnya untuk melobi utusan-utusan kaum Islam nasionalis, dan ternyata ia berhasil.

Demikianlah PPKI mengesahkan rumusan final Pancasila yang tercantum sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah seperti yang kita kenal sekarang ini:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Walaupun tak bisa dipungkiri sebagian wakil golongan Islam yang pernah menjadi anggota BPUPKI kecewa terhadap PPKI yang mengubah hasil kerja mereka, dari sudut keabsahan atau kekuatan yuridisnya UUD 1945 hasil PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu merupakan keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan kompetensi dan wewenang PPKI (Mahfud, 2001:45-51).

II. CONTOH-CONTOH

1. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat terlihat dari banyaknya bahasa daerah. Satu kata dalam satu bahasa daerah bisa punya arti berbeda dengan kata berbunyi sama (homofon) dalam bahasa daerah lain. Misalnya, kata *gedhang* dalam bahasa Jawa berarti "pisang", sedangkan dalam bahasa Sunda berarti "pepaya"; *atos* dalam bahasa Jawa berarti "keras", dalam bahasa Sunda berarti "sudah".
2. Pengalaman menderita dan senang bersama menimbulkan persatuan juga dirasakan oleh mahasiswa saat menempuh Orientasi Siswa dan Pengenalan Kampus (OSPEK).
3. Dominannya tiga kekuatan nasionalis, Islam, dan sosialis/komunis di kalangan rakyat Indonesia dapat dilihat dari hasil Pemilu 1955. Partai Nasional Indonesia (nasionalis), Masyumi (Islam), Nahdlatul Ulama (Islam), PKI (komunis), dan Partai Sosialis Indonesia (sosialis) secara urut menduduki peringkat lima besar dalam perolehan suara terbanyak.

III. LATIHAN

1. Perbedaan-perbedaan apakah yang terdapat antara fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara?
2. Bagaimana kecocokan antara teori Ernest Renan tentang bangsa dengan pengalaman terbentuknya identitas bangsa Indonesia?
3. Nilai-nilai apakah dalam sejarah Indonesia kuno yang melatarbelakangi Pancasila?
4. Mengapa Pancasila bersifat imperatif bagi bangsa Indonesia?
5. Mengapa tujuh kata dalam sila pertama versi Piagam Jakarta akhirnya dihapuskan dari rumusan akhir Pancasila?

IV. KUNCI JAWABAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan sebab dan dampak karakter majemuk dalam bangsa Indonesia!
2. Bagaimana proses terbentuknya identitas bangsa Indonesia?
3. Jelaskan latar belakang historis-politik lahirnya Pancasila!
4. Pancasila bersifat imperatif bagi eksistensi bangsa Indonesia, apa maksudnya?
5. Bagaimana proses formulasi final Pancasila?

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Lahirnya Pancasila merupakan suatu kebutuhan sosial, historis, dan politik yang mendasari terbentuknya identitas bangsa Indonesia secara final. Pancasila sangat tepat menjadi dasar negara Republik Indonesia karena mengandung nilai-nilai yang melekat pada kepribadian rakyat Indonesia dan mampu menjawab tantangan historis-politik selama proses perumusan identitas negara, khususnya memperdamakan dan menjembatani kubu-kubu ideologis yang dominan dalam pergerakan politik Indonesia. Itu sebabnya Pancasila disebut memiliki dimensi imperatif bagi bangsa Indonesia.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 2001, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*, alih bahasa oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Anshory, Irfan, 2004, "Asal Usul Nama Indonesia", dalam koran Pikiran Rakyat online, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/16/0802.htm>
- Christiani, Ellen, 2002, *Sukarnoisme dalam Tinjauan Filsafat Politik*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dahm, B., 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, alih bahasa oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Departemen Penerangan RI (Deppen), 2003, *12 Kali Tepuk Tangan di BPUPKI* (cetak ulang naskah "Lahirnya Pancasila"), Blitar: Panitia Silaturahmi Kebangsaan 2003.
- Lombard, Denys, 2005, *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian I*, alih bahasa oleh Winarsih Pataningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf, Jakarta: Gramedia Jakarta Utama, Forum Jakarta Paris, dan École française d'Extrême-Orient.
- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Renan, Ernest. "What is a Nation?" dalam Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, ed. 1996. *Becoming National: A Reader*. New York dan Oxford: Oxford University Press, 1996: pp. 41-55.
- Ricklefs, M.C., 1981, *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahasa oleh Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Simbolon, Parakitri, 1995, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas.

IX. SENARAI

Majemuk: sifat beragamnya masyarakat, terdiri dari banyak unsur.

Imperatif: sifat tak terelakkan, harus atau musti, tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Formulasi: proses menyusun suatu materi hingga mencapai bentuk (form) tertentu.

Sosio-nasionalisme: konsep Soekarno tentang perpaduan antara nilai peri kebangsaan (nasionalisme) dan peri kemanusiaan (internasionalisme).

Sosio-demokrasi: konsep Soekarno tentang perpaduan antara nilai demokrasi dan keadilan sosial.



PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila sebagai Sistem Filsafat" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem filsafat Pancasila, konsep dasar dan landasan filsafat Pancasila.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa agar mampu mengidentifikasi, menerangkan dan menganalisa Pancasila sebagai sistem filsafat. Mahasiswa mampu menjelaskan secara cermat berbagai aliran dalam filsafat sehingga mengetahui di mana posisi Pancasila sebagai sistem filsafat.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerangkan peranan pokok Pancasila bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa sistem pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian filsafat dan sistem filsafat;
- menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat;
- menjelaskan sistem filsafat Pancasila;
- menyebutkan dan menerangkan konsep dasar dan landasan filsafat Pancasila.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan : Pancasila sebagai Sistem Filsafat.

A. Pengertian Filsafat

Kata filsafat sering dijumpai atau didengar dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat dalam pengertian umum sering diartikan sebagai suatu pandangan hidup, prinsip hidup, atau suatu tata nilai. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan pandangan dasar tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Filsafat dalam arti prinsip hidup lebih sempit pengertiannya dibanding dengan pandangan hidup. Prinsip hidup itu mengacu kepada bidang tertentu ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan atau prinsip dasar dalam menghadapi suatu permasalahan dalam bidang tertentu.

Filsafat berasal dari bahasa Yunani *philein* yang berarti "cinta" dan *sophia* yang berarti "kebijaksanaan". Filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti keinginan atau hasrat yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran sejati. Filsafat sebagai tata nilai lebih mengacu kepada suatu produk sekelompok masyarakat, misalnya filsafat Jawa, filsafat Minang, dan lain-lain. Filsafat dalam pengertian khusus adalah sebagai ilmu. Filsafat sebagai suatu ilmu sering dianggap rumit, abstrak, dan teoritis, bahkan mengada-ngada. Filsafat sebagai ilmu sebenarnya muncul dari adanya keheranan terhadap sesuatu atau keragu-raguan terhadap kebenaran yang diyakini. Lewat perenungan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar dan keinginan untuk menyibaknya.

Manusia dalam kehidupan pribadi maupun hidup bersama setiap hari selalu menghadapi masalah. Problematika ini ada yang bersifat ringan yang melintas begitu saja dalam pikiran, tetapi ada problem yang mendasar yang menyangkut eksistensi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia lain maupun dengan alam. Permasalahan yang mendasar inilah yang membutuhkan perenungan untuk menjawab dan menyelesaikannya. Filsafat sangat dekat dengan manusia. Filsafat selalu berurusan dengan manusia yang sudah dalam perjalanannya (Peursen, 1983:3). Filsafat tidak hanya teori tetapi juga praktek, tidak hanya abstrak, tetapi nyata tentang manusia. Filsafat juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya manusia, keluarga, masyarakat, negara, sosial, ekonomi, politik hukum, baik buruk, benar salah dan sebagainya (Sunoto, 1987:3). Dalam pengertian sebagai ilmu filsafat adalah suatu ilmu yang membahas atau menyelidiki objek kajiannya secara mendalam sampai diperoleh esensi (hakikat) untuk memperoleh kebenaran. Filsafat sebagai ilmu memiliki beberapa cabang pokok:

1. **Epistomika** membahas tentang hal-hal di balik segala sesuatu yang fisis, yang meliputi bidang: ontologi (tentang yang ada atau Being), kosmologi (tentang alam) dan antropologi (tentang manusia).
2. **Epistemologi** membahas tentang hakikat pengetahuan, berkaitan dengan kebenaran pengetahuan, sumber pengetahuan, teori kebenaran, dan sifat kebenaran pengetahuan.
3. **Metodologi** berkaitan dengan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan.
4. **Logika** terkait dengan penalaran atau pengujian validitas suatu pernyataan.
5. **Aksiologi** berkaitan dengan masalah nilai, yang meliputi: etika (nilai baik-buruk), estetika berkaitan dengan nilai keindahan (indah-jelek).

Selanjutnya muncul cabang-cabang filsafat baru karena adanya perkembangan persoalan-persoalan yang dibahas seperti, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat, filsafat agama, filsafat bahasa, dan filsafat ilmu.

Adapun ciri-ciri pemikiran filsafati adalah sebagai berikut:

1. **Kritis**, yaitu mempertanyakan terus-menerus segala sesuatu baik itu tentang problem-problem yang dihadapi ataupun tentang kebenaran yang diyakini.
2. **Radikal**, dari kata *radix* yang berarti akar. Berpikir secara radikal berarti berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya, tidak hanya pada gejala atau fenomena yang tampak saja, tetapi sampai pada inti permasalahan.
3. **Runtut**. Berpikir secara kefilsafatan bukan merupakan suatu pemikiran yang acak, kacau dan fragmentaris atau terpotong-potong. Pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konseptual yang runtut (koheren).
4. **Rasional**. Bagan pemikiran kefilsafatan harus rasional, yaitu dijelaskan secara logis, bukan berdasarkan pada kekuatan yang lain, argumentasi yang disampaikan harus bersifat rasional.
5. **Spekulatif**, pernyataan-pernyataan atau kebenaran dalam filsafat itu hanya merupakan asumsi atau dugaan-dugaan sementara, jadi bukan konklusi. Jawaban-jawaban yang diberikan dalam filsafat selalu menimbulkan pertanyaan baru yang tidak pernah berhenti.
1. **Komprehensif** (menyeluruh), filsafat dalam memikirkan objek kajiannya memperhatikan segala aspek yang berhubungan. Filsafat tidak membahas secara parsial (satu sisi) dari objek kajiannya. Pembahasan secara parsial (satu sudut pandang ini merupakan tugas dari ilmu-ilmu khusus.
2. **Sistematis**, berarti pemikiran kefilsafatan akan menghasilkan suatu pemikiran yang sistematis. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, di mana bagian-bagian tersebut saling memperkuat untuk mendukung asumsi dasar pemikirannya.
3. **Mendasar**, yaitu yang dipikirkan dalam filsafat adalah masalah-masalah mendasar yang menyangkut eksistensi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, alam dan Tuhan.

B. Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Apakah Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat? Ini adalah suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Pancasila memang tidak bisa dibandingkan dengan sistem filsafat Hegel, John Locke atau Karl Marx yang mempunyai ajaran secara rinci dalam berbagai bidang, misalnya pengetahuan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebanyakan para filsuf dalam pemikirannya memang berusaha menghasilkan suatu sistem filsafat, yang dalam perkembangannya sistem filsafat ini dianut, diyakini benar, dijadikan landasan dan tujuan oleh sekelompok masyarakat (ideologi).

Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara berarti bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara memang hanya memuat ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja, sedangkan ajaran-ajaran lain (sistem ekonomi, politik dan sebagainya bisa diderivasikan dari prinsip dasar tersebut). Derivasi dari prinsip dasar tersebut tertuang dalam empat pokok pikiran

yang terjabar dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pemikiran yang mendalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dilakukan dengan bertitik tolak dari ajaran dasar Pancasila atau landasan ontologis Pancasila, yaitu dari konsep tentang manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar lnti-mutlak dari tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, menghadapi sesama, dan menghadapi Tuhan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan berdasarkan pada nilai keTuhannan, dan kemanusiaan dalam wadah negara persatuan Indonesia, dengan sistem (cara kerakyatan/demokrasi) untuk mewujudkan keadilan sosial.

Ditinjau dari ciri-ciri pemikiran filsafat, Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh dan sistematis, tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Muh. Yamin dalam bukunya Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dikutip Sunoto menjelaskan dan membandingkan Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Soediman Kartodiprojo menegaskan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Pendapat ini senada dengan pendapat Driyarkara, Notonagoro, serta Roeslan Abdulgani yang membenarkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka telah dipikirkan secara mendalam bertahun-tahun lamanya. Pancasila bukan hasil pikiran yang spontan timbul pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945. Apa yang dirumuskan Bung Karno telah memenuhi syarat berpikir kefilsafatan melakukan deskripsi, berpikir kritis, evaluasi dan abstraksi (Sunoto, 1987:47-55).

C. Sistem Filsafat Pancasila

Sebelum dibahas lebih jauh tentang sistem filsafat Pancasila, berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu tentang pengertian sistem. Banyak sekali definisi tentang sistem dari berbagai kalangan, namun dalam tulisan ini dikemukakan satu definisi yang sering menjadi rujukan. Sistem menurut Shore dan Voich adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu

Keseluruhan dari bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Satu kesatuan dari bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4. Bagian-bagian tersebut mempunyai satu tujuan tertentu
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Kaelan, 1996:48)

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu:

1. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis

Pancasila terdiri dari lima sila merupakan satu kesatuan, bukan kumpulan dari lima prinsip yang boleh dilepaskan satu dengan yang lain. Lima sila Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Pancasila yang terdiri dari beberapa unsur merupakan suatu susunan majemuk tunggal, yang artinya

terdiri dari beberapa unsur tetapi merupakan satu kesatuan. Suatu dasar negara harus merupakan satu kesatuan dari keseluruhan bagian-bagian yang menyiratkan suatu sistem. Suatu dasar filsafat negara atau suatu sistem filsafat boleh terdiri atas beberapa bagian atau unsur, tetapi bagian-bagian itu harus tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Ke lima sila itu secara bersama-sama menyusun suatu hal yang baru yang utuh. Setiap sila merupakan bagian yang mutlak tidak terpisahkan. Penghilangan salah satu bagian saja akan menghilangkan arti dari makna Pancasila sebagaimana seperti yang diharapkan para pendiri bangsa. Satu bagian atau sila yang dikeluarkan dari rangkaian Pancasila, akan mempunyai makna yang berbeda dengan makna ketika dalam rangkaian Pancasila. Lima unsur Pancasila juga terdapat di tempat lain, seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan sebagainya, tetapi jika bagian-bagian tadi lepas dari Pancasila maka akan mempunyai arti yang berbeda. Sila ke dua kemanusiaan dari Pancasila berbeda maknanya dengan kemanusiaan secara umum, juga berbeda dengan kemanusiaan atau prinsip humanisme Barat, serta kemanusiaan sosialisme. Lima sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang bersifat organis. Setiap sila berhubungan atau mengandung sila yang lain, misalnya sila Ketuhanan yang Maha Esa, adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian juga sila kemanusiaan yang Adil dan beradab, adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, demikian juga dengan sila-sila yang lain.

2. Rumusan susunan Pancasila yang hirarkis piramidal

Susunan Pancasila adalah *hirarkis* dan mempunyai bentuk *piramidal* (Notonagoro, tt:31-32) Dilihat dari inti-isinya, urutan lima Pancasila menunjukkan suatu rangkaian urutan dalam luas pengertian (kuantitas) dan isi pengertian (kualitas) yang berjenjang. Sila yang berada dibelakang, merupakan pengkhususnya dari pada sila-sila di mukanya. Susunan hirarkhis piramidal, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Setiap sila dijiwai dan diliputi sila dimukanya, serta menjiwai dan meliputi sila-sila di belakangnya:

- i. Sila I meliputi dan menjiwai Sila II, III, IV dan V.
- ii. Sila II dijiwai dan diliputi sila I, menjiwai sila III, IV dan V.
- iii. Sila III dijiwai dan diliputi sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V.
- iv. Sila IV dijiwai dan diliputi sila I, II dan III, menjiwai sila V.
- v. Sila V dijiwai dan diliputi sila I, II, III dan IV.

Rumusan Pancasila jika dilihat dari luas pengertian (kuantitas) berbanding terbalik dengan isi pengertian (kualitas). Sila yang lebih awal lebih luas pengertiannya dibandingkan sila di belakangnya, tetapi isi pengertian sila lebih sempit (sedikit) dibandingkan dengan sila di belakangnya atau sesudahnya,

D. Konsep Dasar Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia. Manusia mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Hakikat manusia adalah sebagai mahluk

monopluralis (majemuk tunggal) (Notonagoro, 1983:94-95). Manusia terdiri dari beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan:

1. Monodualis susunan kodrat manusia yang terdiri dari;
 - a. Jiwa yang tersusun atas tiga sumber daya:
 - akal berkaitan dengan logika
 - rasa berkaitan dengan estetika
 - kehendak berkaitan dengan etika
 - b. Raga yang terdiri dari gejala-gejala
 - benda mati: berciri fisis dan kimiawi
 - benda hidup (vegetatif): cirinya tumbuh, berkembang, memperbanyak diri, dan mati
 - animal (hewan): cirinya bergerak, berkehendak, mempunyai nafsuJiwa dan raga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jiwa tanpa raga bukan manusia, dan raga tanpa jiwa juga bukan manusia.
2. Sifat kodrat manusia sebagai:
 - a. makhluk individu
 - b. makhluk sosial
3. Kedudukan kodrat manusia sebagai:
 - a. makhluk mandiri dan,
 - b. makhluk Tuhan

Sementara banyak tesis-tesis lain tentang manusia dari berbagai tokoh. Aristoteles menyatakan hakikat manusia adalah *animal rationale*, *zoon politicon*, *animal sociale*. Manusia adalah homo faber (Karl Marx), *animal symbolicum* (Ernest Cassirer), *homo viator*, *homo ludens* dan sebagainya.

Manusia sebagai subjek dan objek dalam filsafat Pancasila tidak berarti bahwa manusia bisa hidup sendiri. Eksistensi manusia tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan Tuhan dan lingkungan (sosial dan alam), di mana manusia mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya dan terhadap Tuhan dalam keseimbangan yang harmonis. Tuhan adalah sebagai pencipta dan yang lain adalah ciptaan alam (*cosmos*). Manusia adalah alam kecil (*micro cosmos*) dan alam adalah alam besar (*macro cosmos*). Manusia hidup diciptakan oleh Tuhan menempati suatu ruang (*macro cosmos*). Alam bukan hanya tempat untuk hidup, namun juga menyediakan keperluan manusia untuk mengembangkan diri memenuhi kewajibannya terhadap diri sendiri, sesamanya dan Tuhan. Eksistensi manusia di alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Manusia harus bersikap adil, tidak hanya kepada diri sendiri, sesama, maupun Tuhan, tetapi juga terhadap alam. Alam menyediakan keperluan manusia, dan manusia memanfaatkannya, memeliharanya, menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Memperlakukan alam (*macro cosmos*) dengan tidak adil atau semena-mena pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri, karena manusia merupakan (berada) bagian dari alam besar itu sendiri.

E. Landasan Filsafat Pancasila

Secara filosofis Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai landasan, yaitu: landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

a. Landasan Ontologis Pancasila

Ontologi merupakan cabang tertua dari filsafat yang membicarakan tentang hakikat kenyataan yang ada (being), beberapa permasalahan ontologi adalah sebagai berikut:

- Dari segi kuantitas yang mempermasalahkan banyaknya susunan kenyataan:
 - **Monisme** : aliran yang berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu ini adalah tunggal. Dalam monisme ada dua kubu yang bersebelahan: **Idealisme** yang berpendapat kenyataan terdalam dari segala sesuatu adalah tunggal yang berupa jiwa atau ruh, bukan materi; dan **Materialisme**, berpendapat bahwa kenyataan terdalam dari segala sesuatu adalah materi. Kedua kubu ini mempunyai perbedaan yang mendasar dalam memahami hidup dan kehidupan, termasuk juga dalam pendirian tentang manusia dan Tuhan karena perbedaan landasan ontologi yang menyangganya, termasuk dalam kebenaran ilmu. Masalah ontologi ini bukan didasarkan atas pertimbangan akal salah-benar, tetapi merupakan suatu pilihan.
 - **Dualisme** : berpendirian bahwa kenyataan dari segala sesuatu terdiri dari dua unsur yang berdiri sendiri. Tokoh-tokoh aliran ini adalah: Plato yang membedakan antara dunia kini (maya) dan dunia lain (dunia idea); Rene Descartes yang membedakan antara pemikiran (*res cogitan*) dan keluasan (*res extansa*), atau jiwa dan tubuh; Immanuel Kant yang membedakan antara dunia *noumena* (dunia yang sesungguhnya) dan *fenoumena* (dunia gejala/penampakan). Dunia kini *das Ding fur mich* dan *das Ding an Sich* dunia lain (nyata).
 - **Pluralisme** : berpendapat bahwa hakikat dari kenyataan ini terdiri dari beberapa unsur. Tokoh aliran ini antara lain Empedokles dan Anaxagoras.
- Dari segi kualitas yang memandang hakikat segala sesuatu dari segi sifat:
 - **Spiritualisme** : memandang kenyataan segala sesuatu adalah roh, tokoh aliran ini Plato, Leibniz.
 - **Materialisme** : berpendirian bahwa kenyataan terdalam dari sesuatu adalah materi, tokohnya adalah Demokritos (atomisme), Thomas Hobbes, LaMarx.
- Dari segi proses yang mempersoalkan proses terjadinya segala sesuatu
 - **Mekanisme** : berpendirian bahwa segala sesuatu ini ada terjadi secara mekanistik. Semua peristiwa alam semesta terjadi dan berjalan begitu saja seperti mesin dengan hukumnya sendiri-sendiri.
 - **Teori kreasi** : berpendapat bahwa terjadinya segala sesuatu ini diciptakan dengan tujuan tertentu (teleologis).
 - **Vitalisme** : beranggapan bahwa adanya segala sesuatu ini karena adanya asas hidup yang menjadi kunci kehidupan segala sesuatu, oleh Henry Bergson disebut *elan vital*.

Dari penjelasan tentang masalah ontologi ini dan dengan melihat konsep dasar filsafat Pancasila, menjadi sangat jelas gambaran tentang landasan atau pandangan ontologi filsafat Pancasila. Pancasila mengajarkan bahwa segala sesuatu ini mempunyai hakikat atau esensi. Ditinjau dari segi kuantitas Pancasila beranggapan bahwa hakikat segala sesuatu adalah jamak (majemuk). Segala sesuatu terdiri dari beberapa unsur, bukan satu atau dua saja. Unsur-unsur yang

beragam ini merupakan satu kesatuan (tunggal), sehingga hakikat segala sesuatu dari segi kuantitas adalah monopluralis. Dari segi kualitas atau sifat terdalem segala sesuatu, Pancasila berpandangan bahwa baik materi maupun roh itu sama-sama penting. Materi diakui ada dan roh pun juga diakui keberadaannya.

Cabang ontologi juga membicarakan tentang masalah Tuhan. Dalam kaitannya dengan penciptaan alam semesta ada beberapa teori, di antaranya:

- Teori kreasi, menyatakan bahwa terjadinya alam semesta ini atau adanya segala sesuatu ini karena diciptakan oleh Tuhan.
- Teori emanasi, menyatakan bahwa terjadinya alam semesta, karena limpahan dari Tuhan. Tuhan berperan dalam segala ciptaanNya. Dalam kemahakuasaanNya akan menampakan perannya dalam segala peristiwa dan segala sesuatu.

b. Dasar epistemologis

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan hakikat pengetahuan. Masalah pokok dalam epistemologi adalah persoalan :

- Sumber pengetahuan, dalam masalah ini muncul beberapa aliran:
 - **Rasionalisme** : beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah akal. Kebenaran dapat diperoleh dengan menggunakan akal. Sifat kebenaran adalah pasti, tetap, dan mutlak.
 - **Empirisme** : berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah indera. Kebenaran pengetahuan dapat diperoleh melalui indera.
 - **Kritisisme** : aliran yang menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Sumber pengetahuan akal dan indera. Manusia memerlukan panca indera untuk menangkap suatu objek, yang kemudian diolah oleh akal. Kritisisme berusaha menemukan kebenaran yang kukuh, merupakan gabungan dari kedua unsur dalam dua aliran tersebut.
 - **Intuisionisme** : berpandangan bahwa lewat intuisi dapat diperoleh pengetahuan yang benar.
 - **Thomisme** : beranggapan bahwa kebenaran sejati itu adalah kebenaran dari Tuhan, yaitu berupa wahyu yang diturunkan kepada manusia
- Sifat pengetahuan, dalam hal ini muncul beberapa aliran:
 - **Absolutisme** : beranggapan bahwa kebenaran pengetahuan itu bersifat universal, tetap, mutlak, pasti. Pendirian ini dilatarbelakangi filsafat rasionalisme yang menghasilkan kebenaran ilmu-ilmu eksak seperti matematika.
 - **Relativisme** : kebenaran itu bersifat relatif tidak mutlak, bisa berubah karena perkembangan waktu. Kebenaran pengetahuan tidak bersifat pasti (teori ketidak pastian/*indeterminacy*) dari Heisenberg, yang ada adalah kebenaran dengan tingkat probabilitas yang tinggi.
 - **Perspektivisme** : kebenaran itu tidak tunggal karena selalu ada sudut pandang subjek terhadap objek. Setiap subjek mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri, sehingga ada banyak kebenaran yang semuanya bisa benar.
- Teori kebenaran, yang memunculkan beberapa teori:

- **Teori kebenaran korespondensi** : berpandangan bahwa kebenaran adalah jika ada kesesuaian antara apa yang dipikirkan (teori) dengan kenyataan empiris (fakta/data)
- **Teori kebenaran koherensi** : berpandangan bahwa kebenaran adalah keruntutan/kesesuaian atau konsistensi di dalam pernyataan-pernyataan atau konsep yang disusunnya.
- **Pragmatisme** : berpendirian bahwa tolok ukur kebenaran adalah kegunaan atau manfaatnya bagi manusia.
- **Konsensus** : menyatakan bahwa kebenaran itu adalah suatu pernyataan yang disepakati benar oleh sekelompok orang.

Landasan epistemologi Pancasila dapat diturunkan dari pandangan tentang manusia. Sumber pengetahuan dalam Pancasila tidak hanya akal, tetapi juga indera; karena manusia terdiri dari jiwa dan raga. Pancasila juga mengakui kebenaran yang datangnya dari Tuhan, yaitu lewat wahyu. Sifat kebenaran pengetahuan manusia adalah relatif sedangkan sifat kebenaran Tuhan adalah mutlak. Kebenaran dari Tuhan itu mutlak, namun ketika manusia berusaha menangkap kebenaran atau dalam membuat penafsiran kebenaran Tuhan tersebut tidak bersifat mutlak lagi, karena manusia mempunyai sifat terbatas.

Keempat teori kebenaran di atas dapat dijadikan landasan epistemologi Pancasila. Pancasila diangkat dari kenyataan/kebenaran yang ada di lapangan (kebenaran korespondensi). Pancasila diambil dari pandangan hidup yang berkembang di masyarakat Indonesia (fakta), kemudian dipikirkan secara mendalam, cermat dan kritis oleh Soekarno dkk. dan dirumuskan dalam suatu prinsip-prinsip dasar (teori), sehingga ada kesesuaian antara fakta dan teori. Prinsip-prinsip dasar itu disusun secara sistematis, di mana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berhubungan secara runtut dan konsisten (kebenaran Koherensi). Tidak ada pertentangan di dalamnya karena satu prinsip itu sudah mengandung empat prinsip yang lain. Pancasila juga mempunyai kebenaran pragmatis. Sejak ditetapkannya UUD 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya tercantum Pancasila, maka Pancasila secara nyata mempunyai manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa, tetapi juga sebagai dasar negara.

c. Landasan Aksiologis

Aksiologi berasal dari kata *axios* yang berarti nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan masalah nilai. Nilai adalah suatu kualitas yang melekat pada sesuatu hal sehingga sesuatu hal tersebut bermakna. Ada beberapa teori tentang masalah nilai ini, tetapi dalam tulisan ini akan diangkat pendapat yang langsung berhubungan dengan Pancasila yaitu dari Notonagoro yang membagi nilai menjadi tiga (Kaelan, 2000:176): (1) **Nilai material**, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia; (2) **Nilai vital**, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas; (3) **Nilai kerohanian**, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang terdiri dari empat hal:

- Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (logika)
- Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa (estetika)

- Nilai kebaikan atau moral, yang bersumber pada kehendak (etika)
- Nilai religius yang bersumber dari keyakinan.

Berdasarkan pandangan dasar tentang manusia, bagi Pancasila yang mengandung nilai bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja, tetapi sesuatu yang bersifat non material. Nilai non material bersifat lebih langgeng daripada nilai material. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai rohaniyah yang mengakui nilai material dan nilai vital. Hati nurani dengan dibantu indera dan jiwa manusia yaitu cipta rasa dan karsa serta keyakinan dipergunakan sebagai alat ukur dalam menilai hal-hal yang bersifat rohaniyah (Kaelan, 2000: 169).

II. CONTOH-CONTOH

1. Contoh-contoh sistem filsafat: Sistem filsafat Marx, Sistem filsafat Hegel, sistem filsafat Immanuel Kant.
2. Contoh-contoh aliran ontologis (kuantitas): monisme, dualisme, pluralisme.
3. Contoh aliran ontologis (Kualitas): materialisme, spiritualisme.
4. Contoh aliran ontologis (Proses): mekanisme, teleologis, vitalisme.
5. Contoh aliran epistemologis: empirisme, rasionalisme, kritisisme.
6. Contoh konsep dasar filsafat: manusia sebagai monopluralis, *Homo faber*, *animal rationale*, *animal sociale*, *homo ludens*, dll.

III. LATIHAN

1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang filsafat!
2. Sebutkan dan terangkan ciri-ciri berpikir berpikir kefilosofan?
3. Jelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat!
4. Terangkan landasan filsafat Pancasila!
5. Jelaskan konsep dasar filsafat Pancasila!

IV. KUNCI JAWABAN LATIHAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat!
2. Jelaskan antara konsep dasar filsafat Pancasila dalam hubungannya dengan ajaran filsafat Pancasila!
3. Jelaskan manfaat dari mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat!

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih

di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Pancasila memenuhi syarat sebagaimana sebuah sistem filsafat. Filsafat Pancasila adalah suatu filsafat yang didasarkan atas ajaran lima sila dalam Pancasila. Filsafat Pancasila berpangkal tolak dari ajaran tentang manusia sebagai makhluk monopluralis. Landasan dan ajaran dasar filsafat Pancasila diderivasikan atau diturunkan dari ajaran manusia sebagai makhluk monopluralis.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Nocr MS. 1997, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Liberty.
Kaelan, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty.
_____, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
_____, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
Peursen, C. A. Van, 1983, *Orientasi di Alam Filsafat*, Jakarta : Gramedia.
Notonagoro, tanpa tahun, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
_____, 1983, *Pancasila Ilmiah Populer*, Jakarta : Bina Aksara.
Sunoto, 1987, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Logika, Metafisika dan Etika*.
Tim Dosen UNDIP, 2001, *Pancasila di Era Reformasi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

IX. SENARAI

Filsafat: ilmu yang mempelajari segala sesuatu sampai sedalam-dalamnya sehingga ditemukan hakikat atau intisarinya.

Ontologi: cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada (being).

Epistemologi : cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan.

Aksiologi: bidang yang membicarakan masalah nilai.

Monopluralis: konsep dasar filsafat Pancasila tentang manusia.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila sebagai Sistem Etika Politik" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: pengertian etika, ruang lingkup etika, etika sebagai cabang filsafat praktis, kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami, menerangkan dan menganalisa konsep Pancasila sebagai sistem etika, serta mampu memberikan uraian makna etika dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini mahasiswa dapat menerangkan peranan Pancasila sebagai sistem etika dan menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian etika;
- menjelaskan ruang lingkup etika;
- menjelaskan etika sebagai cabang filsafat praktis;
- menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika;
- menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila sebagai Sistem Etika.

A. Pengertian Etika

Istilah 'Etika' memiliki pengertian umum yaitu filsafat moral yang membicarakan tentang baik buruk manusia terutama ditinjau dari perilaku/tingkah lakunya. Menurut Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja dalam bukunya *Filsafat Pancasila* Jilid II mendefinisikan etika dari definisi nominalis dan definisi realis. Ditinjau dari definisi nominalis istilah 'Etika' berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang berarti kebiasaan, perilaku, kelakuan. Jadi dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu

pengetahuan tentang perilaku manusia, sedangkan bila ditinjau dari definisi realis etika adalah filsafat tentang perbuatan manusia menuju ke Tuhan sebagai tujuan terakhir.

Dalam kamus Bahasa Indonesia etika memiliki arti yang beragam yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

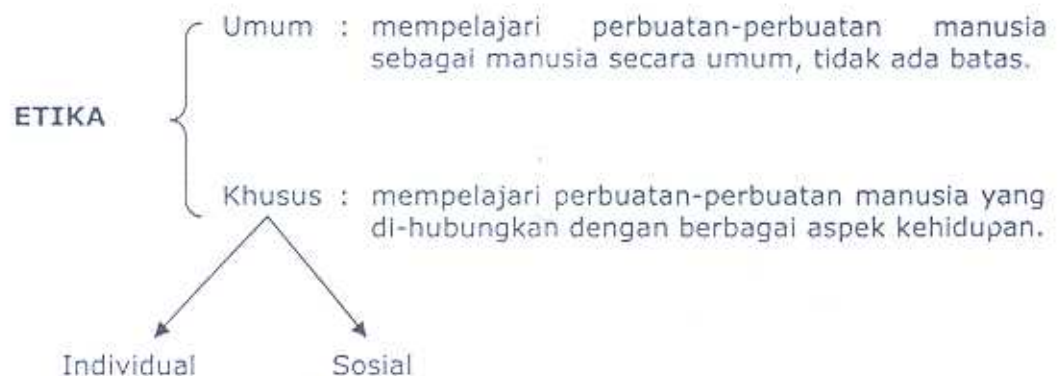
Pengertian etika yang beragam pada dasarnya memiliki satu konsep makna yaitu ilmu tentang perilaku/moral manusia yang berhubungan dengan baik/buruk, lebih sering orang menyebut etika lebih sering dengan istilah moral.

Jika etika berhubungan dengan moralitas maka istilah 'Etika' dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya yaitu Etika deskriptif, Etika normatif dan meta etika (Bertens, 2002:15).

- a. Etika Deskriptif yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Uraianya dilakukan dengan melalui gambaran-gambaran untuk menjelaskan nilai baik-buruk, susila tidak susila, dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial.
- b. Etika Normatif yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima, tentang apa yang harus dilakukan, berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Etika tidak hanya melukiskan tapi juga berusaha melibatkan diri dalam penilaian. Etika ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku serta keharusan yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Meta etika yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika.

B. Ruang Lingkup Etika

Etika dalam hubungannya dengan perbuatan dan perilaku manusia dapat dibagi yaitu (Setiardja, 2004:7)



Etika khusus individual adalah mencakup kewajiban-kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Etika khusus sosial adalah mencakup kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesama manusia.

C. Etika Sebagai Cabang Filsafat Praktis

Kedudukan etika dalam filsafat adalah etika merupakan salah satu cabang filsafat praktis di samping logika dan estetika. Logika sebagai cabang filsafat praktis yang membahas tentang 'berpikir' atau azas-azas pemikiran, sedangkan estetika adalah filsafat praktis yang membahas tentang 'keindahan'. Seperti yang sudah dijelaskan etika merupakan filsafat moral.

Dikatakan sebagai filsafat praktis karena cabang filsafat ini mengkaji bukan hanya teori tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang tidak bisa dilepaskan dalam perilaku baik-buruk sebagai bagian dari moral manusia. Dalam setiap hidupnya manusia selalu berhubungan dengan moralitas. Hal ini yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia memiliki kesadaran moral dengan dilengkapi cipta, rasa, dan karsa, sedangkan hewan hanya mengenal lingkungan dengan menggunakan instingnya. Manusia bisa menentukan apa yang harus dilakukan sedangkan hewan tidak. Hal itu pula yang melatar belakangi adanya etika dan filsafat moral dalam hidup manusia.

Mengkaji etika maupun estetika tidak bisa lepas dari masalah nilai. Nilai baik dan buruk yang selalu melekat pada tindakan manusia. Nilai sebagai sesuatu yang berharga yang juga tidak bisa terlepas dari norma dan moral. Norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ketiganya (Nilai, Norma dan Moral) memiliki hubungan yang erat dalam pelaksanaan hidup manusia.

Etika adalah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma atau dari sudut baik buruk. Etika sebagai salah satu bagian dari filsafat mempelajari tingkah laku manusia secara kritis, metodis dan sistematis, sebagai cabang filsafat etika tidak merupakan ilmu empiris karena ilmu empiris hanya membatasi pada observasi terhadap fakta hasilnya juga, berupa fakta. Filsafat tidak hanya sebatas fakta saja akan tetapi juga melampaui hal-hal dibalik fakta yang konkret beserta seluruh gejala-gejala yang muncul dalam fakta tersebut. Filsafat tidak membatasi diri dengan pengalaman inderawi. Etika tidak berhenti pada hal yang konkret, untuk kemudian menunjukkan tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Sebagai cabang filsafat, etika menganalisa berbagai aspek selain perilaku manusia misalnya, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma dan lain-lain. Sering orang memandang sebelah mata dengan istilah filsafat, tapi secara tidak sengaja manusia mempraktekkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari termasuk etika yang merupakan salah satu cabang filsafat. Etika banyak berhubungan dengan seluruh kehidupan manusia, dan itu membuktikan bahwa etika sebagai ilmu yang penting untuk kita pelajari.

D. Kedudukan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila yang memiliki fungsi sebagai dasar negara merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan. Pancasila dijabarkan dalam norma hukum dan norma moral. Norma hukum tertuang dalam beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar hukum nasional. Pancasila dipakai sebagai landasan bagi aturan-aturan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma

moral merupakan aturan-aturan di dalam masyarakat yang merupakan adat, kebiasaan, sopan santun dll. Hal ini berhubungan dengan fungsi Pancasila sebagai sistem etika.

Pancasila dapat di sebut moral bangsa Indonesia dalam arti bahwa Pancasila meliputi apa yang di sebut dalam bahasa Inggris *Public Morality* (Setiardja, 2004:41) Moral Pancasila memiliki peran sebagai pedoman tingkah laku bangsa Indonesia, berlaku untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Prof. Driyarkara, Pancasila berakar pada kodrat manusia, sehingga dengan menganalisa kodrat manusia kita akan sampai pada Pancasila. Dari kodrat manusia dapat disimpulkan kelima sila itu sebagai norma agama, sebagai pedoman untuk berbuat dan bertingkah laku (Setiardja, 2004:41). Hal tersebut semakin menguatkan pernyataan bahwa Pancasila merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan kita berperilaku. Kodrat manusia sebagai makhluk yang monopluralis (kedudukan kodrat, sifat kodrat, dan susunan kodrat), senantiasa harus dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai norma dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan, sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu serta susunan kodrat sebagai makhluk jasmani dan rohani, ketiga-tiganya harus senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat. Keharmonisan, keserasian dan keseimbangan bertindak akan membawa perilaku kita ke arah yang lebih baik.

E. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai suatu sistem, keseluruhan susunan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu sama lain, masing-masing saling berkaitan dan tidak saling meniadakan. Pancasila sebagai suatu sistem etika karena nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara keseluruhan merupakan satu kesatuan. Nilai yang satu merupakan bagian mutlak dari yang lain.

Kesatuan sistem nilai Pancasila bersifat hirarkis piramidal. Masing-masing nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda akan tetapi saling menjiwai dan dijiwai. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh demikian juga makna yang terkandung di dalamnya. Nilai sila pertama menjiwai nilai sila lainnya dan masing-masing sila saling mengkuallifikasikan dengan sila yang lain.

Masing-masing sila Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki bobot nilai tertinggi dibanding dengan sila yang lainnya. Hal ini karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius. Sedangkan nilai-nilai dari sila-sila yang di bawahnya merupakan nilai manusiawi yang artinya nilai manusia-manusia. Walaupun demikian antar sila-sila tersebut juga memiliki tata urutan yang demikian karena bobot nilai dari masing-masing sila juga berbeda-beda. Nilai kemanusiaan memiliki bobot yang lebih tinggi di banding dengan sila-sila yang di bawahnya, dan seterusnya.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun. Nilai digali dari budaya bangsa Indonesia artinya apa yang sudah ada sekarang

merupakan warisan dari nenek moyang kita, berarti Pancasila adalah milik bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas dibanding dengan bangsa lain.

Nilai etika dalam Pancasila bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya mengandung makna bahwa negara kita adalah negara yang monoteisme artinya bangsa Indonesia harus memeluk salah satu agama/aliran kepercayaan yang diyakininya dan dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Negara melindungi kehidupan bangsa Indonesia dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

2. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang monopluralis yaitu manusia yang memiliki susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat. Manusia sebagai makhluk jiwa-raga, sosial-individu dan pribadi - Tuhan Yang Maha Esa. Perpaduan tersebut harus berjalan harmonis untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik. Konsekuensi dari nilai kemanusiaan ini seluruh bangsa Indonesia haruslah menjunjung tinggi nilai tersebut tanpa meninggalkan sila-sila yang lain.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Sila ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi/golongan. Nilai persatuan banyak mengandung implikasi bagi bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan perbedaan yang ada menjadi suatu persatuan dan kesatuan.

4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan menjadi ciri khas bagi Pancasila. Nilai kerakyatan ini diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, terutama dalam kehidupan politik. Kehidupan politik yang berlandaskan kerakyatan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi/golongan. Bukan berdasar egoisme dan individu tetapi berdasarkan kepentingan bersama.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan yang dimaksud dalam sila ini adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan. Hal ini berarti rakyat berkewajiban untuk mengadakan keadilan. Keadilan akan terwujud apabila seluruh masyarakat berperan serta dan terlihat di dalamnya untuk bersama-sama menciptakan keadilan.

Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi pedoman dan landasan kehidupan politik di Indonesia. Etika berpolitik sangat penting dilakukan mengingat langkah dan tindakan tanpa dilandasi etika tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini karena

etika berkaitan dengan nilai, norma dan moral. Moral para penyelenggara negara akan menjadi lebih baik bila menaati seluruh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat maupun negara. Pancasila merupakan landasan untuk berpolitik bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya begitu luhur dan mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal ini akan memudahkan bangsa Indonesia untuk melaksanakan, karena nilai-nilai Pancasila diambil dari bangsa sendiri.

Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap bangsa. Etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah politik dan kenegaraan dapat dijalankan secara objektif. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Prinsip etika politik yang menjadi acuan orientasi moral bagi suatu negara adanya cita-cita untuk mewujudkan suatu tatanan yang baik bagi negara, partisipasi masyarakat yang demokratis, hak asasi manusia dan lain-lain merupakan bagian dari etika politik.

Besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang seharusnya disertai tanggung jawab bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Hal ini berarti apapun yang dilakukan oleh para penyelenggara negara/pemegang kekuasaan harus disertai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam etika politik, sikap penguasa ikut terbawa dalam masyarakat, artinya masyarakat merasakan dan melihat bagaimana sikap dan perilaku penguasanya.

Sikap penguasa akan tampak dalam cara ia menjalankan pemerintahannya. Bila sikap pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat, akan lebih memudahkan rakyat ikut berpartisipasi terlibat dalam pembangunan negara. Artinya rakyat bukan hanya melihat akan tetapi ikut merasa berkewajiban terlibat di dalamnya.

Berbagai tindakan para elite politik secara tidak langsung maupun langsung menjadi teladan bagi rakyat. Rakyat akan menjadi acuh tak acuh jika melihat berbagai pelanggaran yang dilakukan para penyelenggara negara dibiarkan saja. Apalagi hukum seakan-akan memihak kepada penguasa dan yang memiliki harta. Hal yang demikian akan mengakibatkan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Etika politik bangsa Indonesia seharusnya mendasarkan diri pada Pancasila sebagai dasar negara.

1. Etika politik yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perilaku para penyelenggara negara seharusnya didasarkan pada rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap tugasnya bukan hanya menjadi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada dunia tetapi dalam kehidupan nanti.

2. Etika politik yang berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Rasa tanggung jawab terhadap tugasnya hanya diperuntukkan pada masyarakat. Artinya, tugas yang disandangnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi/golongan.

3. Etika politik yang berdasarkan Persatuan Indonesia

Artinya perilaku para penyelenggara negara hanya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bukan perpecahan mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan dan perbedaan itu dimunculkan untuk mewujudkan persatuan.

4. Etika politik yang berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi yang menjadi inti dari perkembangan sila ini. Demokrasi yang dilaksanakan dengan baik akan menjadikan kehidupan politik di Indonesia akan lebih baik pula.

5. Etika politik yang Berkeadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Tindakan dan perilaku dari para penyelenggara negara harus bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Artinya semua lapisan masyarakat ikut menikmati keadilan itu. Penguasa tidak memihak satu masyarakat tertentu. Semua diperlakukan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak menjamin bahwa hak-hak politik warga negara telah dilaksanakan. Beberapa kasus dapat kita lihat, seperti korupsi, pelanggaran pemilihan umum, politik uang dalam merebut jabatan, dan lain sebagainya hanya dapat dirasakan, tetapi sangatlah sulit untuk dibuktikan secara hukum sehingga terjadi bermacam-macam ketidakadilan. Semua pelanggaran dan kejahatan ini sangat sulit diberantas melalui jalur hukum, kecuali hanya etika berpolitik yang berasaskan nilai-nilai Pancasila yang betul-betul ada keinginan dari setiap warga negara sebagai insan politik mau mengamalkan dalam kehidupan riil dalam masyarakat.

Etika politik lebih banyak bergerak dalam wilayah, di mana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku tanpa adanya rasa takut kepada sanksi daripada hukum yang berlaku. Banyak pengamatan yang dapat dilihat bahwa kerusakan kronis dalam seluruh sistem berbangsa dan bernegara pada masa awal reformasi di mana suatu pandangan jabatan yang diduduki sekadar bermakna kekuasaan untuk meraih kepentingan, berupa status, politik dan uang.

Pada hakikatnya etika politik diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Dalam uraian etika politik dan pemerintah dinyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

F. Penutup

Etika politik yang berlandaskan Pancasila pada prinsipnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan kehidupan para elite politik akan menjadi lebih baik dalam arti, dalam menjalankan tugasnya selalu dilandasi dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila. Selama ini bangsa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk alangkah baiknya apabila landasan berpolitik, berbangsa dan bernegara kita kembalikan lagi pada dasar awal yaitu Pancasila. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa sendiri sebenarnya membantu memudahkan kita dalam melaksanakannya Pancasila sebagai etika politik sangat tepat apabila dapat dilaksanakan dengan benar. Hal ini akan menjadikan kondisi bangsa Indonesia akan lebih baik.

II. CONTOH-CONTOH

1. Seluruh tindakan manusia dalam pergaulan sehari-hari misalnya, membantu orang lain, menghargai sesama, toleransi.
2. Penyelenggaraan negara yang sesuai dengan etika politik harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
3. Setiap warga negara menempatkan hakikat kodratnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

III. LATIHAN-LATIHAN

1. Apakah negara Indonesia menjalankan pemerintahannya sesuai dengan etika politik yang dianjurkan?
2. Mengapa harus Pancasila yang digunakan sebagai sumber etika?
3. Sebutkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma dan moral Pancasila!

IV. KUNCI JAWABAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian Etika!
2. Apa yang dimaksud Etika Umum dan Etika Khusus? Jelaskan!
3. Jelaskan tentang ruang lingkup etika!
4. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai Sistem Etika!
5. Jelaskan makna nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan suatu Sistem Etika!

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Etika adalah filsafat moral yang membahas tentang baik dan buruk. Etika merupakan cabang filsafat praktis yang berhubungan dengan nilai, yaitu nilai baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan tatanan moral yang harus kita sepakat dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., 2002, *Etika*, Jakarta: Gramedia.
Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
Magnis-Suseno, Frans, 2003, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
Sehiardjo, Gunawan, 2004, *Filsafat Pancasila II*, Semarang.
Suprpto, Anggoro, 1998, *Jatuhnya Suharto*, Yayasan Indonesia.
Sunoto, 1982, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Hanindita.
Wibisono, Kunto, Prof, Dr. *Etika Politik Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila*, makalah Seminar FKDP 2002.

IX. SENARAI

- Moral:** (ajaran tentang) baik buku yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila.
Kajian filsafat: kajian tentang hakikat segala sesuatu yang bersifat komprehensif, mendasar, dan spekulatif.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila sebagai Ideologi Nasional" membahas beberapa sub pokok bahasan sebagai berikut: pengertian umum, pengertian ideologi, perbandingan berbagai ideologi, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan tentang ideologi dan beberapa ideologi besar yang ada di dunia kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi kekurangan dan kelebihan ideologi-ideologi lain dalam suatu studi banding dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menerangkan tentang peranan pokok Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai ideologi terbuka, serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan ideologi-ideologi yang lain.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian ideologi;
- menyebutkan dan menerangkan berbagai ideologi besar di dunia;
- menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila sebagai Ideologi Nasional.

A. Pengertian Umum

Bangsa Indonesia hidup di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Setiap bangsa atau negara mempunyai suatu pegangan yang merupakan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan, sebagai pembatas, pengatur dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh sekelompok masyarakat dan selaligus merupakan cita-cita yang hendak dicapai dan bagi bangsa dan negara sering disebut tujuan nasional. Setiap bangsa dan negara mempunyai ideologi yang selaligus merupakan identitas dan jati dirinya.

Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia sudah merupakan suatu kesepakatan politik atau keputusan final yang mempunyai kekuatan hukum dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara Pancasila diangkat atau diambil dari pandangan hidup yang sudah lama berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan yang pokok bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai : (1) pandangan hidup bangsa; (2) Ideologi negara; (3) dasar negara.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup atau *way of life* dan *weltanschauung*, pandangan dunia, pedoman hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dan arah bagi semua aktifitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan aktifitas setiap, manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai *weltanschauung* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat organis (Kaelan, 1987:22).

Pedoman hidup ini meliputi setiap manusia Indonesia baik bagi para penyelenggara pemerintahan dan negara maupun masyarakat pada umumnya. Pandangan hidup bangsa ini sebagai kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak bangsa sudah lama mengendap berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia mengajarkan suatu pandangan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika terdapat keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial dalam hubungan dengan lingkungan (masyarakat dan alam), dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dan dalam pemenuhan kebahagiaan lahir dan batin.

Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau seperangkat prinsip pengarah yang secara yuridis-formal dan harafiah telah dirumuskan dalam bagian akhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai Ideologi negara telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang menetapkannya sebagai dasar negara. Pola Pelaksanaan Pancasila sebagai Ideologi Negara terpancar dalam keempat pokok pikiran yang koheren, komprehensif dan mendalam yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian Pancasila merupakan "Manifesto Ideologi" bagi keberadaan bangsa Indonesia dalam bernegara.

Pancasila bukan sekedar kesepakatan politik, melainkan hasil perenungan yang mendalam yang mengandung konsensus transenden untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sikap serta pandangan dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakan bersama. Pancasila bukan lagi sebagai alternatif, melainkan suatu Imperatif, sebagai sistem ideologi yang diyakini kebenarannya dan harus ditaati bersama (Bakry, 1990:37-38).

Dalam segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan Pancasila harus digunakan sebagai landasan titik tolak, sebagai batasan atau rambu-rambu, dan sekaligus sebagai arah dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya berkembang tidaknya ideologi ini tergantung dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Dituntut adanya loyalitas dan komitmen yang kuat terutama para penyelenggara pemerintahan dan negara untuk secara maksimal berusaha mewujudkan cita-cita bersama dalam rangka terwujudnya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat untuk kian memegang teguh Pancasila sebagai ideologi.

Kelima prinsip dasar ini karena merupakan dasar bagi berdirinya negara maka Pancasila sering disebut sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, atau *staatidee* (lihat Notonagoro dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan nilai dalam mengatur pemerintahan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kalimat "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... [rumusan Pancasila]" Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dalam segala bidang terutama dalam semua peraturan perundang-undangan harus dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.

Sebagai dasar negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan, atau cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral hukum negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
- b. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang dasar 1945
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- d. Merupakan sumber semangat dalam penyelenggaraan negara baik yang duduk di lembaga eksekutif (pelaksanaan pemerintahan), yudikatif, maupun legislatif (termasuk penyelenggara partai maupun golongan fungsional yang lain (Kaelan, 2000:198-199).

Implikasi dari Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek politik yaitu adanya *good will* (kehendak baik) dari pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber acuan dalam menetapkan kebijakan (*policy*) maupun membuat keputusan. Hukum merupakan perangkat untuk mengatur sistem, sedangkan penyelenggara negara atau pemerintahan adalah pelaksana sistem. Keputusan dan kebijakan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan menjaga persatuan, mengedepankan kepentingan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial. Kebijakan dan keputusan ini tidak hanya menyangkut masalah di dalam negeri: misalnya masalah kenaikan BBM, subsidi, pajak, tetapi juga ketika mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa masalah itu seperti pengadaan listrik dengan pihak swasta, eksplorasi kekayaan alam oleh negara atau perusahaan asing, perjanjian dengan GAM, atau

bebas, kebebasan mendirikan partai. *Dalam bidang ekonomi* liberalisme menganut sistem persaingan bebas, hak milik pribadi sepenuhnya diakui, pajak merupakan pembatas kepemilikan individu, negara hanya sebagai pengawas dan fasilitator dalam perekonomian. *Dalam bidang sosial-kemanusiaan*, liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu, mengakui hak asasi manusia, kebebasan dalam media masa dan komunikasi. *Dalam bidang agama*, liberalisme menganut sekulerisme yaitu pemisahan antara urusan negara dan agama. Negara tidak turut campur dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan perkembangan agama. Masalah agama diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

c. Ideologi Komunisme/Sosialisme

Ideologi liberalisme dengan sistem ekonomi kapitalisme mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat walaupun tidak merata. Efek dari kapitalisme menyebabkan munculnya suatu gerakan kolonialisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalisme (kuno) dengan persaingan bebas banyak perusahaan tumbuh besar dengan cepat. Buruh hanya dianggap sebagai alat produksi dengan upah minin yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari. Laba perusahaan disimpan atau untuk ekspansi perusahaan. Buruh memproduksi barang yang ia sendiri tidak mampu membelinya. Pengusaha makin kaya, tetapi buruh makin miskin. Negara tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur perekonomian. Pada akhirnya pemilik modal tidak hanya menguasai perekonomian, tetapi juga menguasai kehidupan politik. Rakyat/buruh semakin tertindas.

Paham sosialisme muncul sebagai reaksi atas praktek liberalisme/kapitalisme. Sosialisme berusaha memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama, membebaskan penderitaan dari praktek kapitalisme. Sosialisme menawarkan suatu sistem ekonomi dimana negara mengatur perekonomian sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Komunisme dan sosialisme pada awalnya mempunyai arti yang sama, namun dalam perkembangannya komunisme merupakan wujud dari sosialisme radikal. Dalam komunisme hanya ada satu partai, dan kepemilikan pribadi sama sekali tidak diakui.

Komunisme sebagai ideologi bersumber dari ajaran Karl Marx yaitu *Materialisme dialektis* dan *Materialisme historis*. Dua buku yang menjadi pedoman adalah *Das Kapital* dan *Manifesto Komunis*. Tujuan dari komunisme adalah menciptakan masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas yang sama rata dan sama rasa. *Dalam bidang politik* komunisme tidak memberikan kebebasan, hanya menganut satu partai, sistem pemerintahan diktator proletar (Demokrasi Kerakyatan), pergantian pemimpin dengan sistem pengkaderan. *Dalam bidang ekonomi*, pemerintah menguasai secara mutlak, tidak ada persaingan dan pasar bebas, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada milik pribadi, semua kekayaan milik negara. *Dalam bidang sosial*, rakyat harus mendukung sepenuhnya pemerintah, tidak mengakui kebebasan individu, tidak ada kebebasan bagi media masa dan pers, tidak mengakui hak asasi manusia. *Dalam bidang agama*: tidak mengakui adanya Tuhan, tidak memberikan tempat berkembangnya agama.

d. Fasisme

Ideologi fasisme muncul sebagai reaksi terhadap Ideologi liberalisme dan komunisme. Dua Ideologi ini dianggap tidak mungkin mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kejayaan negara. Fasisme berasal dari bahasa Itali "*fascio*" yang diambil dari bahasa latin *Fasces* yang artinya selkat batang kayu. Dalam budaya Romawi kuno dipergunakan sebagai simbol kekuatan dari ikatan berbagai unsur yang menyatu (Purcel, 2000:ix).

Fasisme muncul dari kekecewaan dan ketidaksabaran rakyat terhadap pemerintah yang lemah dan tidak mampu mengatasi krisis dan kekacauan politik maupun ekonomi. Rakyat yang putus asa mengharapkan munculnya pemimpin atau pemerintahan yang tegas, otoriter dan disiplin militer. Fasisme adalah suatu pemerintahan militer yang bertujuan untuk membentuk negara maju berdasarkan superioritas atas negara-negara lain, mewujudkan bangsa yang mandiri yang tidak tergantung pada bangsa lain. Dalam bidang *politik*, pemerintahan bersifat diktator, tidak ada kebebasan, menjamin kepentingan negara mutlak dengan menggunakan kebohongan, propaganda dan kekerasan. Dalam bidang *ekonomi*, menerapkan etatisme dimana negara merupakan penguasa mutlak perekonomian, semua kegiatan ekonomi harus diabdikan untuk kepentingan negara. Dalam bidang *sosial*, tidak mengakui hak asasi manusia, tidak ada kebebasan dalam segala bidang. Munculnya fasisme juga berkaitan dengan kerinduan terhadap kejayaan dan perjuangan di masa lampau yang ingin dibangkitkan kembali, atau karena tekanan dan penderitaan yang hebat yang menimbulkan sentimen nasionalisme. Di Jepang munculnya fasisme diilhami oleh tradisi samurai, di Itali diilhami semangat negara Sparta yang tangguh di Jerman, karena kejayaan dan ketangguhan bangsa Jerman (lihat Hugh Purcel dalam *People and Politic Facism*, 2000:x-xiii)

e. Pancasila

Ideologi Pancasila terbentuk melewati jalan panjang perjuangan bangsa Indonesia, sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Ideologi Pancasila mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan spiritual dan material dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suhadi, 1998:103). Dalam bidang *politik* Pancasila mengajarkan demokrasi: kedaulatan ada di tangan rakyat lewat MPR, ada kebebasan dalam mendirikan partai, sistem pemerintahan presidensial. Bidang *ekonomi* menjamin kebebasan individu dengan memberikan kesempatan kepada sektor swasta, hak milik individu diakui kebebasan memilih pekerjaan, pemerintah berperan dan bertanggung jawab terhadap perekonomian nasional. Sektor-sektor yang penting dikuasai oleh negara. Di bidang *sosial*, Pancasila mengakui hak asasi manusia, adanya persamaan bagi seluruh warga negara. Dalam bidang *agama*, Pancasila menganut paham negara Teistik, negara mengakui adanya Tuhan, tetapi bukan negara agama. Negara bertanggung jawab terhadap pembinaan dan perkembangan kehidupan beragama. Adanya kebebasan beragama, karena tidak ada agama negara.

C. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Ideologi seperti organisme yang tumbuh berkembang, bisa menyusut atau mati. Agar bangsa Indonesia tetap eksis di dunia, ideologi Pancasila harus bersifat dinamis, senantiasa berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ideologi yang dinamis bersifat terbuka, yakni dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan senantiasa mengalami dinamika internal. Adapun ciri ideologi terbuka adalah:

- a. Bersifat realis, yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimana ideologi tersebut berkembang. Ideologi yang realis merupakan kenyataan pola hidup masyarakat itu sendiri.
- b. Bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberi harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.
- c. Bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan sekaligus mampu memberi arah, melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan.
- d. Seimbang dan harmonis

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga nilai: (1) *nilai dasar* yang bersifat tetap sepanjang masa seperti asas, cita-cita dan tujuan; (2) *nilai instrumental* yang penerapan dan pengembangannya dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman, antara lain berupa arahan, kebijakan, strategi sasaran dan pelaksanaan; (3) *nilai praksis* yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan pada nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Sifat dinamis dan inovatif ideologi Pancasila memungkinkan bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya (jati diri bangsa).

Usia Pancasila sebagai sebuah ideologi masih tergolong muda jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, fasisme. Namun, Pancasila sebagai sebuah ideologi terbukti mampu bertahan di tengah persaingan ideologi-ideologi besar dunia. Dalam keterpurukan bangsa dan krisis multidimensional yang berkepanjangan, keunggulan dan kemampuan Pancasila membuat ideologi ini tetap eksis. Keunggulan atau kelebihan itu adalah pada dasar ajaran Pancasila yang tidak hanya menekankan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Kedua sifat kodrat ini disatukan secara sinergis. Pancasila tidak berada pada ekstrim kiri yang beranggapan manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan dasar dari komunisme/sosialisme, atau berada pada ekstrim kanan yang mengajarkan manusia sebagai individu yang merupakan dasar ideologi liberalisme. Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila mempunyai keuntungan bisa dekat dengan liberalisme maupun komunisme sesuai dengan tuntutan dan perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Sejarah membuktikan dengan runtuhnya negara komunis terbesar di dunia negara-negara lain yang menganut paham itu pun banyak yang runtuh, demikian, juga suatu saat jika perkembangan ideologi liberalisme mencapai titik jenuh dan

mulia surut, maka negara-negara yang menganut sistem tersebut tentu juga akan ikut hancur. Posisi Pancasila yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrim tersebut merupakan posisi aman. Yang kedua, Pancasila bukan merupakan ajaran atau doktrin yang diciptakan dari atas (teori) ke bawah (praktek), tetapi disusun oleh para pendiri negara dari tata nilai yang ada di tengah-masyarakat Indonesia yang sangat beragam baik suku, agama, ras dan golongan, sehingga Pancasila merupakan wadah bagi keberagaman Indonesia. Pancasila merupakan pemersatu Kebhinekaan bangsa. Sebagai wadah berarti Pancasila harus mampu memberikan tempat bagi keberagaman untuk berkembang dan sekaligus melindungi dan memberikan rasa aman dalam keberagaman ini. Sebagai wadah pemersatu bangsa dalam sejarah telah menunjukkan bukti keampuhannya. Adanya pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi selalu mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh komponen bangsa yang lain yang menyadari bahwa Pancasila merupakan wadah yang paling tepat untuk dapat hidup bersama dalam segala perbedaan. Ideologi Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa.

II. CONTOH-CONTOH

1. Contoh-contoh pandangan hidup: pandangan hidup Jawa, pandangan hidup masyarakat Sunda, pandangan hidup Minang.
2. Contoh ideologi tertutup: fasisme, komunisme
3. Ideologi terbuka: Pancasila, liberalisme
4. Penerapan Ideologi Liberalisme : Amerika Serikat, Inggris, Australia
5. Penerapan ideologi komunisme: Uni Sovyet (sekarang Rusia), Cina, Cuba
6. Penerapan Ideologi Fasisme : Jerman masa Hitler (Nazi), Itali di bawah Musolini, Jepang (Kaisar Hirohito), Spanyol pasca perang saudara

III. LATIHAN

1. Jelaskan pengertian tentang Ideologi!
2. Jelaskan ajaran dasar Ideologi Liberalisme!
3. Jelaskan ajaran ideologi komunisme!
4. Jelaskan perbedaan antara ideologi komunisme dengan sosialisme!
5. Jelaskan tentang ideologi fasisme!

IV. KUNCI JAWABAN LATIHAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian ideologi dan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka!
2. Sebutkan beberapa ideologi yang anda ketahui, terangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi!
3. Apa manfaat dari mempelajari perbandingan ideologi!

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Ideologi Pancasila merupakan suatu perangkat prinsip pengarah yang berdasarkan Pancasila. Ideologi Pancasila disusun atau diangkat dari pandangan hidup bangsa. Setiap ideologi mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan ideologi Pancasila, maka Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mau mengantisipasi perubahan, baik dari dalam maupun dari luar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, Henry D., 2002, *The Age of Ideology*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Brzezinski, Zbigniew, 1990, *The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Magnis-Suseno, Franz, 1999, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia, Jakarta.
- Mannheim, Karl, 1991, *Ideology and Utopia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Notonagoro, tt, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pajturan Tuduh, Jakarta
- _____, 1983, *Pancasila Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta
- Purcell, Hugh, 2000, *People and Politics Fascism*, INSIST, Yogyakarta.

IX. SENARAI

Liberalisme : Ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu.

Komunisme : Ideologi yang mendasarkan diri pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam hidup bersama.

Fasisme : Ideologi yang menganut pemerintahan militer totaliter, disiplin tinggi yang ingin mewujudkan negara yang maju dan mandiri

Ideologi Pancasila : ideologi yang berdasarkan Pancasila yang mendasarkan diri dari ajaran manusia yang terdiri dari beberapa unsur.



PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: pengertian Indonesia sebagai negara bangsa, dan ruang lingkup hukum tata negara, kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila dalam UUD 1945, dinamika implementasi UUD 1945, gerakan reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945, perubahan-perubahan UUD 1945 hasil amandemen.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menguraikan bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam perangkat hukum tatanegara, khususnya UUD 1945; bagaimana dinamika penafsiran terhadap isi UUD 1945 dalam praktek bernegara sejak 1945 sampai kini, serta latar belakang dan hasil amandemen terhadap UUD 1945 pasca gerakan Reformasi tahun 1998.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerangkan kedudukan Pancasila dalam sistem dan praktek ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai kini.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
- menjelaskan ide-ide dasar pengelolaan negara dalam Pancasila dan manifestasinya dalam UUD 1945;
- membandingkan berbagai penafsiran terhadap demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa ke masa;
- menjelaskan kaitan antara gerakan Reformasi dan pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945;
- menyimpulkan perubahan-perubahan mendasar yang ada dalam UUD 1945 pasca amandemen dibandingkan UUD 1945 sebelum amandemen.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara bangsa (*nation-state*), gabungan dari identitas rakyat Indonesia sebagai bangsa dan negara. Jika ditinjau dari teori substansi-forma, maka bangsa adalah substansi dari forma negara. Hal ini berarti, karakter bangsa Indonesialah yang menjadi penentu dari bentuk negara Indonesia.

Dalam pengelolaan (tata) negara, hukum menjadi elemen yang sangat penting. Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyelenggarakan urusan-urusan rakyat di suatu wilayah, dengan demikian negara berkepentingan untuk menciptakan ketertiban dan pemerintahan yang efektif. Untuk melaksanakan fungsi itu, negara harus menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak untuk menetapkan hukum yang ditaati oleh seluruh rakyat dalam wilayahnya. Kekuasaan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.

Dalam rangka itu, negara mempunyai dua tugas. *Pertama*, mengendalikan dan mengatur gugus-gugus kekuasaan di dalam wilayahnya sehingga tidak menjadi antagonisme (pertentangan satu sama lain) yang membahayakan. *Kedua*, mengelola dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan dalam wilayahnya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama seluruh masyarakat. Pengendalian negara terhadap siapa pun yang ada dalam wilayahnya dijalankan lewat sistem hukum dengan perantara pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya.

Pada umumnya, hukum berarti peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat dengan disertai sanksi yang bisa dipaksakan. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku lain, seperti norma agama, norma moral, atau norma kesopanan. Dengan adanya sanksi, hukum memiliki kekuasaan memaksa, dengan melibatkan kekuasaan negara.

Hukum diciptakan untuk mengatur dan menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat, baik hubungan antar individu, antara individu (*person*) dengan badan hukum (*rechtsperson*), atau antara badan hukum dengan badan hukum. Jika badan hukum itu berwujud negara, maka peraturan hukum yang mengatur hubungan dengan negara ini masuk ke dalam lingkup hukum tata negara. Apabila disederhanakan, hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya (Mahfud, 2001:64).

Hukum tata negara merupakan landasan pijak bagi suatu sistem ketatanegaraan. Sistem secara denotatif bermakna rangkaian dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling berhubungan dalam suatu fungsi bersama. Hal penataan negara adalah suatu sistem karena akan melibatkan jabatan-jabatan

organisasional yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Seperti didefinisikan oleh Logemann, hal-hal fundamental tentang negara yang diatur oleh hukum tata negara meliputi:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu negara;
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
3. Bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu;
4. Apa fungsi jabatan-jabatan itu;
5. Apa kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu;
6. Bagaimana hubungan masing-masing jabatan itu;
7. Sampai batas mana kekuasaan jabatan-jabatan itu (Mahfud, 2001:70)

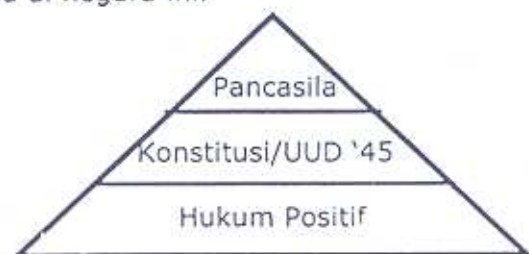
D. Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila memiliki fungsi yang spesifik bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa maupun negara. Terhadap bangsa, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Perwujudan dari pandangan hidup bangsa ini adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ideal dan tak terlihat (*intangible*). Sedangkan, Pancasila sebagai dasar negara akan mewujudkan diri dalam bentuk yang lebih konkret, yakni konstitusi, konvensi, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam negara Indonesia (hukum positif). Artinya, nilai-nilai Pancasila yang ideal dan tak terlihat harus dimanifestasikan dalam wujud peraturan-peraturan yang konkret dan operasional. Peran Pancasila sebagai *philosophische Grondslag* atau *Staatsidee* ini sangat penting sebab segala bentuk kegiatan dari negara haruslah bersumber darinya (Mahfud, 2001:3). Pancasila selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk yuridis formal sebagai fundamen dari seluruh hukum tata negara dan hukum positif Indonesia. Pancasila menjadi landasan segala kebijakan pemerintah dan alat-alat kelengkapan negara.

Penetapan suatu konstitusi sebagai landasan kebijakan negara diawali dari gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme memiliki asumsi bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat sewenang-wenang, sehingga harus dibatasi. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif adalah dengan membagi-bagi kekuasaan. Teori "trias politika" yang sangat terkenal dari Montesquieu membedakan kekuasaan ke dalam tiga kategori: legislatif (membuat peraturan), eksekutif (menjalankan peraturan), dan yudikatif (mengawasi jalannya peraturan). Konstitusionalisme mengamanatkan undang-undang dasar untuk berfungsi sebagai sarana membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindung (Budiardjo, 1995:96).

Para perintis negara ini sudah memulai upaya memanifestasikan nilai-nilai ideal Pancasila itu sejak awal dalam wujud konstitusi. Kelima asas Pancasila sengaja diletakkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan rumusan empat tujuan nasional untuk menjadi arahan yang tak tergoyahkan bagi pengelolaan negara Indonesia. UUD 1945 pada gilirannya akan menjadi induk dari segala peraturan perundang-undangan atau hukum positif (hukum yang berlaku) di Republik Indonesia. Oleh karena itu, tepat jika dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam istilah teknis hukum,

Pancasila adalah *ratio legis*, sumber nilai yang mendasari peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini.



Gb. 1. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum

Antara Pancasila, konstitusi, dan hukum positif terdapat hubungan yang hirarkis. Pancasila menjadi tertib hukum tertinggi. Artinya, Pancasila sebagai entitas ideal akan menjiwai konstitusi dan segala hukum positif. Kata "menjiwai" di sini berarti segala peraturan yang ada di bawah Pancasila harus menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam rumusannya dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Fungsi peraturan-peraturan tersebut adalah membuat apa yang abstrak dalam nilai itu menjadi konkret dan operasional. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menyebabkan Pembukaan UUD 1945 yang memuatnya bernilai sebagai pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), sementara UUD 1945 sendiri secara keseluruhan menjadi hukum dasar tertulis bagi negara Indonesia.

C. Perwujudan Nilai-nilai Dasar Pancasila dalam UUD 1945

Dalam setiap sila Pancasila terdapat nilai dasar yang menjadi landasan bagi penataan negara Indonesia. Kelima nilai dasar yang ada dalam Pancasila tersebut adalah: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Penjabaran dari kelima nilai tersebut pertama-tama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Negara Ketuhanan

Masalah posisi agama dalam negara sangat krusial dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Perdebatan terutama berpusat pada dua kubu ideologis yang terkuat di dalam pergerakan politik Indonesia, yakni kaum nasionalis dan kaum agamis. Benih-benih polemik tentang masalah tersebut sudah mulai muncul sejak tahun 1918, saat komite untuk kebangsaan Jawa (*Comite voor het Javanche Nasionalisme*) mengecam kalangan Sarekat Islam dengan menandakan bahwa politik dan agama haruslah dipisah, sedangkan pihak Sarekat Islam menolak dengan mengatakan bahwa mereka adalah Islam Nasionalis (Noer, 1986:186). Perdebatan terbuka yang pertama terjadi tahun 1940 antara Soekarno (wakil kelompok nasionalis) dengan Muhammad Natsir (wakil kelompok Islam) tentang "hubungan antara agama dan negara".

Perdebatan tentang masalah ini muncul lagi dalam sidang BPUPKI dan menyerap begitu banyak energi. Dalam sidang-sidang BPUPKI, perbincangan tentang berbagai masalah pokok yang harus diputuskan, seperti masalah bentuk dan batas negara, cenderung berjalan lancar, tetapi sekali persoalan dasar negara

disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat hangat (Ma'arif, 1985:103). Lagi-lagi persoalan peran agama dalam negara diperselisihkan. Pada awalnya kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis agama (Islam) sama-sama kukuh berpegang pada pendapat mereka masing-masing. Yang satu ingin urusan agama dipisahkan dari urusan negara, yang lain ingin negara didasarkan pada hukum-hukum agama.

Atas dasar semangat untuk menghindari perpecahan dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) UUD 1945 dengan Pembukaan yang mencantumkan Pancasila sebagai kaidah fundamental negara (*staatsfundamental norm*) dan hukum dasar tertulis Indonesia Merdeka. Secara resmi telah lahir negara Indonesia baru yang bukan negara agama seperti yang dimaksud dalam konsepsi Islam ortodoks, juga bukan negara sekuler yang memandang agama semata-mata masalah pribadi, melainkan negara Pancasila yang berketuhanan (Mahfud, 2001:51).

Konsep negara yang berketuhanan ini menciptakan keseimbangan antara paham negara (Islam) dan negara sekuler. Dicapainya konsep ini merupakan refleksi dari konsensus bersama yang mempertemukan cita-cita golongan Islam di satu pihak dengan golongan nasionalis di pihak lain untuk menegakkan negara Pancasila sebagai negara Tels Demokratis, dan oleh karena itu dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia (Bakry, 1987:39).

Perincian dari asas negara ketuhanan ini dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945. Inti dari pasal ini adalah negara menganggap penting nilai-nilai agama, terutama keyakinan kepada Tuhan YME, sebagai landasan moral pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Selain itu, negara juga menjamin bahwa setiap warga negara punya kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini juga berarti negara tidak akan membedakan status, hak, dan kewajiban warga negara atas dasar agama yang dianutnya.

2. Perlindungan HAM

Keseimbangan lain yang diupayakan Pancasila adalah antara nasionalisme dengan peri kemanusiaan. Rasa cinta akan bangsa dan kebanggaan nasional tidak semestinya diwujudkan secara agresif dengan menginvasi wilayah bangsa lain, apalagi sampai melakukan genosida terhadap sesama manusia seperti yang dilakukan gerakan fasis Jerman. Kesadaran terhadap harkat martabat manusia yang sejajar ini dituangkan dalam sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Wujud yang paling penting dari nilai kemanusiaan ini adalah perlindungan terhadap hak-hak manusia (*human rights*), khususnya hak-hak asasi manusia. Oleh karena sejak awal Indonesia menganut sistem konstitusional, perlindungan terhadap HAM ini menjadi salah satu hal terpenting yang harus diwujudkan dalam konstitusi. Sebab, esensi konstitusionalisme pada dasarnya ada dua, yaitu perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap HAM (Mahfud, 2001:131).

Pancasila. Pernyataan dan rumusan perlindungan terhadap HAM didapati
dalam UUD 1945, baik bagian Pembukaan maupun batang tubuhnya. Di dalam
Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala
rakyat. Setiap jenis penjajahan yang menghambat kemerdekaan harus
dihentikan. Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan dukungan
Indonesia terhadap perlindungan HAM. Selanjutnya, dalam alinea IV,
di rumuskan tujuan nasional, yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan ini
menuntut negara aktif dalam perlindungan HAM di dalam wilayah Indonesia sendiri
maupun keluar wilayah, di lingkup pergaulan antar bangsa. Ditambah lagi rumusan
Pancasila sendiri mengakui kebebasan beragama dan keadilan sosial.

Dalam batang tubuh UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen), terdapat
pasal-pasal yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, yakni:

1. Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
3. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (pasal 28)
4. Kebebasan beragama (pasal 29 ayat 2)
5. Hak mendapatkan pengajaran (pasal 31)

Rumusan HAM dalam UUD 1945 yang asli ini terlihat singkat dan kurang
terperinci. Sebabnya antara lain selama proses menyusun UUD 1945, terjadi
pertentangan antara kubu yang menghendaki masuknya rumusan tentang HAM
secara terperinci dalam konstitusi dengan pihak yang menolak. Di dalam risalah
sidang BPUPKI terbaca ada dua pihak yang berbeda pendapat secara tajam tentang
ini, yaitu Soekarno dan Soepomo pada satu pihak dengan Hatta dan Yamin pada
pihak lain. Soekarno dan Soepomo tidak setuju pasal-pasal HAM masuk di dalam
UUD karena dikuatirkan akan merusak konsep "gotong-royong" dengan
individualisme Barat. Menurut mereka negara gotong royong meniadakan garis
antara pemerintah dan rakyat, semuanya satu keluarga. Hatta dan Yamin
mengusulkan pasal-pasal HAM dirinci agar rakyat berani menyatakan pendapatnya
dan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang. Perincian HAM dalam konstitusi
diperlukan untuk menghindari terjadinya absolutisme kekuasaan (Mahfud,
2001:139).

Kekuatiran Hatta dan Yamin kemudian terbukti dalam praktek perlindungan
negara yang minim terhadap HAM, bahkan pemerintah juga ikut menindas HAM.
Oleh karena itu, pada masa pasca gerakan Reformasi tahun 1998, ada dorongan
untuk membaharui politik hukum tentang HAM dengan mengelaborasi pengaturan
HAM dalam konstitusi. Hal ini akan kita bahas pada sub bab berikutnya.

3. Negara Kesatuan

Salah satu fungsi dari UUD adalah mencatat pembagian kekuasaan di dalam
suatu negara. Jika ditelaah lebih lanjut, pembagian kekuasaan itu dibagi dua cara,
yakni vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kekuasaan dibagi berdasarkan
tingkatan pemerintahan. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menurut fungsinya,
yakni fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara

vertikal akan memperlihatkan apakah sebuah negara itu berbentuk negara kesatuan, negara federal, atau konfederasi.

Para pendiri negara Indonesia sangat menganggap penting nilai persatuan, sebagaimana tercermin dalam sila ketiga "Persatuan Indonesia", sehingga bentuk negara yang dipilih adalah negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara dengan wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kedaulatan ke dalam maupun ke luar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian, kedaulatan dan kekuasaan pemerintah pusat tidak terbagi dan tidak dibatasi. Kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri tidak berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kesimpulannya, dua ciri mutlak negara kesatuan adalah: (1) adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat; (2) tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Dengan demikian, bagi warga negaranya dalam negara kesatuan itu, hanya terasa ada satu pemerintah saja. Jika dibandingkan dengan federasi atau konfederasi, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang ikatan serta integrasinya paling kokoh (Budiardjo, 1995:141).

Asas negara kesatuan secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam pasal 1. Ayat (1) berbunyi, "negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Ayat (2) berbunyi, "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Struktur dan fungsi MPR ini akan berubah pada beberapa aspek pasca amandemen UUD 1945, akan tetapi secara prinsip Indonesia tetap dalam bentuk negara kesatuan.

4. Demokrasi Pancasila

Sila IV Pancasila menuntut adanya "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Rumusan ini secara sederhana oleh Soekarno diringkas dalam istilah "demokrasi".

Tidak dapat disangkal bahwa Negara Republik Indonesia memang didesain untuk menjadi negara berasas demokrasi. Syarat-syarat sebagai negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas dalam UUD 1945. *Pertama*, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, tercantum dalam pasal 1. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan secara horizontal ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika dibandingkan dengan berbagai tipe demokrasi modern, Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasi dengan sistem presidensiil, yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representatif (Mahfud, 2001:84). *Ketiga*, adanya ketegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum ini sangat penting bagi demokrasi untuk menghindarkan rakyat dari kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan negara. Dengan supremasi hukum, segala tindakan pemegang kekuasaan negara dibatasi dan dikendalikan oleh hukum, tidak boleh sewenang-wenang.

Dalam kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949), tercatat terjadinya perubahan di dalam praktek kenegaraan dari sistem kuasi presidensiil menjadi parlementer. Kabinet kuasi presidensiil hanya berjalan selama dua bulan. Perubahan dalam praktek ini dilakukan tanpa mengubah UUD 1945, melainkan didasarkan kepada Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tanggal 14 November 1945, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Pusat sebelum DPR dan MPR dibentuk. Wewenang Komite ini diperluas, yakni ikut menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), padahal seharusnya menurut pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 Komite hanya bertugas menjadi pembantu Presiden dalam penyusunan GBHN.
- b. Perubahan sistem kuasi presidensiil menjadi parlementer dengan pemindahan kekuasaan eksekutif dari Presiden kepada perdana menteri sebagai pemimpin Dewan Menteri (Mahfud, 2001:94)

2. Sistem Parlementer Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Berubahnya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat membawa konsekuensi berubah pula undang-undang dasarnya. Pada tahun 1949, diberlakukan Konstitusi RIS yang secara tegas menganut sistem pertanggungjawaban Menteri (parlementer). Kedaulatan negara dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR dan Senat (pasal 1 ayat 2). Presiden menjadi kepala negara, sedangkan kebijaksanaan pemerintah ada di tangan menteri-menteri (pasal 118). Intinya, para menteri lah yang bertindak sebagai penyelenggara pemerintah negara dan mereka bertanggung jawab kepada Parlemen.

Bentuk negara federal ternyata dirasa sangat tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia, maka oleh kehendak rakyat akhirnya Republik Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan. Penyatuan semua negara bagian di wilayah Indonesia telah lengkap pada tahun 1950. Selanjutnya ditetapkanlah UUDS 1950 sebagai pengganti KRIS.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 ini juga sistem parlementer. Presiden hanya menjadi kepala negara, bukan kepala pemerintahan (pasal 45). Dalam pasal 83 ditegaskan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Perbedaan UUDS 1950 dengan KRIS 1949 adalah lebih jelas disebutkan bahwa Kabinet (Dewan Menteri) dapat dijatuhkan oleh parlemen, yaitu bilamana parlemen menganggap cukup alasan bahwa ada kebijaksanaan pemerintah yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, Dewan Menteri juga dapat mengajukan permohonan kepada Presiden agar DPR (Parlemen) dibubarkan dan dalam tempo 30 hari memilih anggota DPR yang baru (pasal 84).

3. Demokrasi Terpimpin di Era Orde Lama

Berlakunya UUDS 1950 dimaksudkan sebagai undang-undang dasar transisi selama dibahasnya rancangan UUD baru oleh Konstituante. Akan tetapi, situasi politik yang ada waktu itu sangat tidak mendukung kinerja konstituante. Akibat pemakaian sistem parlementer, selama hampir sembilan tahun pemerintahan tidak stabil. Di dalam Konstituante sendiri kekuatan-kekuatan politik yang ada saling berhadapan secara tajam (Mahfud, 2001:98). Akibatnya, Konstituante tak kunjung berhasil menyepakati naskah UUD yang baru. Macetnya kinerja Konstituante ini mendorong Presiden Soekarno untuk memberi amanat agar Indonesia kembali kepada UUD 1945. Bukannya menjadi solusi, amanat ini justru memperuncing perselisihan di antara kubu nasionalis, sosialis, Islam, dan non-Islam dalam Konstituante. Akhirnya, dengan pertimbangan demi keselamatan bangsa dan negara, tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit yang berisi:

4. pembubaran Konstituante
5. penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950
6. pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Sebelum diumumkannya Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan Soekarno telah lebih dahulu mengumumkan konsep Demokrasi Terpimpin. Konsep ini tak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sistem parlementer yang diberlakukan sebelumnya membuat stabilitas pemerintahan dan politik hampir tak pernah terpelihara. Oposisi di DPR yang senantiasa berusaha menggulingkan pemerintah dianggap Soekarno tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka menurutnya demokrasi parlementer tersebut harus diganti dengan konsepsi demokrasi gotong royong, yakni demokrasi terpimpin (Wilopo, 1978:53). Menurut konsepsi demokrasi terpimpin, sedapat mungkin kebijakan negara diambil berdasarkan musyawarah mufakat, namun jika mufakat tidak tercapai maka keputusan akhir terletak di tangan pimpinan lembaga tinggi negara. Sistem demokrasi terpimpin ini dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan Nomor VIII/MPRS/1965.

Dampak dari penerapan demokrasi terpimpin ini sangat terasa. Jika sebelumnya pada masa demokrasi parlementer berdasarkan UUDS 1950, pemerintah jatuh bangun karena oposisi parlemen, maka dalam demokrasi terpimpin justru parlemen berada di bawah kekuasaan Presiden. Bahkan Presiden pernah membubarkan DPR-GR pada tahun 1960 karena perselisihan paham antara Presiden dengan DPR-GR dalam masalah anggaran belanja. Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, terlihat bahwa sistem ini menimbulkan ekses, yakni amat mudahnya pimpinan eksekutif bertindak semaunya sendiri. Mufakat memang sangat dianjurkan oleh Pancasila, tetapi bukan dengan sikap semaunya sendiri pemegang kekuasaan.

4. Demokrasi Pancasila Orde Baru

Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966 mengantarkan Jenderal Soeharto ke tampuk kepresidenan, maka dimulailah era baru pemerintahan Indonesia yang disebut Orde Baru. Semboyan dari Orde Baru adalah "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Sistem

demokrasi terpimpin dihapuskan dan digantikan dengan sistem yang dinamai demokrasi Pancasila.

Demokrasi terpimpin memiliki kelemahan mendasar, yakni kenyataan bahwa di Indonesia terdapat banyak kubu ideologis yang berbeda secara mendasar, sehingga hampir tidak mungkin mencapai mufakat dalam berbagai kebijakan negara. Sebagian kritikus menganggap demokrasi terpimpin hanyalah muslihat agar Presiden Soekarno dapat memusatkan kekuasaan pada dirinya, supaya ia bebas mengembangkan politik NASAKOM (persatuan kelompok nasionalis, agama, dan komunis). Oleh karena itu, pada tahun 1968 MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor XXXVII/MPRS/1968 yang mencabut TAP MPR Nomor VIII/MPRS/1965, landasan demokrasi terpimpin, dan menetapkan pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Beberapa perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi terpimpin, antara lain:

- a. Demokrasi Pancasila menggunakan kembali cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau pemungutan suara, apabila mufakat bulat tidak tercapai.
- b. Persoalan kuorum dengan sendirinya menjadi penting bagi demokrasi Pancasila untuk menjadi syarat pemungutan suara; sementara, untuk demokrasi terpimpin tidak diperlukan kuorum karena tidak pernah menggunakan cara pemungutan suara.
- c. Sistem demokrasi terpimpin digunakan untuk semua lembaga negara, sedangkan demokrasi Pancasila khusus untuk lembaga legislatif saja (Mahfud, 2001:101).

E. Gerakan Reformasi 1998 dan Amandemen UUD 1945

Semboyan Orde Baru "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen" ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum yang dibuat khusus untuk itu. Pada tahun 1978, pemerintah memaksakan dikeluarkannya TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sejak semula oleh penggagasnya, Presiden Soeharto, dinamai Eka Prasetya Pancakarsa.

Semula gagasan ini ditolak keras oleh beberapa elemen masyarakat, terutama kalangan kampus karena memberi kesan menunggalkan penafsiran Pancasila. Dari sudut hukum tata negara adanya P4 juga dipertanyakan sebab sebagai ideologi dan dasar negara, tafsiran Pancasila itu adalah UUD dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika Pancasila ditafsirkan seperti itu, maka timbul persoalan tentang hubungan hirarkis antara Pancasila dengan UUD dan dengan P4. Rekayasa pemahaman kemudian dilakukan dengan mengatakan bahwa P4 bukan tafsir Pancasila sebagai dasar negara ... [melainkan] sebagai pemersatu bangsa, pandangan hidup bangsa, sebagai asal dan tujuan bangsa, dan sebagainya (Mahfud, 2001:147)

P4 kemudian disosialisasikan kepada masyarakat secara besar-besaran. Di dalamnya disertakan paket materi tentang UUD 1945 yang disakralkan. Di dalam berbagai penataran P4 selalu ditekankan arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia dan ditanamkan sikap anti terhadap perubahan apa pun terhadap UUD 1945, sebab tanpa UUD 1945 bangsa Indonesia pasti tidak bisa maju, bahkan akan hancur (Mahfud, 2001:148).

Proyek sosialisasi P4 ini dilanjutkan dengan upaya mempersulit amandemen terhadap UUD 1945. Pada awal tahun 1980-an, Presiden Soeharto melontarkan

usulan agar untuk mengubah UUD 1945, MPR tidak boleh sekedar menggunakan pasal 37 UUD 1945, tetapi harus terlebih dahulu meminta izin pada rakyat melalui referendum. Gagasan ini menimbulkan kontroversi yang cukup keras. Jika TAP MPR tentang referendum sampai disahkan, hal itu berarti pengebirian terhadap MPR, padahal menurut konstitusi MPR adalah pemegang kedaulatan tertinggi rakyat. Namun, karena hegemoni eksekutif yang sangat kuat, pada tahun 1983 MPR akhirnya mengeluarkan TAP Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum sebagaimana diinginkan Presiden Soenarto. Mahfud MD menilai bahwa ketetapan MPR tentang referendum ini justru merupakan ketidakmurnian dan tindakan tidak konsekuen terhadap UUD 1945, bertentangan dengan slogan Orde Baru, dan sebenarnya inkonstitusional (Mahfud, 2001:149).

Indikasi otoriternya pemerintahan Orde Baru dengan kontrol pemerintah yang sangat kuat terhadap berbagai kekuatan di masyarakat ditunjukkan dengan tindak lanjut terhadap TAP Nomor VI/MPR/1983 berupa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Di dalam pasal 18 UIU 5/1985 tersebut dinyatakan bahwa persetujuan rakyat bagi proses usul perubahan UUD harus ditunjukkan dengan dukungan yang sangat besar, sebesar 90% dari seluruh pemberi suara dengan minimal 90% dari pemberi suara yang ada harus menggunakan hak suaranya. Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru betul-betul ingin mempersulit upaya untuk mengadakan perubahan apa pun terhadap UUD 1945.

Politisasi pemerintah Orde Baru terhadap slogan "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen" pada akhirnya menjadikan demokrasi Pancasila sebatas demokrasi formalitas saja, sementara secara substansial sebenarnya tidak ada demokrasi. Beberapa parameter demokrasi seperti kebebasan pers, perlindungan terhadap HAM (khususnya kaum minoritas), peradilan yang bebas dan tidak memihak, kontrol sipil atas militer, tidak terpenuhi selama pemerintahan Orde Baru. Sebaliknya, pelanggaran HAM dan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru semakin banyak terjadi sejak awal tahun 1970-an.

Rasa antipati terhadap rezim Orde Baru mengkristal setelah Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, khususnya setelah terjadi krisis moneter yang hebat di Indonesia pada tahun 1997. Gerakan Reformasi secara terang-terangan meneriakkan perlunya amandemen atas UUD 1945 sejalan dengan seruan tentang reformasi politik dengan mencabut paket lima undang-undang politik (Mahfud, 2001:153).

Dari perspektif akademis, sebenarnya telah lama dikemukakan usulan amandemen terhadap UUD 1945. Alasannya, dalam UUD 1945 terdapat berbagai kelemahan mendasar yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang tidak demokratis. Berbagai lubang dalam pasal-pasal UUD 1945 ditemukan oleh karena sifat rumusannya yang singkat dan supel. Akibatnya, pemerintah dapat mengklaim diri demokratis dan menjalankan UUD 1945 dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu, padahal pemerintahan itu sama sekali tidak demokratis. Beberapa kelemahan naskah asli UUD 1945 itu ialah:

Pertama, sistem politik yang terbentuk bersifat *executive heavy*, dengan porsi kekuasaan terbesar terletak di tangan Presiden, tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai. Presiden menjadi penentu semua agenda politik nasional

na kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bahkan ra praktis juga menjadi kepala legislatif. Pembuatan undang-undang, misalnya, ang harus disetujui oleh Presiden dan DPR, tetapi penandatanganan dan pengundangannya tergantung kepada Presiden. Pengawasan lembaga audit keuangan (BPK), lembaga yudikatif (MA), maupun DPR tidak berjalan efektif karena kekuasaan tidak terdistribusi secara seimbang. Apalagi keberadaan lembaga-lembagaitu harus diatur dengan UU yang notabene materinya lebih banyak ditentukan oleh Presiden.

Kedua, terlalu banyak urusan yang didelegasikan UUD 1945 kepada UU atau Peraturan Pemerintah. Akibatnya, lagi-lagi Presiden menjadi pihak yang paling menentukan materi UU dan PP yang diminta UUD 1945 tersebut. Sekalipun Mahkamah Agung (MA) diberi wewenang untuk melakukan hak uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, tetapi hak ini pada prakteknya tumpul karena kelemahan aturan teknis-prosedural dan aspek justisabel (bisa diminta oleh siapa saja). Sampai tahun 2000, MA belum pernah sama sekali mengeluarkan produk *judicial review*.

Ketiga, beberapa pasal dalam UUD 1945 bersifat ambigu dan multitafsir, sehingga bisa diartikan semaunya oleh pemegang kekuasaan, terutama Presiden. Misalnya, ketentuan pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, ternyata diartikan bahwa Presiden dapat terus-menerus dipilih kembali setiap kali masa jabatannya berakhir. Jelas tafsiran seperti ini sangat menguntungkan seorang Presiden yang enggan melepaskan jabatannya.

Keempat, UUD 1945 terlalu optimistis terhadap itikad baik penyelenggara negara. Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa yang penting adalah semangat penyelenggara, jika penyelenggara negara baik maka negara akan baik. Pernyataan ini tidak salah, tetapi selain faktor individu penyelenggara yang diharapkan baik, sistem yang disediakan pun seharusnya juga baik. Bagaimanapun juga, demokrasi mensyaratkan adanya sistem *checks and balances* karena kesadaran bahwa pemegang kekuasaan cenderung korup (*power tends to corrupt*). Oleh karena itu, pembuat hukum semestinya mengasumsikan kemungkinan terburuk dan menyediakan antisipasi yang sistemik terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (lihat Mahfud, 2001:155-156).

Karena kelemahan-kelemahan itulah, pemerintah yang menggunakan UUD 1945 cenderung menjadi otoriter, sehingga akhirnya melemahkan supremasi hukum, dan digantikan dengan paradigma kekuasaan. Itu sebabnya amandemen terhadap UUD 1945 menjadi agenda penting di era reformasi. Pada bulan Agustus dan September 1999, beberapa partai politik besar (dalam arti mendapat jumlah kursi yang signifikan di dalam Pemilu) bersepakat memperjuangkan agenda amandemen dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999, bahkan juga menyepakati beberapa materi pokok untuk amandemen (Mahfud, 2001:160).

Kekuatan gabungan partai-partai politik pro-amandemen tersebut tidak terbendung, dan akhirnya tembok sakralisasi terhadap UUD 1945 runtuh pada tanggal 19 Oktober 1999. MPR memutuskan untuk mengubah sembilan pasal UUD 1945, yakni pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Dari sekian pasal yang diamandemen, Mahfud MD melihat belum ada perubahan substantif yang mengelaborasi konstitusionalisme,

kecuali pembatasan masa jabatan Presiden yang tegas-tegas dibatasi dua periode saja serta sedikit penyeimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam proses membuat perundang-undangan. Sekalipun demikian, semangat dan keberanian untuk memperbaiki UUD 1945 itu sendirilah yang merupakan perubahan utama.

Tanggal 18 Agustus 2000, MPR melakukan amandemen kedua dengan perubahan yang lebih substansial, bukan sernantik belaka. Yang ditegaskan dalam amandemen tahun 2000 ini antara lain adalah pola hubungan pusat dan daerah dengan asas otonomi daerah, mekanisme pengisian jabatan DPR dan hak-hak lembaga ini, serta perluasan pengakuan hak-hak asasi manusia yang diatur secara terperinci dalam pasal 28 A sampai 28 J.

Amandemen ketiga tanggal 10 November 2001 dipusatkan terutama pada persoalan mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, prosedur pemberhentian apabila Presiden atau Wakil Presiden dianggap melakukan tindakan yang tercela atau melawan hukum, serta pembatasan lebih lanjut kekuasaan Presiden. Amandemen ketiga juga memunculkan lembaga-lembaga tinggi baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Amandemen keempat tanggal 11 April 2002 menyempurnakan beberapa pasal yang telah diubah dalam amandemen-amandemen sebelumnya. Pasal yang dielaborasi secara khusus dalam amandemen keempat ini adalah pasal 31 s/d 34, yakni pasal-pasal yang mengatur soal pendidikan dan kesejahteraan umum. Kemudian, pasal 37 juga dirombak menjadi lebih terperinci, sedangkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan UUD 1945 yang lama diganti dan disesuaikan dengan situasi mutakhir Indonesia.

F. Perubahan-perubahan UUD 1945 Hasil Amandemen

Jika dibandingkan antara UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 hasil amandemen terakhir, kita akan melihat beberapa perubahan mendasar dalam hal perubahan struktur dan fungsi MPR, pembatasan kekuasaan presiden, perluasan kekuasaan DPR, perubahan mekanisme pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan MPR, munculnya lembaga-lembaga tinggi baru, dihapuskannya lembaga tinggi lama yang dinilai tidak efektif, penegasan asas otonomi daerah, dan perluasan pengakuan HAM.

1. Perubahan struktur dan fungsi MPR

Semula struktur MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan-golongan (pasal 2 ayat 1). Setelah amandemen, MPR menjadi bikameral, terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (pasal 2).

Semula, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi dari rakyat. Oleh karena itu, MPR berwenang untuk menetapkan atau mengubah UUD dan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menerima pertanggung jawaban dari kekuasaan eksekutif tersebut (pasal 3, dan pasal 6 ayat 2). Setelah amandemen, MPR mengalami pengurangan

wewenang. Lembaga ini masih berwenang untuk menetapkan atau mengubah UUD (pasal 3 ayat 1), tetapi tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. MPR hanya berwenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih rakyat secara langsung (pasal 3 ayat 2 jo. pasal 6). UUD pasca amandemen juga mengurangi wewenang MPR dalam hal mengevaluasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Wewenang untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya di tangan MPR, melainkan dilaksanakan bersama-sama dengan DPR dan Mahkamah Konstitusi (pasal 3 ayat 3 jo. pasal 7A s/d C).

2. Pembatasan kekuasaan Presiden

Sama seperti MPR, Presiden juga mengalami pembatasan kekuasaan yang signifikan dalam UUD 1945 pasca amandemen. Semula, hak dan wewenang Presiden diatur sebagai berikut:

- a. membentuk UU dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1)
- b. memegang jabatan selama 5 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali (tanpa batasan periode masa jabatan) (pasal 7)
- c. memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10)
- d. menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11)
- e. menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
- f. mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat 1)
- g. memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (pasal 14)
- h. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)
- i. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17)

Setelah amandemen, hak dan wewenang Presiden mengalami pembatasan seperti berikut:

- a. wewenang Presiden sebatas mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat 1), dan Presiden berkewajiban untuk mengesahkan RUU yang sudah disetujui DPR (pasal 20 ayat 3); sekalipun Presiden tidak mau mengesahkannya, dalam waktu 30 hari sejak disetujui DPR, RUU itu akan otomatis sah sebagai UU dan Presiden wajib mengundangkannya (pasal 20 ayat 4)
- b. masa jabatan paling lama dua periode (pasal 7)
- c. untuk membuat perjanjian internasional apa pun yang berdampak kepada rakyat Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
- d. untuk mengangkat duta dan konsul atau menerima duta dari negara lain, Presiden harus meminta pertimbangan dari DPR (pasal 13 ayat 1 dan 2)
- e. untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1)
- f. untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus meminta pertimbangan dari DPR (pasal 14 ayat 2)
- g. untuk memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain Presiden harus mengikuti aturan undang-undang (pasal 15)

- h. untuk membentuk, mengubah atau membubarkan kementerian negara, Presiden harus mengikuti aturan undang-undang (pasal 17 ayat 4)
- i. mengangkat tiga orang anggota Mahkamah Konstitusi (pasal 24C ayat 3).

3. Perluasan kekuasaan DPR

Amandemen UUD 1945 memperluas secara signifikan hak dan wewenang DPR, dengan mengalihkan sebagian kewenangan yang dulu dimiliki oleh MPR dan Presiden kepada para wakil partai politik yang dipilih rakyat lewat Pemilu. Ini, semula, UUD 1945 memberikan hak dan wewenang kepada DPR sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden (pasal 5 ayat 1)
- b. mengajukan RUU kepada Presiden (pasal 21 ayat 2)
- c. membentuk UU bersama Presiden (pasal 5 ayat 1 jo. 20 ayat 1)
- d. memberikan persetujuan terhadap pernyataan perang atau damai yang dikeluarkan Presiden atau perjanjian dengan negara lain (pasal 11)
- e. memberikan persetujuan terhadap Perpu (pasal 22 ayat 2)
- f. memberikan persetujuan terhadap APBN (pasal 23 ayat 1)
- g. menerima hasil pemeriksaan BPK atas keuangan negara (pasal 23 ayat 5)

Setelah amandemen, DPR memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan Presiden (pasal 7A)
- b. memegang kekuasaan untuk menyusun UU (pasal 20 ayat 1)
- c. memiliki hak untuk mengajukan RUU (pasal 21)
- d. memberikan persetujuan untuk semua perjanjian internasional, pernyataan perang atau damai, atau perjanjian dengan negara lain (pasal 11)
- e. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta atau konsul untuk negara lain, atau menerima penempatan duta negara lain, serta dalam memberikan amnesti dan abolisi (pasal 13 dan pasal 14)
- f. ikut menyusun aturan undang-undang tentang pemberian tanda jasa, penghargaan, dan lain-lain serta tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara (pasal 15 dan pasal 17 ayat 4)
- g. memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta hak untuk mengajukan pernyataan, hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas (pasal 20A)
- h. membahas bersama dan memberikan persetujuan atas APBN (pasal 23)
- i. mengangkat tiga orang anggota Mahkamah Konstitusi (pasal 24C ayat 3)

4. Perubahan mekanisme pengisian jabatan

Perubahan mekanisme pengisian jabatan terjadi secara mencolok pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Semula, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, dengan metode pemungutan suara (pasal 6 ayat 2). Pasca amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu paket (pasal 6 ayat 1). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat (pasal 6 ayat 2). Apabila pasangan calon itu memenangkan lebih dari 50% suara dalam satu kali putaran dengan ketentuan jumlah provinsi tertentu, mereka langsung dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 3). Tetapi, jika tidak ada pasangan calon yang meraih 50% suara lebih, maka diadakan pemilu tahap dua untuk menentukan salah satu dari

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di pemilu tahap pertama (pasal 6 ayat 4).

UUD 1945 hasil amandemen juga memberi ketegasan tentang metode pemilihan DPR, yakni melalui Pemilu (pasal 19).

5. Lembaga-lembaga tinggi baru

Beberapa lembaga tinggi baru yang muncul dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah:

- a. **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)** yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di tiap provinsi melalui pemilihan umum (pasal 22C ayat 1) berhak untuk mengajukan RUU atau ikut membahas RUU yang berhubungan dengan kepentingan daerah dalam rangka otonomi daerah, serta mengawasi pelaksanaan produk-produk UU itu (pasal 22D).
- b. **Mahkamah Konstitusi** berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 2) dengan kekhususan wewenang untuk menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu (pasal 24C ayat 1) serta memutuskan dugaan pelanggaran Presiden yang diajukan oleh DPR (ayat 2).
- c. **Komisi Yudisial** secara khusus bertugas di lingkungan peradilan dengan mengajukan calon hakim agung dan menjadi lembaga pengawas pelaksanaan kode etik (pasal 24B ayat 1)

6. Dihapuskannya DPA

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur adanya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berkewajiban menjadi penasihat Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah (pasal 16 ayat 2). Menurut Penjelasan UUD 1945, DPA memang semata-mata bertugas menjadi badan penasihat.

Pasca amandemen, tidak ditemukan lagi ketentuan dalam UUD yang mengatur tentang DPA. Sebagai gantinya, diatur tentang adanya sebuah badan yang bertugas untuk menasihati Presiden. Bedanya, badan ini sepenuhnya dibentuk dan anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden sendiri (pasal 16).

7. Penegasan asas otonomi daerah

Pra amandemen, pengaturan UUD 1945 tentang hubungan antara pusat dan daerah sebatas rumusan berikut: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" (pasal 18).

Setelah amandemen, asas otonomi daerah dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dipertegas. Pasal 18 dikembangkan menjadi pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18 terdiri atas 7 ayat, pasal 18 A dua ayat, dan pasal 18 B dua ayat. Garis-garis besar otonomi daerah itu adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi; provinsi itu kemudian dibagi lagi ke dalam kabupaten dan kota
- b. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan asas otonomi dan tugas pembantuan
- c. Pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD yang dipilih lewat pemilu

- d. Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara "demokratis" (maksudnya lewat pemilu langsung)
- e. Otonomi daerah berlaku seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut UU
- f. Pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan daerah
- g. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah diatur secara adil dan selaras
- h. Negara menghormati daerah istimewa dan masyarakat adat

8. Perluasan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Di dalam batang tubuh UUD 1945 pra amandemen terdapat lima butir pengakuan dan perlindungan HAM yang dicantumkan dalam empat pasal, yaitu:

- a. Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- c. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (pasal 28)
- d. Kebebasan beragama (pasal 29 ayat 2)
- e. Mendapatkan pengajaran (pasal 31)

Amandemen kedua memperluas pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ini dengan memberikan uraian yang lebih rinci, yakni:

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A)
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1)
- c. Hak anak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2)
- d. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1)
- e. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28C ayat 2)
- f. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1)
- g. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2)
- h. Hak warganegara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)
- i. Hak setiap orang atas status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 4)
- j. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1)
- k. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (pasal 28E ayat 2)
- l. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3)
- m. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (pasal 28F)

- ri. Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda miliknya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan hak asasi (pasal 28G ayat 1)
- o. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan hak memperoleh suakan politik dari negara lain (pasal 28G ayat 2)
- p. Hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)
- q. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)
- r. Hak atas jaminan sosial untuk hidup sebagai manusia yang utuh dan bermartabat (pasal 28H ayat 3)
- s. Hak milik pribadi dan perlindungan terhadap hak milik tersebut dari pengambil-alihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun (pasal 28H ayat 4)
- t. Hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (pasal 28I ayat 1)
- u. Kebebasan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat 2)
- v. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (pasal 28I ayat 3)

Selanjutnya pasal 28 I ayat (4) dan (5) dan pasal 28 J memberikan pengaturan sebagai berikut:

- a. Negara, terutama Pemerintah, bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
- b. Perlindungan terhadap HAM diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. Tiap orang berkewajiban menghormati HAM orang lain
- d. Hak dan kebebasan tiap orang dijalankan dengan kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan UU agar tercapai keadilan bagi semua orang

G. Penutup

Sampai tahun 2005, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Tampaknya amandemen keempat tahun 2002 yang lalu bukanlah amandemen yang terakhir. Sampai saat ini masih ada ketidakpuasan-ketidakpuasan terhadap hasil amandemen, bahkan ada pula gerakan yang ingin agar UUD 1945 dikembalikan kepada rumusan aslinya. Ketidakpuasan terutama ditujukan kepada besarnya wewenang DPR yang dilimpahkan oleh UUD 1945. Sebagian orang mengkuatirkan terjadinya tirani legislatif karena dominasi DPR dalam berbagai aspek pemerintahan. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa bangsa dan negara Indonesia masih dalam proses mencari bentuk untuk mendefinisikan sistem demokrasi Pancasila. Namun, perubahan apa pun yang terjadi pada batang tubuh UUD 1945, ada suatu konsensus nasional untuk tidak bergeser dari dasar negara yang telah dipilih, yakni Pancasila.

II. CONTOH-CONTOH

1. Untuk melindungi hak untuk hidup, KUH Pidana merumuskan delik pembunuhan (pasal 338) yang akan menghukum orang yang menghilangkan nyawa orang lain.
2. Diberikannya kesempatan kepada partai-partai politik berasaskan agama dan dibolehkannya penggunaan simbol-simbol agama dalam praktek kenegaraan menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler.
3. Anak seorang gubernur atau anak seorang petani, jika didapati mencuri, maka keduanya akan menjalani proses hukum yang sama. Hal ini adalah contoh kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

III. LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamental norm* negara Indonesia? Mengapa?
2. Bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila dimanifestasikan dalam UUD 1945?
3. Bagaimana dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila sejak tahun 1945 sampai tahun 1998?
4. Bagaimana kaitan antara gerakan reformasi dengan keputusan MPR untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945?
5. Perubahan-perubahan mendasar apa saja yang terjadi dalam substansi UUD 1945 setelah dilakukan empat kali amandemen?

IV. KUNCI JAWABAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan secara benar.

V. TES FORMATIF

1. Jelaskan dua tugas utama negara!
2. Gambarkan dan jelaskan hirarki hukum ketatanegaraan di Indonesia!
3. Bagaimana hubungan antara sila-sila Pancasila dengan UUD 1945?
4. Bandingkan implementasi UUD 1945 dalam praktek ketatanegaraan Indonesia sejak 1945 sampai kini!
5. Jelaskan latar belakang dan hasil amandemen UUD 1945!

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

RANGKUMAN

Pancasila sebagai dasar negara dimanifestasikan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi pokok kaidah: dasar atau *staats fundamental norm* yang menjiwai isi seluruh batang tubuh UUD 1945. Oleh karena sifatnya yang singkat dan supel, implementasi UUD 1945 dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia mengalami dinamika sesuai penafsiran masing-masing pemerintahan. Dorongan untuk menyempurnakan rumusan batang tubuh UUD 1945 menguat setelah gerakan Reformasi tahun 1998. Setelah empat kali amandemen, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan mendasar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noer MS, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty.
Budiardjo, Miriam, 1995, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ma'arif, Ahmad Syafii, 1985, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
Noer, Deliar, 1986, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta.
Wilopo, 1978, *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*, Jakarta: Yayasan Idayu.

IX. SENARAI

- Konstitusi:** hukum tertulis atau tidak tertulis yang menjadi dasar praktek kenegaraan.
***Staatsfundamental norm*:** pokok kaidah mendasar negara, dalam kasus Indonesia mengacu kepada Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila.
Reformasi: perubahan yang terencana terhadap suatu keadaan, dalam bab ini khususnya mengacu pada gerakan politik yang menuntut diakhirinya kekuasaan Orde Baru tahun 1998.
Amandemen: perubahan terhadap undang-undang dasar untuk menyempurnakan isinya sesuai kebutuhan zaman dan penyesuaian dengan nilai-nilai esensial.



PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI

TINJAUAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Pokok bahasan "Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Era Globalisasi" membicarakan beberapa sub pokok bahasan seperti: pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan negara-bangsa, meneropong fenomena globalisasi, tantangan globalisasi bagi Indonesia, paradigma pembangunan Indonesia di era globalisasi, dan pendidikan kebangsaan sebagai antisipasi terhadap globalisasi kultural.

B. Manfaat / Relevansi

Pokok bahasan ini memberi wawasan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menguraikan peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan negara-bangsa Indonesia, khususnya di era globalisasi.

C. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerangkan bagaimana Pancasila dapat berperan sebagai paradigma pembangunan secara aktual di era globalisasi.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian paradigma;
- menjelaskan pengertian dan cara kerja Pancasila sebagai paradigma pembangunan;
- menggambarkan fenomena globalisasi pasca Perang Dingin dan melakukan tinjauan kritis terhadap neo-liberalisme;
- menjelaskan tantangan era globalisasi bagi Indonesia;
- menyimpulkan arti penting Pendidikan Pancasila bagi pembangunan identitas dan karakter bangsa.

URAIAN DAN CONTOH-CONTOH

I. URAIAN

Pokok Bahasan: Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Era Globalisasi.

VII. RANGKAIAN

Paradigma
Pembukaan
staats
karena
kenapa
ma
U

asal dari kata Yunani *para* yang artinya "di samping" dan *igma* yang berarti "contoh". Lili Rasyidi (1993) dan Satjipto Rahardjo (1998) mendefinisikannya. Wilardjo (1998) menjelaskan bahwa paradigma merupakan kerangka dalam kegiatan keilmuannya untuk menunjukkan perlu digarap, dan dengan metode apa dimana penggarapan itu harus dilakukan. Model ini menjadi dasar yang menjadi tumpuan karya-karya yang dipengaruhi dari sejumlah jenius di bidang ilmu tertentu (Dja'is,

yang dikemukakan oleh Wilardjo di atas, konsep paradigma secara luas digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Orang yang mempopulerkan istilah ini adalah Thomas Kuhn (1922-1966) lewat bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Paradigma, menurut Kuhn, bukan sekedar teori yang mutakhir, melainkan keseluruhan cara pandang terhadap dunia (*worldview*) yang menjadi konteks paradigma itu, serta semua implikasi yang mengikutinya (Wikipedia, 2005). Kuhn menjelaskan fungsi paradigma sebagai suatu kerangka keyakinan tertentu yang memberi batasan tentang masalah dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Paradigma dapat berubah, dan jika terjadi perubahan paradigma akan terjadi revolusi pemikiran. Perubahan paradigma terjadi jika muncul gejala-gejala yang tidak dapat diterangkan secara memuaskan dengan teori-teori yang bersandar pada paradigma lama. Gejala-gejala tersebut dinamai "anomali". Kumulasi anomali akan menimbulkan krisis. Ketika krisis memuncak, lahir paradigma baru yang akan menggusur paradigma lama (Wilardjo, 1998).

Ringkasnya, paradigma memiliki arti yang sangat penting sebagai konteks berpikir para peneliti dan pemikir dalam mengenali akar dari masalah dan menentukan metode serta prosedur pemecahan masalah itu. Perubahan paradigma akan mengakibatkan berubahnya secara radikal sudut pandang seseorang terhadap dunia yang dihadapinya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, beberapa contoh pergeseran paradigma antara lain digusurnya kosmologi Ptolemy yang geosentris oleh kosmologi Copernicus yang heliosentris, transisi dari fisika Newton ke fisika relativistik Einstein, serta ditemukannya mekanika kuantum yang meruntuhkan mekanika klasik. Akan tetapi, konsep paradigma sejak Kuhn dapat juga diterapkan ke berbagai bidang kehidupan, tidak hanya ilmu-ilmu alam. Contoh perubahan radikal dalam keyakinan-keyakinan personal atau organisasi terlihat misalnya ketika monarki Inggris bersedia menandatangani piagam HAM Magna Charta tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi kekuasaan raja, demikian pula Revolusi Perancis dan Revolusi Industri di Inggris yang dampaknya mengubah wajah masyarakat dunia.

B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Negara-Bangsa

Dalam proses kemunculannya sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sendiri merupakan hasil dari pergeseran paradigma dari status rakyat terjajah menjadi bangsa yang beridentitas dan siap untuk membangun negara yang

merdeka. Perubahan paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari meluasnya paham nasionalisme modern di abad ke-19 dan ke-20. Di paruh awal abad ke-20, nasionalisme adalah primadona, modus identitas diri dan kolektif yang dominan di Asia dan Afrika. Selama kurun waktu itu, ideologi nasionalis merupakan perangkat dahsyat untuk membentuk identitas individual dalam suatu entitas politik bernama negara-bangsa (*nation-state*). Negara-bangsa yang berpola hubungan horizontal dan sekuler menggantikan kedudukan tatanan keagamaan atau feodal yang hirarkis (Turner, 2002:45,50). Filipina dan India bangkit melawan penjajahan Spanyol dan Inggris. Sun Yat Sen (1866-1925) memimpin Revolusi Xinghai tahun 1911 untuk menghabisi sistem imperial Cina yang telah berusia dua ribu tahun dan menggantikannya dengan sebuah republik. Namun, yang paling inspiratif bagi rakyat Asia adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905.

Di dalam negeri, perubahan paradigma berawal dari munculnya kaum cendekiawan sebagai golongan menengah baru akibat Politik Etis pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, mereka menggunakan metode baru dalam bentuk organisasi-organisasi modern untuk menciptakan sentimen persatuan dan sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme. Meskipun demikian, sampai saat Sukarno terjun ke dalam pergerakan nasionalis, organisasi-organisasi yang ada belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ideologis di antara mereka. Sarekat Islam, organisasi pergerakan terbesar di awal abad ke-20, justru sedang mengalami perpecahan dengan elemen Marxis dalam tubuh organisasinya, menjadi SI Merah dan SI Putih. Dimatangkan lewat proses politik yang panjang, akhirnya Pancasila lahir sebagai nama dari suatu perubahan paradigma dalam sejarah Indonesia.

Bagi Indonesia, identitas nasional yang baru ini merupakan suatu perkembangan yang menakjubkan. Hamparan kepulauan yang tadinya berdiri sendiri-sendiri secara politis, bahkan saling bertarung satu sama lain, kini dipersatukan dalam suatu ikatan kebangsaan. Ikatan ini meleburkan berbagai perbedaan fisik, kultural dan ideologis antar kelompok-kelompok manusia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, identitas nasional mengatasi perbedaan-perbedaan dalam hidup beragama. Demi mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka, umat-umat beragama yang mayoritas maupun minoritas bekerja sama dengan kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan. Dalam Pancasila kesadaran akan kesatuan dalam kebhinekaan ini dituangkan dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila ketiga, "Persatuan Indonesia".

Belajar dari penderitaan akibat penjajahan, timbul cara pandang yang jernih dalam pemikiran para pendiri negara ini dan rakyat Indonesia bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Dengan demikian, negara Indonesia kelak tidak boleh bersikap sama dengan tuan-tuan kolonial yang menginvasi dan menghisap negara lain. Sebaliknya, negara Indonesia kelak harus aktif turut serta menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan ketertiban, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" ini diwujudkan antara lain dengan aksi menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika dan memprakarsai Gerakan Non-Blok selama masa Perang Dingin.

Ketiga sila di atas – Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia – menjadi landasan dari apa yang dinamai Soekarno sebagai *character building* atau pembangunan karakter bangsa Indonesia. Setiap warga Indonesia diharapkan menjadi orang yang religius, nasionalis, sekaligus berperikemanusiaan dan berwawasan global.

Yang tak kalah pentingnya adalah sudut pandang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa (*nation building*). Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila mengenali nilai-nilai terbaik dan mengkritik eksese-eksese terburuk dari berbagai kubu ideologis. Dua kubu ideologis yang terbesar pada masa itu adalah kapitalisme liberal dan sosialisme/komunisme.

Kapitalisme liberal menitikberatkan kodrat manusia sebagai makhluk individu, sehingga kebebasan dan kesetaraan (*equality*) menjadi nilai-nilai utamanya. Kelebihan dari liberalisme adalah sistem demokrasi politik yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara setara. Sebaliknya, sosialisme menitikberatkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, sehingga keadilan sosial dan kesetaraan taraf hidup (*equality*) menjadi nilai-nilai utamanya. Kelebihan dari sosialisme adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, khususnya kaum yang lemah (miskin). Pancasila mengambil sisi positif dari kedua ideologi ini, dengan menerima kodrat manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, dari menerima sistem demokrasi di bidang politik dan sistem ekonomi rakyat sebagai asas pengelolaan sumber daya ekonomi negara. Dengan cara demikian, Pancasila mencoba mengobati eksese dari kapitalisme, yakni eksploitasi terhadap kaum yang lemah, dan mengobati eksese dari sosialisme, yakni penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan berusaha.

C. Meneropong Fenomena Globalisasi

Secara hitungan waktu, baru 60 tahun berlalu sejak Republik Indonesia berdiri, namun situasi dunia telah berubah begitu cepat dan hebatnya. Fungsi agama dan nasionalisme sebagai penyediz modus-modus dominan bagi identitas individual dan kolektif di awal periode modern mulai tergeser seiring perkembangan situasi dunia. Sama seperti modus-modus religius dan nasionalis itu adalah produk dari proses lazim modernisasi, begitu pula saat ini globalisasi merupakan fase kontemporer yang dominan (Turner, 2002:45).

Globalisme sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu, dapat kita saksikan dalam proyek Hellenistik Aleksander Agung dari Makedonia dan proyek Pax Romana, namun globalisasi seperti yang kita temui pada zaman kita memang tak tertandingi. Samuel Huntington menyatakan bahwa globalisasi merupakan salah satu dari tiga fenomena penting dalam milenium ini, selain multicivilisasi dan transisi menuju masyarakat demokratis. Wartawan kawakan seperti Thomas L. Friedman juga meyakinkan kita bahwa fenomena globalisasi ini adalah kecenderungan dan sistem yang tak dapat dihindari umat manusia zaman ini. Mengapa dunia ini begitu cepat mengglobal (*globalized*)? Jorge Nef (2002:60-62) menguraikan tiga hal yang menjadi akar struktur dan dinamika globalisasi di zaman kita.

Pertama, kemajuan teknologi. Selama 50 tahun terakhir, teknologi telah maju begitu pesat. Inovasi peralatan perang dan industri telah mengerutkan batas waktu dan jarak politik dunia. Menurut Blake dan Walters (1976), apa yang dahulu dianggap sebagai urusan antar negara, sekarang telah menjadi urusan global. Dalam konteks ini, urusan domestik akan sangat dipengaruhi oleh campur tangan eksternal, sehingga batas antara "nasional" dan "global" tak lagi jelas. Inovasi teknologi komunikasi dan transportasi juga sangat mempengaruhi kecepatan dan daya jangkauan informasi dan barang, dengan ongkos yang kian murah. Efek jarak jauh ini menembus batas-batas teritorial negara-bangsa dan mempengaruhi konsep kedaulatan negara.

Kedua, unipolarisasi ideologi. Dampak transformasi ideologis dunia pasca keruntuhan Uni Soviet tak kalah hebat dari kemajuan teknologi. Selama 54 tahun dunia diliputi Perang Dingin (1945-1989) antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara, menjadikan prinsip dikotomis "lawan atau kawan" sebagai asas politik internasional. Benih-benih globalisasi telah disemaikan dengan pola hubungan patron-klien antara kedua blok kekuasaan dengan negara-negara periferi. Bantuan asing – transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan administrasi, serta bantuan pertahanan militer – meningkatkan rasa ketergantungan kaum elit periferi dengan struktur global, baik secara militer, ideologis, politis, maupun ekonomis. Pola hubungan itu bertambah hebat setelah tidak ada lagi blok kekuasaan alternatif. Dunia bipolar menjadi unipolar, neo-liberalisme yang diusung oleh para petinggi G-7 (ditambah Rusia, kini menjadi G-8) menjadi ideologi global yang hegemonik.

Ketiga, unipolarisasi ekonomi. Pengkutuban ganda pasca Perang Dunia II, yakni Utara vs. Selatan dan Barat vs. Timur, sejak tahun 1989 telah digantikan oleh poros relasi tunggal Pusat vs. Pinggiran. Pusatnya tetap berada di Barat, Dunia Pertama, blok perdagangan yang unggul, tergabung, dan saling terhubung. Apa yang dulu disebut Dunia Kedua dan Dunia Ketiga telah runtuh menjadi pelaku-pelaku pasar yang terbagi-bagi, ada yang bersatus "industri baru (*newly industrializing*)", "sedang berkembang (*developing*)", "miskin", dan "transisional" (dari kubu sosialis ke kubu kapitalis). Secara umum, ekonomi masyarakat sedunia semakin terintegrasi.

Globalisasi sedang mengarah kepada terbentuknya tata (orde) dunia baru. Pengamat politik internasional Malachi Martin mengamarkan bahwa kita semua terlibat dalam kompetisi kekuasaan Orde Dunia Baru, sekalipun kebanyakan kita bukanlah petarung, melainkan kayu bakar belaka dalam persaingan global ini.

Karena kompetisi ini adalah tentang siapa yang akan menegakkan sistem pemerintahan sedunia pertama yang pernah ada dalam masyarakat bangsa-bangsa. Ini tentang siapa yang akan memegang dan mengatur kekuasaan ganda otoritas dan kendali atas kita sebagai pribadi dan semua kita sebagai komunitas. ... Tidak ada yang akan disisakan, karena sekali kompetisi ini diputuskan, dunia dan segala yang ada di dalamnya – cara hidup kita sebagai individu dan warga bangsa; keluarga dan pekerjaan kita; perdagangan dan usaha komersial dan uang kita; sistem pendidikan kita dan agama dan kebudayaan kita; bahkan rencana identitas nasional kita, yang sebagian besar kita terima begitu saja – semuanya akan diubah

dengan hebat dan radikal selamanya. Tak seorang pun terhindar dari dampak-dampaknya. Tiak satu sektor pun kehidupan kita yang tinggal tak tersentuh (Martin, 1990:15).

Satu hal yang sebagian orang sudah menyadari, namun lebih banyak yang belum menyadari, adalah bahwa globalisasi dalam dirinya bersifat miskin nilai-nilai moral dan spiritual. Pasca keruntuhan ideologi Marxisme-Leninisme Uni Soviet, satu-satunya arus ideologi adidaya di dunia adalah kapitalisme liberal dan egalitarianisme demokratis Barat. Basis moral yang diperlukan oleh setiap pemerintahan, baik nasional maupun global, untuk menjangkarkan diri tidak tersedia dalam diri kapitalisme. Apa yang biasanya dianggap kode moral kapitalisme sejauh ini tidak lebih dari tuntutan darurat (*exigency*) moral yang berdasar kasus per kasus, situasi per situasi (Martin, 1990:36). Pilar utama kapitalisme liberal adalah uang (kapital) dan teknologi.

Di jantung wacana [ekonomi neo-liberal] ini terdapat etika individualisme posesif dan predatoris yang menyolok dengan sedikit sekali batasan-batasan, konsekuensi, dan hal moral lain yang dengan efektif memberi alasan pembenar terhadap sarana apa pun untuk memaksimalkan keuntungan (Nef, 2002:65).

Secara filosofis, baik Marxisme-Leninisme maupun kapitalisme liberal hanyalah dua faset dari materialisme yang sama. Kepentingan keduanya sama-sama: mengenyangkan perut dengan makanan, mengenyangkan akal dengan pengetahuan, dan mencukupi kebutuhan dunia akan air dan udara yang segar. Itu pula sebabnya, mendiang Paus Yohanes Paulus II memperingatkan warga Cekoslovakia agar tidak menggantikan Komunisme dengan "sekularisme, ketidakpedulian, konsumerisme hedonis, materialisme praktis, dan juga ateisme formal yang mewabah di Barat" (Martin, 1990:37).

Globalisasi tidak menghamba kepada kepentingan masyarakat global manapun, kecuali kepentingan sekelompok kecil manusia yang menguasai porsi terbesar ekonomi dunia. Laporan UNDP tahun 1993 menyebutkan bahwa 20 persen populasi dunia menguasai 82,7 persen pemasukan sedunia (Nef, 2002:62). Dan memang sebetulnya tidak pernah ada masyarakat global yang sebenarnya. Jorge Nef dan David Korten mengatakan bahwa "desa global" hanyalah mitos.

Karena bagi sebagian besar populasi dunia, lepas dari klaim tentang kemunculan kosmopolitanisme, globalisasi kehidupan sosial berarti hampir tidak lebih dari sekedar realitas maya dari kemasan media dan pengiklanan produk-produk. Maka, ketika kita bicara tentang desa global, kita sedang mengacu kepada satu porsi relatif kecil kemanusiaan: mereka yang kaya, berkuasa, dan terinformasi, yang benar-benar memiliki karakter transnasional. Mayoritas populasi dunia, sekalipun terpengaruh oleh karakter planetaris dari komunikasi, produksi, distribusi, dan akumulasi, tidak ambil bagian dalam keuntungan rezim sosial baru [ini] (Nef, 2002:63).

Individualisme yang posesif dan predatoris membuat motivasi pasar, yakni korporasi-korporasi dunia, hanya satu: mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya dan harga buruh yang semurah-murahnya. Tujuannya hanya satu, yakni pertumbuhan ekonomi. Korporasi-korporasi terbesar dunia mengendalikan pemerintah nasional dan media sebagai mesin propaganda

aktif yang terus-menerus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa konsumerisme adalah jalan menuju kebahagiaan, kekangan pemerintah terhadap akses pasar adalah penyebab kesulitan kita, dan globalisasi ekonomi secara historis tidak dapat dihindari dan merupakan anugerah bagi spesies manusia (Korten, 1997:32). Korporasi tidak peduli jika langkah-langkahnya menyebabkan disintegrasi sosial dan lingkungan yang akut, ia tidak memikirkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kaum kaya dan kaum miskin, eksploitasi satu negara atas negara lain, sebagaimana yang telah terbukti sangat nyata pada dekade-dekade belakangan ini.

Pelaku keuangan dunia, George Soros, pun mengakui betapa sistem kapitalisme global yang kelihatan berkuasa itu sebenarnya rapuh dan mengandung krisis. Masyarakat terbuka yang dicita-citakan filsuf anti-Marxisme Karl Popper mendapat ancaman serius dari kekurangan kohesi sosial dan ketiadaan pemerintah (Soros, 2001:xvii). Globalisasi memunculkan persoalan disintegrasi sosial, hilangnya identitas komunal karena penyesuaian struktural terhadap proses globalisasi itu mematikan nilai-nilai lama, seperti sentralitas keluarga, nasionalisme, dan "kewajiban sipil" (Nef, 2002:61). Oleh persaingan tajam memperebutkan sumber daya, ikatan-ikatan sosial lama melemah, akan tetapi krisis timbul karena – mengutip Antonio Gramsci – sekalipun identitas yang lama sedang "sekarat", yang baru belum lahir.

Atas dasar nilai apakah masyarakat global hendak dibangun menggantikan negara-bangsa? Sebagian orang mencoba mengajukan nilai kemanusiaan sebagai "agama" global, namun tampaknya masih ada kesulitan lain. Neo-liberalisme sebagai dasar ideologis globalisasi terlalu berorientasi pada nilai-nilai dan pengalaman Dunia Pertama, khususnya Amerika, sehingga globalisasi menjadi identik dengan Westernisasi model Amerika. Seperti jawaban *blak-blakan* Francis Fukuyama (1999) ketika ditanya, "Apakah globalisasi sebenarnya eufemisme dari Amerikanisasi?".

Saya pikir memang begitu, dan itu sebabnya sebagian orang tidak menyukainya. Saya pikir [globalisasi] haruslah Amerikanisasi karena, dalam beberapa pertimbangan, Amerika adalah masyarakat kapitalis paling maju di dunia saat ini, dan dengan demikian lembaga-lembaganya mempertunjukkan perkembangan logis dari kekuatan-kekuatan pasar. Maka, jika kekuatan-kekuatan pasar adalah yang menyetir globalisasi, tak bisa dihindari bahwa Amerikanisasi akan mendampingi globalisasi.

D. Tantangan Globalisasi bagi Indonesia

Kondisinya memang serba kompleks. Struktur-struktur lama negara-bangsa memang sedang terguncang hebat. Kedaulatan negara menjadi semakin kehilangan makna akibat kecepatan perpindahan berbagai faktor secara lintas batas negara. Batas-batas fisik-teritorial antar negara menjadi semu dan artifisial. Kenichi Ohmae dalam bukunya *The End of the Nation State* (1995) mengidentifikasi empat faktor itu:

1. *Investasi global* yang ditandai dengan adanya mekanisme transfer modal/investasi yang melewati batas-batas negara, sehingga pemerintah suatu negara tidak dapat mengendalikan sepenuhnya arus transfer tersebut;
2. *Industri berorientasi global*, suatu situasi ketika strategi perusahaan multinasional tidak lagi dibatasi oleh sentimen kenegaraan, tetapi lebih

menekankan pada pengejaran keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar global;

3. *Informasi yang mengglobal* merupakan akibat langsung dari kemajuan bidang teknologi komunikasi, sehingga berdampak pada berkurangnya atau mandulnya monopoli kontrol pemerintah terhadap arus informasi yang diterima oleh warganegaraanya;
4. *Konsumen yang bersifat individual dengan orientasi global*, terjadi karena setiap orang dapat mengakses secara langsung jaringan informasi global tentang gaya hidup di seluruh dunia. Konsumen individual yang mengglobal ini cenderung melupakan nasionalisme di bidang ekonomi. Mereka tidak lagi mempersoalkan asal produk yang mereka konsumsi, yang paling penting mereka dapat memperoleh produk terbaik dengan harga termurah.

Sementara itu, Leslei Sklair (1991) melihat sepak terjang globalisasi pada tiga area utama, yakni ekonomi, politik, dan ideologi kultural. Globalisasi ekonomi dan politik adalah fenomena meluasnya cakupan pengaruh sistem organisasi korporasi ekonomi dan politik negara-negara maju – dalam hal ini khususnya *multinational corporations* (MNC) dan *transnational corporations* (TNC) – terhadap sistem ekonomi dan politik negara-negara berkembang. Ada dominasi ideologi kapitalistik dan neo-liberalisme terhadap identitas nasional negara-negara yang belum maju. Globalisasi ideologi kultural menyebarkan prinsip hidup modern yang tercermin dalam ideologi kultural konsumerisme (Hidayat, 1999).

Di antara ketiga area globalisasi tersebut, berbagai diskursus tentang globalisasi mengakui bahwa yang paling luas pengaruhnya adalah globalisasi ideologi kultural. Dalam bidang ekonomi dan politik, negara bangsa cenderung memiliki filter yang relatif ketat. Tidak semua negara bisa menerima mentah-mentah sistem kapitalisme yang ditawarkan korporat-korporat ekonomi dan politik, sehingga muncul sistem ekonomi campuran, seperti di Cina misalnya. Berbeda halnya dengan globalisasi ideologi kultural yang sangat sukses menembus, mempengaruhi, dan mengubah nilai-nilai dan budaya lokal suatu negara. Dengan iklan, kebudayaan MTV, konsumerisme yang mendewakan merek-merek ternama (Syahrir, 2004:338), batas-batas identitas antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin kabur.

Dapat dikatakan bahwa dalam globalisasi, perubahan-perubahan yang semula muncul di bidang ekonomi, pada akhirnya membawa dampak pula pada persoalan-persoalan di bidang politik, budaya hukum, dan ideologi suatu negara. Perubahan-perubahan di segala bidang itu potensial untuk menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial, karena dalam perubahan sosial, nilai-nilai dan ukuran-ukuran normatif juga ikut berubah. Pasti tidak mudah menemukan nilai-nilai atau ukuran yang tepat dalam dinamika perubahan itu (Hidayat, 1999).

Kecenderungan-kecenderungan globalisasi tersebut di atas jelas memperlemah fungsi tradisional yang dipunyai oleh negara-negara bangsa. Peran pemerintah sebagai aktor dalam ekonomi global berkurang, digantikan oleh para pelaku pasar. Sudah umum diketahui bahwa saat pasar makin kuat, negara akan semakin lemah. Jika tuntutan kaum neo-liberalis – "biarkan pasar bekerja, negara tak boleh turut campur" – dipenuhi, maka konsepsi negara bangsa bisa jadi tidak

lagi relevan dan ketinggalan zaman. Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengungkapkan realitas globalisasi sebagai suatu perubahan sifat dari negara-bangsa sejalan dengan semakin kaburnya kekuasaan dan semakin keroposnya perbatasan oleh perubahan teknologi dan kendali ekonomi jarak jauh (Pontoh, 2003:132). Penguatan globalisasi berbanding lurus dengan pelemahan struktur negara-bangsa, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosio-kultural.

Pada titik ini, tak bisa dihindari adanya benturan peradaban antara identitas lokal suatu negara dengan identitas global yang ditawarkan globalisasi. Konflik internasional terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dan nilai-nilai global (Hidayat, 1999). Perbenturan ini semakin keras akibat adanya fakta bahwa terjadi distribusi yang tidak merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, kemakmuran, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap kelompok (Fuller, 1995:145-158). Bagi negara-negara miskin, globalisasi dirasakan tidak lebih dari penjajahan gaya baru, bukan lagi oleh negara lain melainkan oleh korporat-korporat ekonomi raksasa.

Di Indonesia, masuknya korporat-korporat ekonomi raksasa asing terjadi sejak era Orde Baru. Berbeda dari prinsip Presiden Soekarno yang anti-Barat dan berslogan *Go to hell with your aid!*, Presiden Soeharto membuka pintu selebar-lebarnya untuk modal asing. Dalam film dokumenter *The New Rulers of the World*, jurnalis John Pilger mengamati dampak globalisasi di Indonesia, yakni terjualnya kekayaan alam Indonesia kepada kekuatan ekonomi asing, sehingga akhirnya sebagian besar penduduk negeri yang kaya ini justru tidak menikmati apa-apa. Globalisasi ekonomi dan politik telah mendikte banyak kebijakan pemerintah, sehingga seringkali mengabaikan kepentingan rakyat sendiri.

Selain itu, telah diamati oleh para budayawan dan pengamat sosial bahwa terjadi degradasi identitas kultural pada benak rakyat Indonesia, generasi muda khususnya, dalam wujud penipisan nasionalisme. Hal ini dapat diukur antara lain dari rendahnya rasa cinta pada produksi dalam negeri, kurangnya minat terhadap pelestarian budaya lokal, pem-Barat-an gaya hidup dan selera konsumsi rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai gejala globalisasi ideologis kultural lainnya.

E. Paradigma Pembangunan Indonesia di Era Globalisasi

Sekalipun globalisasi berjalan begitu hebat, kita dapat mengamati dan merasakan bahwa keterikatan emosional terhadap negara-bangsa belum tergantikan oleh loyalitas kepada komunitas global. Thomas L. Friedman dalam pengantar bukunya, *The Lexus and the Olive Tree* (2000) memaparkan fenomena menguatnya lokalisasi, dalam wujud gerakan fundamentalisme, primordialisme, atau ultra-nasionalisme, bersama dengan makin kokohnya globalisasi. Rupanya identitas global masih merupakan ilusi, sehingga masyarakat di berbagai tempat merasa perlu kembali menggali identitas dari sejarah mereka sendiri. Hal inilah yang disebut dengan paradoks globalisasi, yaitu gerak globalisasi selalu memunculkan reaksi lokalisasi, sehingga secara utuh kita melihat fenomena globalisasi sebenarnya adalah *globalisasi*.

emosi tampak penting dalam menciptakan loyalitas dan komitmen (Er, 2002:49). Berbeda dari fenomena globalisasi yang elitis, sebuah atas dasar kesadaran bersama sekelompok manusia akan makna historisitas mereka, dan solidaritas terhadap satu sama lain meliputi geografis tertentu. Negara-bangsa Indonesia, misalnya, mengalami penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain, selain kesamaan bahasa dan corak budaya. Dalam term Ernest Gellner, semua pengalaman masa lampau ini menjadi modal sosial yang besar bagi Indonesia. Sekalipun globalisasi terus-menerus menggerus identitas nasional Indonesia, sedikit banyak modal sosial ini masih tersisa.

Hal yang penting kemudian adalah bagaimana negara Indonesia dapat mengantisipasi eksistensi globalisasi agar dapat terus eksis demi kesejahteraan penduduknya. Belajar dari sejarah perubahan global terdahulu di abad ke-18, suatu negara bangsa dapat bertahan di tengah bergolaknya perubahan asalkan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri (*fast adjusters*). Caranya adalah dengan melakukan berbagai reformasi yang cukup berani dan bersikap optimistik. Negara-negara bangsa yang pesimistik dan lamban merespons perubahan akan segera dilindas oleh roda zaman.

Dalam konteks ini, Pancasila memiliki karakteristik yang menguntungkan untuk menjadi landasan pijak bangsa Indonesia di era globalisasi. Pancasila berisi nilai-nilai yang ideal dan tinggi, tetapi di sisi lain memiliki karakter yang terbuka. Artinya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa dan negara membuka diri terhadap perubahan-perubahan zaman dan siap untuk mempelajari segala sisi baik dan sisi buruknya. Yang harus digarap selanjutnya adalah persoalan konsistensi, kontekstualisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila, melalui operasionalisasi nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praksisnya (Hidayat, 1999).

Pasca gerakan Reformasi, tokoh-tokoh bangsa Indonesia berusaha lebih objektif mengamati situasi Indonesia dari berbagai aspek dalam rangka menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat. Dari sini, lahirlah dokumen Program Pembangunan Nasional 2001-2005. Dalam bagian latar belakang, dianalisis beberapa persoalan aktual bangsa Indonesia, yakni munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial; lemahnya penegakan hukum dan HAM; lambatnya pemulihan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997; rendahnya kesejahteraan rakyat dan lemahnya ketahanan budaya nasional; dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

Dari kondisi umum tersebut, GBHN 1999 menetapkan visi sebagai gambaran keadaan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, GBHN 1999 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
5. Pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6. Pewujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
8. Pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah NKRI.
9. Pewujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
10. Pewujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari KKN.
11. Pewujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12. Pewujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Dengan mempertimbangkan lima latar belakang masalah dan tantangan seperti diuraikan di atas, dan sebagai koreksi terhadap visi, misi, dan agenda pembangunan yang dijalankan oleh rezim pemerintahan Orde Baru, Propenas merumuskan 5 (lima) agenda pokok pembangunan, sebagai berikut:

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

Dalam rangka membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan secara bersamaan, agenda ini mencakup tiga upaya penting. Pertama, diperlukan upaya untuk melakukan reposisi lembaga-lembaga legislatif, eksekutif (termasuk TNI, Polri, dan PNS), serta mewujudkan

keadilan dan kesetaraan gender melalui penyempurnaan terhadap konstitusi dan perundang-undangan. Kedua, diperlukan upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan pada lembaga tertinggi dan tinggi negara serta lembaga-lembaga negara di bawahnya (termasuk TNI, Polri, dan PNS) sesuai dengan peran dan fungsinya, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial serta penyempurnaan mekanisme politik dengan lebih memberikan prioritas kepada pemuda sebagai pewaris masa depan bangsa. Dalam kaitan ini, diperlukan pula upaya untuk mengembangkan sistem kepartaian dan pemilu yang aspiratif, jujur, dan adil. Ketiga, diperlukan peningkatan profesionalisme pada aparatur negara serta pengembangan budaya dan etika politik yang demokratis pada aparatur negara dan masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan budaya toleransi antarkelompok masyarakat, serta mengusahakan kesetaraan gender, dan makin memberikan perhatian pada generasi muda.

2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih

Untuk mewujudkan agenda ini diupayakan melalui penegakan kembali supremasi hukum dengan prioritas kebijakan yang meliputi: penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum; pemberdayaan lembaga peradilan, lembaga penegak hukum lainnya; serta penegakan hukum dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM. Kemudian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ditempuh prioritas kebijakan yang meliputi pemberantasan praktik KKN, pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara.

3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan

Agenda mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan pasar berkeadilan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan pelestarian lingkungan hidup. Agenda ini terdiri dari dua bidang pokok, yaitu ekonomi serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pertama adalah langkah-langkah strategis jangka pendek dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh hasil sesegera mungkin, antara lain meliputi upaya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, menuntaskan restrukturisasi perbankan, mempercepat restrukturisasi utang perusahaan, dan mempercepat realokasi sumberdaya pembangunan. Langkah-langkah ini selain diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pada dasarnya juga ditujukan untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua adalah langkah-langkah jangka menengah yang di samping perlu untuk menunjang pemulihan ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil,

menengah, dan koperasi, pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kemampuan iptek, penguatan institusi pasar, penguatan sistem ketahanan pangan, dan pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif.

Ketiga adalah pengembangan sarana dan prasarana pembangunan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang meliputi langkah strategis untuk mempertahankan fungsi pelayanan prasarana, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi bidang prasarana, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan prasarana, serta meningkatkan peranserta swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana.

Keempat adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan kebijakan strategis berupa penerapan prinsip antar generasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, optimasi pemanfaatan sumberdaya alam, peningkatan potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, serta pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

Agenda ini mencakup pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, agama, pendidikan, pemuda, olahraga, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan perempuan, serta kebudayaan dan iptek.

Dalam pembangunan kependudukan ditempuh strategi kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada peningkatan kualitas penduduk yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga serta penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dalam bidang kesehatan untuk mendukung penerapan paradigma sehat ditempuh empat kebijakan strategis yaitu: penerapan wawasan kesehatan dalam pembangunan nasional, peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, penataan sistem pembiayaan kesehatan, pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan kesehatan.

Di bidang pembangunan pendidikan ditempuh strategi kebijakan, antara lain meliputi: perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; pembaharuan sistem pendidikan terutama kurikulum pendidikan; peningkatan kemampuan akademik dan profesionalitas tenaga pendidik; pemberdayaan lembaga pendidikan melalui prinsip desentralisasi dan otonomi keilmuan dan manajemen; serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang semakin cepat.

Pokok-pokok strategi kebijakan pembangunan agama meliputi antara lain: pemantapan fungsi, peranan, dan kedudukan agama dalam pembangunan; pembinaan dan peningkatan kerukunan umat beragama; peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama; serta peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

Dalam pembangunan kepemudaan ditempuh strategi kebijakan antara lain dengan pemberdayaan organisasi pemuda serta peningkatan kualitas kepemimpinan pemuda agar mampu menjadi kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, patriotis, demokratis, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Untuk memberdayakan perempuan ditempuh strategi kebijakan berupa pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) dalam segala aspek pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

Strategi pokok dalam bidang pembangunan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan melibatkan berbagai potensi dalam masyarakat untuk bersama-sama menangani masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, tunasosial, serta anak jalanan.

Strategi pokok pembangunan ketahanan budaya adalah mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa serta budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal dalam rangka memelihara kerukunan nasional. Termasuk didalamnya adalah perumusan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap perilaku kehidupan bernegara.

Strategi pokok pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mengembangkan interaksi antar lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa-jasa pelayanan teknologi. Dengan interaksi ini diharapkan dapat diciptakan pola *supply-demand* yang saling menguntungkan, dinamis, produktif, dan inovatif antarpelaku dan pengguna iptek dalam suatu sistem inovasi yang efektif dan efisien.

5. Meningkatkan Pembangunan Daerah

Tuntutan desentralisasi yang semakin tinggi membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum dapat dipertahankan bersendikan kekayaan dan keragaman budaya dalam wadah NKRI.

Agenda ini mencakup pengembangan otonomi daerah; pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya permukiman, perkotaan, perdesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal; dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat meningkatkan hidup dan kehidupannya. Di samping itu mencakup juga agenda penanganan khusus Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.

Strategi pokok pengembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan anggota badan legislatif dengan mengembangkan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dan antarpelaku pembangunan; peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi organisasi dan manajemen; dan peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah melalui pewujudan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan

proporsional, serta pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, potensi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Strategi pokok pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan dan kerjasama ekonomi antar pelaku, antara desa dan kota, antar daerah dan antar wilayah yang saling menguntungkan, dengan mendayagunakan penataan ruang dan pertanahan sebagai alat kebijakan, serta dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Strategi pokok pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi inisiatif masyarakat, mengurangi berbagai aturan yang menghambat, mengembangkan budaya kemandirian, keswadayaan, dan kesetiakawanan, serta mengembangkan jaringan kerja masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya, lingkungan alam dan sosial-budaya setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat.

F. Pendidikan Kebangsaan sebagai Antisipasi Globalisasi Kultural

Pengaruh hegemonik globalisasi yang berorientasi pasar menampilkan diri dalam tuntutan profesionalisme dalam pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional versi UU Sisdiknas 2003 menekankan pada aspek manusia berkualitas yang "mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah" sebagai ganti tujuan pendidikan nasional versi UU Sisdiknas 1989 yang menekankan aspek pembangunan identitas "manusia Indonesia yang seutuhnya". Tak bisa dipungkiri bahwa lembaga-lembaga pendidikan didesak semakin kuat untuk menjadikan dirinya wadah pengolah tenaga kerja. Tingkat terserapnya lulusan ke dalam dunia kerja menjadi parameter penting keberhasilan suatu lembaga pendidikan.

Orientasi yang berlebihan terhadap peran serta dalam pasar dan gagasan warga-pekerja telah menimbulkan erosi rasa kewarganegaraan, suatu korosi karakter. Ada proses devaluasi pendidikan dan sistem universitas yang meluas oleh pemerintah-pemerintah neo-liberalis yang telah memangkus pendanaan sehingga kampus tak dapat lagi menjalankan fungsi penyedia pendidikan yang lebih dari sekedar latihan kerja (Turner, 2002:48). Tujuan pendidikan tidak lagi dititikberatkan pada memanusiakan manusia, namun mencetak tenaga kerja. Universitas-universitas menjadi sangat tergantung kepada permintaan pasar dan kian lama kian terdikte oleh keinginan para pemegang kapital. Sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara seringkali tinggal slogan yang terlindas oleh individualisme ekstrem dalam konteks *survival of the fittest*, hukum rimba perburuan keuntungan (*profit*).

Pertanyaannya sekarang, masih kontekstualkah pendidikan kebangsaan bagi generasi muda yang hidup di era global ini?

Melihat kelemahan-kelemahan mendasar globalisasi, rasanya jelas bagi kita bahwa negara-bangsa tidak semudah itu disingkirkan. Memang benar bahwa telah terjadi dan memang dituntut perubahan mendasar dalam pengelolaan batas-batas

kedaulatan teritorial, juga tak bisa dipungkiri pengaruh kuat intervensi modal dalam berbagai kebijakan domestik negara-bangsa, namun hal ini tidak berarti bahwa fase negara-bangsa telah berakhir. Sampai ada mesin politik global yang dapat menerapkan satu hukum bagi semua negara secara efektif, maka loyalitas sebagian besar populasi manusia di dunia akan tetap dipersembahkan kepada negara-bangsanya. Bagaimanapun juga, loyalitas terkait erat dengan faktor geografis dan pengalaman historis. Mayoritas masyarakat masih kembali kepada nasionalisme dan agama sebagai sumber identitas individu dan kolektif mereka. Entitas negara-bangsa masih merupakan kubu pertahanan dan pengelola kehidupan masyarakat.

Pendidikan kebangsaan dengan demikian memiliki makna yang esensial dan juga strategis bagi pendidikan nasional. Disebut esensial karena fungsi pendidikan kebangsaan adalah pendidikan nilai. Paket pendidikan kebangsaan yang saat ini terdiri dari Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama didesain untuk memuat nilai-nilai nasionalisme, religius, kultural, dan historis bangsa Indonesia. Harapannya, setiap peserta didik akan mengalami bukan sekedar alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga alih nilai (*transfer of value*) saat ia menyelesaikan studinya. Kemiskinan nilai di era global, selain individualisme ekstrem, akan diisi oleh nilai-nilai komunal bangsa Indonesia sendiri.

Di sisi yang lain, pendidikan nilai kebangsaan memiliki makna strategis bagi kelanggengan kehidupan bersama dalam suatu negara-bangsa. Secara teoritis, menurut Renan, ingatan dan kenangan terhadap historisitas bersama, termasuk pengalaman menderita bersama, cenderung membangkitkan keterikatan emosional dan kerelaan untuk berkorban. Kelanggengan negara-bangsa tergantung kepada pelestarian ikatan emosional ini dan pendidikan adalah media utama pengalihan rasa cinta tanah air dari generasi ke generasi.

Pendidikan kebangsaan berguna lebih dari sekedar mempertahankan eksistensi, melainkan juga memperjuangkan keadilan bagi komunitas negara-bangsa dalam proses pertukaran ekonomis. Orang Indonesia yang patriotik tentu sakit hati jika mendengar bahwa negerinya terus-menerus menjadi objek jorjoran korporasi-korporasi dunia. Orang Indonesia yang patriotik tentu berupaya agar sesama warga Indonesia yang miskin diberdayakan, yang jadi tenaga kerja di luar negeri memperoleh keadilan, yang korupsi dipenjarakan. Kecintaan pada tanah air membangkitkan altruisme sosial yang tak mungkin lahir dari watak neo-liberalis.

II. CONTOH-CONTOH

1. Krisis moneter di Asia tahun 1997 adalah contoh semakin sempunya batas-batas teritorial antar negara.
2. Perubahan asas buruh-petani-partai di Cina telah berubah pasca berakhirnya Perang Dingin menjadi asas buruh-petani-partai-pengusaha, suatu bukti terjadinya unpolarisasi ideologi dan sistem ekonomi.
3. Tren yang sedang muncul di kalangan mode New York atau Paris akan segera meluas dan muncul sebagai tren mode di negara-negara lain, ini indikasi dari terjadinya globalisasi ideologis kultural.

III. LATIHAN

1. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan di Indonesia?
2. Paradigma pembangunan seperti apa yang dibutuhkan di era globalisasi?
3. Apakah Pancasila pro atau anti globalisasi? Jelaskan!

IV. KUNCI JAWABAN

Baca secara cermat dan pahami dengan teliti penjelasan di atas, perhatikan contoh-contohnya, kemudian periksa hasil pekerjaan Anda atas soal latihan yang diberikan. Jika Anda belum mampu menjawab dengan benar, pelajari kembali materi di atas. Lakukan terus hal ini sampai Anda dapat menjawab semua soal latihan dengan benar.

V. TES FORMATIF

1. Apa pengertian paradigma?
2. Tantangan apa saja yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi?
3. Bagaimana paradigma Pancasila memberi orientasi kepada pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa?
4. Bagaimana Pancasila pasca Reformasi diwujudkan dalam rencana pembangunan yang antisipatif terhadap globalisasi?
5. Apa peran pendidikan kebangsaan dalam mengantisipasi globalisasi kultural?

VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Jika Anda mampu menjawab semua soal di atas, Anda akan memperoleh nilai 100. Apabila nilai yang Anda peroleh lebih dari 80, Anda diperbolehkan melanjutkan pelajaran pada pokok bahasan (bab) berikutnya. Jika nilai Anda masih di bawah 80, pelajari kembali materi perkuliahan, terutama bagian soal yang tidak dapat Anda jawab dengan baik dan benar. Ulangi terus tes ini sampai Anda memperoleh nilai 100.

VII. RANGKUMAN

Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan aspek operasional dari dasar negara dalam pertumbuhan riil kondisi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan ketahanan bangsa. Era globalisasi yang menghilangkan batas-batas absolut antar negara membawa tantangan tersendiri yang harus dipecahkan. Bangsa Indonesia berusaha menjawabnya dengan merumuskan program pembangunan nasional yang responsif terhadap perubahan situasi dunia maupun domestik.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 2001, *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- Dja'is, Mochammad, 1999, "Fungsi Paradigma dalam Perkembangan Ilmu dan Hukum", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Edisi IV (Januari-Maret), Semarang: FH Undip.

- Friedman, Thomas L., 2000, *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, New York : Anchor Books – Random House.
- Fukuyama, Francis, 1999, "Economic Globalization and Culture" *Technology and Society Document*, versi Internet <http://www.ml.com.woml.forum.global.htm> dalam Nef, Jorge, 2002.
- Hidayat, Arif, 1999, "Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia pada Era Global", dalam jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi IV (Januari-Maret); Semarang : FH Undip.
- Korten, David C., 1997, *When Corporations Rule the World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*, Jakarta: Professional Books.
- Martin, Malachi, 1990, *The Keys of This Blood: Pope John Paul II versus Russia and the West for Control of the New World Order*, New York: Touchstone Book – Simon & Schuster.
- Nef, Jorge, 2002, "Globalization and the Crisis of Sovereignty, Legitimacy, and Democracy", *Latin American Perspectives* Issue 127 Vol. 29 No. 6:56-59.
- Pontoh, Coen Husain, 2003, *Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*. Jakarta : C-Books.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, makalah Simposium Nasional Ilmu Hukum, Semarang: FH Undip.
- Rasyidi, Lili dan IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rosdakarya.
- Soros, George, 2001, *Krisis Kapitalisme Global (Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)*, Yogyakarta : Qalam.
- Turner, Bryan S., 2002, "Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism", *Theory, Culture & Society* 19 (1-2):45-63.
- Wikipedia (ensiklopedia on-line), 2005, "Kuhnian Paradigm Shifts" dalam *Paradigm Shift*, http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift
- Wilardjo, Liek, 1998, *Peran Paradigma dalam Perkembangan Ilmu*, makalah Simposium Nasional Ilmu Hukum, Semarang: FH Undip.

IX. SENARAI

Globalisasi : tren yang menggantikan Perang Dingin; suatu tatanan dunia baru yang menjadikan batas-batas teritorial antar negara-bangsa bersifat artifisial.